



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN
ANGGARAN 2017 PADA PEMERINTAH DAERAH
DI PROVINSI ACEH**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

FERHAD AKBAR

NIM. 500693552

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2019

ABSTRACT**ANALYSIS OF VARIABLES THAT AFFECT ABSORPTION OF PHYSICAL SPECIAL ALLOCATION FUNDS IN BUDGET YEAR 2017 IN REGIONAL GOVERNMENT IN ACEH PROVINCE**

Ferhad Akbar
ferhadakbar@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The objective of the research was to analysis variables that affect the budget absorption of Special Allocation Funds in Budget Year 2017 in regional government in Aceh Province, with change pay office (State Treasury Service Office /KPPN) as a moderating variable. Type of research implemented was the correlational quantitative. This research use sampling method saturated that is by making the entire population as a sample. Primary data were collected using questionnaires and variables measured by Likert scale. The rate of return of the questionnaire to the specified time limit is 120 respondents, consisting of KPA (Chief Of Budget User), PPK (financial administration officers), PPSPM (Officer Signing the order to pay), treasurer, procurement officer and monitoring and evaluation team, The data was processed using multiple regressions and residual analysis. The results showed simultaneously that variable of planning, human resources, administration, procurement of good and services, had a positive and significant influence on the budget absorption of Special Allocation Funds in Budget Year 2017 in regional government in Aceh Province. Partially only human resources had a positive and significant influence on the budget absorption. The Variable of administration and procurement of goods and services had a positive and no significant influence on the budget absorption, while planning variable had negative and no significant influence in budget absorption of Special Allocation Funds in Budget Year 2017 in regional government in Aceh Province. The Variable of change of pay office is not a moderating variable that can strengthen and weaken the relationship between the variable of planning, human resources, administration, procurement good and services of the budget absorption of Special Allocation Funds in Budget Year 2017 in regional government in Aceh Province.

Keywords: Budget Absorption, Planning, Human Resources, Administration, Procurement of good and services, State Treasury Service Office, Local Government, Aceh

ABSTRAK**ANALISA VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN
2017 PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI ACEH**

Ferhad Akbar
ferhadakbar@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh dengan memasukkan perubahan kantor bayar (KPPN) sebagai variabel moderating. Jenis penelitian yang dilakukan adalah korelatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode *sampling* jenuh yaitu dengan menjadikan seluruh populasi sebagai sampel. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner dan variabel diukur dengan skala *likert*. Tingkat pengembalian kuesioner sampai batas waktu yang ditentukan sebanyak 120 responden. Responden terdiri dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Pejabat Pengadaan dan Tim Monitoring dan Evaluasi. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji residual untuk menganalisa variabel moderating. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen yang diajukan pada penelitian ini yaitu variabel perencanaan, sumber daya manusia, administrasi, pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh. Secara parsial hanya variabel sumber daya manusia yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh. Variabel administrasi dan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan variabel perencanaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh. Perubahan Kantor Bayar bukanlah merupakan variabel moderating yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel perencanaan, sumber daya manusia, administrasi, pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: Penyerapan Anggaran, Dana Alokasi Khusus Fisik, Perencanaan, Sumber Daya Manusia, Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa, KPPN, Pemerintah Daerah, Aceh

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisa Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Kutacane, Agustus 2018
Yang menyatakan



Ferhad Akbar
NIM 500693552

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi
Aceh

Penyusun TAPM : Ferhad Akbar

NIM : 500693552

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : 26 September 2018

Menyetujui:

Pembimbing I,

Dr. Ari Juliana, M.A.
NIP 19580701 198803 2 001

Pembimbing II,

Dr. Tuswoyo, M.Si
NIP 19620808 198910 1 001

Penguji Ahli

Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, M.P.A.
NIDK.8896870018

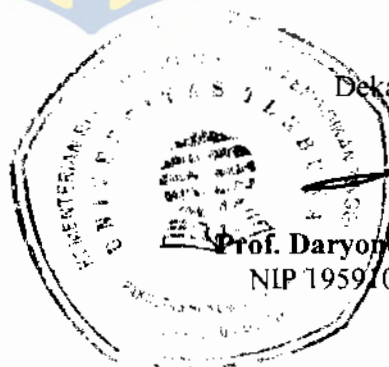
Mengetahui:

Ketua Pascasarjana Hukum,
Sosial dan Politik

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP 19591027 198603 1 003

Dekan FHSIP

Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D
NIP 19591027 198603 1 003



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Ferhad Akbar
NIM : 500693552
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Analisa Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Aceh

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

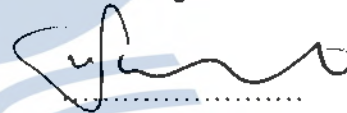
Hari/Tanggal : Rabu, 26 September 2018
Waktu : 14.45 WIB s.d. Selesai

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

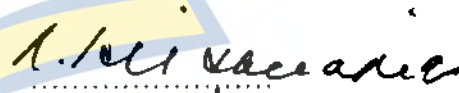
Dr. Darmanto, M.Ed.

Tandatangan



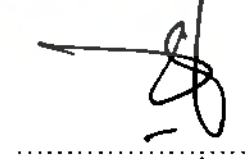
Penguji Ahli

Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, M.P.A.



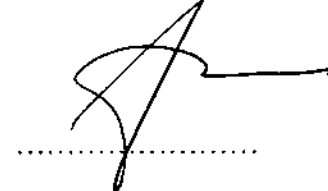
Pembimbing I.

Dr. Ari Juliana, M.A.



Pembimbing II

Dr. Tuswoyo, M.Si



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan TAPM yang berjudul “Analisa Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka.

Peneliti telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan TAPM ini, dengan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Ojat Darojat, Ph. D selaku Rektor Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Darmato, M. Ed, selaku Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan Politik, Universitas Terbuka yang telah banyak Peneliti reptkan dengan pertanyaan-pertanyaan.
3. Ibu Dr. Ari Juliana, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Tuswoyo, M. Si selaku Pembimbing II, yang telah banyak membantu dalam mengarahkan, membimbing dan memberikan saran kepada pencliti dalam menyusun TAPM ini;
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Aziz Sanafiah, MPA selaku Penguji Ahli yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada Peneliti dalam penyempurnaan TAPM ini;
5. Ibu Dra. Sondang Purnamasari Pakpahan, M.A., dan seluruh staf Universitas Terbuka UPBJJ Medan yang telah banyak Peneliti reptkan;

6. Kedua orang tua Peneliti yaitu Ayahku Drs. Fahmi Ilham dan Mamakku Sri Ningsih yang senantiasa memanjatkan do'a serta memberikan nasehat dan motivasi dalam pelaksanaan studi Peneliti;
7. Istriku Ummu Faadhilah Isti Nurhidayah, dan anak-anakku, Kakak Faadhilah, Abang Faalih, Abang Fayyad, dan adek Fahd yang selalu mendukung dan memberi keceriaan bagi Peneliti saat bingung dan galau dalam menyelesaikan TAPM ini, *Jazakumullahu khiran* atas kesabaran serta doanya;
8. Seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dan khususnya KPPN Kutacane yang telah banyak membantu, memberi semangat dan dukungan, semoga Allah membalas kebaikan hati Bapak dan Ibu dengan surge;
9. Teman-teman BPS Aceh Tenggara, BPS Gayo Lues yang telah banyak Peneliti repotkan dengan pertanyaan terkait statistik dan pengolahan data, semoga Allah memudahkan kita memasuki surgaNya;
10. Teman-teman seperjuangan MAP *fully online*, Universitas Terbuka yang telah berkenan bersama-sama saling membantu dan memberikan dukungan, walau kita hanya berjumpa di forum tutorial *online* dan *whatssap*.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Namun demikian besar harapan peneliti, TAPM ini bermanfaat bagi Republik Indonesia tercinta.

Kutacane, Agustus 2018

Peneliti,

Ferhad Akbar
NIM 500693552

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ferhad Akbar
2. Tempat/Tgl Lahir : Selesai/ 07 November 1983
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Aparatu Sipil Negara pada KPPN Kutacane, Kanwil Ditjen PBN Provinsi Aceh
5. Keluarga
 - a. Bapak : Drs. Fahmi Ilham
 - b. Ibu : Sri Ningsih
 - c. Istri : Isti Nurhidayah
 - c. Anak : Faadhilah Dini Azzahra, Faalih Abu Qutaibah, Fayyadh Abu Qilabah, Fahd Abu Qudamah
6. Alamat : Komplek KPPN Kutacane, Jalan Kutacane Blangkejeren Km 3,5 Tanah Merah, Badar, Aceh Tenggara, Indonesia
7. Pendidikan
 - a. 1987 - 1989 : TK Pembina Kecamatan Selesai
 - b. 1989 - 1995 : SD Negeri 10 Kota Binjai
 - c. 1995 - 1998 : SLTP Negeri 4 Kota Tanjung Balai
 - d. 1998 - 2001 : SMU Negeri 1 Kota Tanjung Balai
 - e. 2001 - 2002 : D1 STAN Jurusan Kebendaharaan Negara
 - f. 2004 - 2005 : Program Pembantu Akuntan STAN Jakarta
 - g. 2005 - 2008 : D3 STAN Jurusan Akuntansi
 - h. 2010 - 2012 : S1 Universitas Terbuka Jurusan Manajemen

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstract	i
Abstrak	ii
Lembar Pernyataan	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori.....	13
A.1. Teori Keagenan.....	13
A.2. Desentralisasi Fiskal.....	15
A.3. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Pemerintah.....	18
A.4. Dana Alokasi Khusus.....	25
A.5. Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran.....	31
B. Penelitian Terdahulu dan Keaslian Penelitian.....	39
B.1. Penelitian Terdahulu.....	39
B.2. Keaslian Penelitian.....	49
C. Kerangka Konseptual.....	51
C.1. Pengaruh Perencanaan Terhadap Penyerapan Anggaran.....	53
C.2. Pengaruh SDM Terhadap Penyerapan Anggaran.....	54
C.3. Pengaruh Administrasi Terhadap Penyerapan Anggaran.....	55
C.4. Pengaruh PBJ Terhadap Penyerapan Anggaran.....	55
C.5. Pengaruh Perubahan Kantor Bayar Terhadap Penyerapan Anggaran.....	56
D. Hipotesa Penelitian.....	56
E. Operasionalisasi Variabel.....	58
E.1. Variabel Dependen.....	58
E.2. Variabel Independen.....	59
E.3. Variabel Moderating.....	61

BAB III	METODE PENELITIAN	64
A.	Desain Penelitian	64
B.	Populasi dan Sampel	64
B.1.	Populasi	64
B.2.	Sampel	65
C.	Lokasi dan Jadwal Penelitian	65
D.	Instrumen Penelitian	65
D.1.	Bentuk Instrumen	66
D.2.	Penyusunan Kisi-Kisi Instrumen	67
E.	Metode dan Prosedur Pengumpulan Data	68
E.1.	Metode Pengumpulan Data	68
E.2.	Prosedur Pengumpulan Data	68
F.	Teknik Analisis Data	69
F.1.	Analisis Data	70
F.2.	Uji Kualitas Data	71
F.3.	Uji Asumsi Klasik	72
F.4.	Uji Regresi Linear Berganda	74
F.5.	Pengujian Hipotesis Penelitian	76
F.6.	Uji Moderating (uji Residual)	79
BAB IV	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	80
A.	Deskriptif Objek Penelitian	80
A.1	Analisis Statistik Deskriptif	83
B.	Hasil Penelitian	87
B.1.	Hasil Uji Kualitas Data	87
B.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	90
B.3.	Hasil Hasil Uji Regresi Linear Berganda	95
B.4.	Hasil Uji Hipotesis Penelitian	97
C.	Pembahasan Hasil Penelitian	105
C.1.	Pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran	105
C.2.	Pengaruh SDM terhadap Penyerapan Anggaran	107
C.3.	Pengaruh Administrasi terhadap Penyerapan Anggaran....	108
C.4.	Pengaruh PBJ terhadap Penyerapan Anggaran	110
C.5.	Pengaruh Simultan terhadap Penyerapan Anggaran.....	112
C.6.	Pengaruh Perubahan Kantor Bayar sebagai Variabel Moderating	113
BAB V	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	114
A.	Kesimpulan	114
B.	Keterbatasan Penelitian	115
C	Saran	116
	DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Monitoring Penyaluran DAK Fisik	6
Tabel 2.2	Pendapatan Daerah	25
Tabel 2.2	Klasifikasi DAK Fisik	29
Tabel 2.3	Tinjauan Penelitian Terdahulu	45
Tabel 2.4	Keaslian Penelitian	51
Tabel 2.5	Definisi Operasionalisasi dan Pengukuran Penelitian	62
Tabel 3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	67
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Penelitian	81
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif.....	84
Tabel 4.2.1	Interprestasi Statistik Deskriptif.....	87
Tabel 4.3	Hasil Uji Validitas.....	88
Tabel 4.4	Hasil Uji Reliabilitas	90
Tabel 4.5	Hasil Uji Normalitas.....	92
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinearitas	93
Tabel 4.7	Hasil Uji Nilai Tolerance dan VIF.....	93
Tabel 4.8	Hasil Uji Regresi Berganda	95
Tabel 4.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	98
Tabel 4.10	Hasil Uji F.....	99
Tabel 4.11	Hasil Uji t.....	101
Tabel 4.12	Keterangan Hasil Uji t.....	101
Tabel 4.13	Uji Residual	104
Tabel 4.14	Hasil Uji Residual	104

DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	52
Gambar 4.1	Histogram.....	91
Gambar 4.2	Normal P-Plot.....	91
Gambar 4.3	Grafik Scatterplot.....	94
Gambar 4.4	Hasil Uji F.....	100
Gambar 4.5	Hasil Uji t.....	103
Gambar 4.6	Hasil Uji Residual.....	105



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** Surat Pengantar Penelitian dari Kepala UPBJJ UT Medan
- Lampiran II** Surat Izin Penelitian dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Aceh
- Lampiran III** Kuisisioner
- Lampiran IV** Tabulasi Data
- Lampiran V** Hasil Pengolahan Data
- Lampiran VI** Tabulasi Pertanyaan Terbuka



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak bergulirnya otonomi daerah dengan paradigma baru di Indonesia yang ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka lahirlah sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi di republik ini. Walaupun Undang-undang ini telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka bagaimanapun juga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi titik tolak otonomi daerah yang lebih maju, sebagaimana hal ini telah menjadi konsensus pendiri bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dan lebih jelas lagi setelah pasal ini diamandemen menjadi Pasal 18, 18A dan 18B pada amandemen kedua.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom, ini adalah definisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mardiasmo (2002:97) menyatakan bahwa Masyarakat di daerah sudah menunggu sejak lama atas pemberian peran yang lebih besar untuk membangun daerahnya sendiri berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat sendiri.

Desentralisasi sendiri memiliki empat asepek, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi ekonomi, dan desentralisasi fiskal. dan Prasojo, Ridwan, Kurniawan & Karyana (2015: 5.23) menyatakan bahwa

desentralisasi memiliki dua tujuan, yang pertama yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan yang kedua peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

Penyelenggaran desentralisasi yang saat ini berjalan pasti memiliki konsekuensi logis, yaitu harus adanya sumber pendanaan yang besar. Desentralisasi kewenangan disertai dengan desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendanaan (*revenue*) dan pengelolaan belanjanya dimana transfer daerah adalah bagian dari belanja negara dalam membiayai desentralisasi fiskal (DJPBn, 2017: 1). Nugrahanto dan Muhyiddin (2008: 15) menyatakan bahwa “Desentralisasi fiskal dipercaya sebagai alat efektif untuk meningkatkan efisiensi pada pelayanan publik dan sebagai reaksi atas besarnya sistem sentralisasi yang diterapkan pada banyak negara sedang berkembang”. Dengan adanya pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahan daerah secara optimal, apalagi didukung pendanaan yang memadai dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Pemberian dana tersebut juga untuk memberikan peluang pada pemerintah daerah dalam menjawab aspirasi masyarakat, peningkatan kesejahteraan, pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, serta lebih luas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sesuai amanat pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari dua komponen yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli daerah terdiri dari komponen (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pendapatan transfer meliputi 2 komponen, komponen pertama yaitu transfer pemerintah pusat terdiri dari (1) dana perimbangan (2) dana otonomi khusus (3) dana keistimewaan dan (4) dana Desa. Komponen kedua yaitu transfer antar-Daerah terdiri dari (1) pendapatan bagi hasil dan (2) bantuan keuangan.

Prasojo, Ridwan, Kurniawan & Karyana, I. (2015: 5.24) menyatakan bahwa “dana transfer antar pemerintah, yaitu pembayaran dari level pemerintah yang lain (pusat, daerah yang lebih tinggi/propinsi, atau daerah setingkat lainnya)”. Salah satu komponennya adalah Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal itu yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Salah satu komponen dana transfer sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50//PMK.07/2017 tentang Dana Transfer ke Daerah dan adalah Dana Alokasi Khusus Fisik atau yang dikenal dengan singkatan DAK Fisik. Dimana terjadi perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat, yaitu mulai tahun anggaran 2017 penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui 171 (seratus tujuh puluh

satu) KPPN yang tersebar diseluruh Indonesia, dimana sebelumnya penyalurannya dilakukan secara terpusat melalui KPPN Jakarta II.

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara itu, dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemerintah mengalokasikan DAK Fisik pada APBN 2017 sebesar Rp58,3 Triliun dan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) TA. 2017 anggaran tersebut meningkat menjadi Rp69,5 Triliun (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka mulai awal tahun 2017 penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mulai disalurkan melalui 171 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia, sebelumnya KPPN Pembayar DAK Fisik hanyalah KPPN Jakarta II yang berlokasi di DKI Jakarta.

Tujuan pengalihan penyalurannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Semester I Tahun 2017 yang publikasikan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah melalui 171 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia;
- b. Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan;
- c. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh yang terdiri dari 1 (satu) Pemerintah Provinsi dan 23 Kabupaten/Kota adalah penerima dana DAK Fisik 2017 sebesar Rp2.357.689.049.000,-. Dana yang cukup besar untuk mendorong kemajuan pembangunan Provinsi Aceh pasca konflik berkepanjangan dan bencana besar Tsunami.

Sampai dengan bulan Agustus 2017 menurut data slide presentasi yang disampaikan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan baru tercapai 47,49% secara nasional, sedangkan penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017 untuk Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sampai dengan bulan Agustus 2017 baru mencapai 42,92%, masih dibawah capai nasional.

Tabel 1.1
Monitoring Penyaluran DAK Fisik

No	Provinsi	DAK Fisik	Persentase	DAK Fisik	Persentase	DAK Fisik	Persentase
1	DAK Fisik	1.217.972.074,000	47,49%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
2	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
3	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
4	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
5	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
6	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
7	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
8	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
9	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
10	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
11	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
12	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
13	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
14	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
15	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
16	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
17	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
18	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
19	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
20	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
21	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
22	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
23	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
24	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
25	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
26	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
27	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
28	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
29	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
30	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
31	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
32	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
33	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
34	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
35	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
36	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
37	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
38	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
39	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
40	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
41	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
42	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
43	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
44	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
45	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
46	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
47	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
48	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
49	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%
50	DAK Fisik	1.237.804.000,000	45,17%	508.048.000,000	41,71%	1.237.804.000,000	45,17%

(Slide paparan Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb Agustus 2017)

Dari data di atas mengindikasikan bahwa akan terjadi penyerapan besar-besaran diujung Tahun Anggaran 2017 secara nasional.

Penelitian ini akan difokuskan untuk mengamati pola serapan dari alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2017, terlebih setelah terjadinya perubahan kantor bayar DAK Fisik sebelumnya dibayarkan melalui KPPN Jakarta II di Jakarta. Diseluruh wilayah Provinsi Aceh, terdapat 7 (tujuh) KPPN yang bertugas sebagai penyalur DAK Fisik TA. 2017 yaitu KPPN Banda Aceh, KPPN Lhokseumawe, KPPN Tapak Tuan, KPPN Takengon, KPPN Langsa, KPPN Meulaboh dan KPPN Kutacane.

Penyerapan anggaran selalu menjadi topik menarik, hal ini ditandai dengan banyaknya penelitian berkaitan dengan tema penyerapan anggaran, baik APBN dan APBD yang kurang terserap di awal tahun, tapi digenjot penyerapannya di akhir

tahun, dan ini selalu terjadi. “Bank Dunia menyebut negara-negara berkembang termasuk Indonesia punya permasalahan dalam penyerapan anggaran yang disebut “*slow back-loaded*” artinya penyerapan rendah pada awal sampai tengah tahun anggaran, namun melonjak memasuki akhir tahun anggaran” (BPKP, 2015: 5). Hal ini bukanlah hal yang baik untuk diteruskan, dari satu sisi akan timbul sikap terburu-buru dalam pelaksanaan anggaran, perencanaan yang tidak berkualitas dan hasil kerja juga akan sulit diharapkan menjadi unggul sebagaimana dari data disajikan diatas sudah memasuki bulan Agustus 2017, penyerapan anggaran untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh baru mencapai 42,92% atau sebesar Rp1.011.978.011.620,- dari total pagu Rp2.357.689.049.000,-.

Capaian serapan anggaran merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena realisasi belanja pemerintah adalah bagian dari konsumsi yang menggerakkan roda perekonomian dan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga Pasal 4 ayat 2, yaitu evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Nuri (2017: 1) menyatakan bahwa “Penyerapan anggaran juga merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi”.

Zarinah, Darwanis & Abdullah (2016: 90) menyatakan bahwa “Tingkat penyerapan anggaran pemerintah pusat dan daerah sering menjadi topik utama yang dibahas baik oleh para pengamat ekonomi maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi”. Penilaian ini tentu harus

menjadi perhatian kita bersama, agar kinerja pemerintah semakin hari semakin bagus dan dengan penyerapan anggaran yang baik tidak ada lagi pembangunan yang terhambat dan tentunya keinginan kita bersama yaitu manfaat otonomi daerah dapat dirasakan oleh masyarakat.

Herryanto (2012) dalam penelitiannya pada satuan kerja kementerian dana lembaga di wilayah Jakarta menyebutkan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran belanja di Kementerian/Lembaga dengan nilai signifikansi sebagai berikut (a) faktor perencanaan 42%, (b) faktor administrasi 8,84%, (c) faktor sumber daya manusia 7,80%, (d) faktor dokumen pengadaan 6,4%, (e) faktor ganti uang persediaan 5,41%. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian Sutrisno (2015) di Kabupaten Gunung Kidul menyatakan bahwa faktor-faktor lain seperti (a) perencanaan anggaran, (b) pelaksanaan anggaran, (c) metode pengadaan barang/jasa secara swakelola, dan (d) faktor sumber daya manusia tidak menjadi penyebab rendahnya penyerapan DAK tersebut. Perbedaan yang terjadi terutama dalam hal faktor penyumbang signifikansi terbesar pada penelitian Herryanto (2012) yaitu perencanaan dan sumber daya manusia, begitu juga Rifai, Inapty dan Pancawati (2016) dalam penelitiannya pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa perencanaan anggaran dan sumber daya manusia tidak memberikan pengaruh pada penyerapan anggaran, hal ini juga bertentangan dengan hasil penelitian Herryanto (2012) diatas.

Berkaitan dengan variabel administrasi sebagaimana hasil penelitian Herryanto (2012) yang menyatakan hal tersebut berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, namun bertolak belakang dengan penelitian Priatno & Khusaini (2013)

pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar yang menyatakan hal tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan hasil uraian diatas, latar belakang dan tidak selarasnya beberapa hasil penelitian terdahulu dan rendahnya penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 sebagaimana data yang disajikan diatas pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh, Peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut variabel (a) perencanaan, (b) sumber daya manusia, (c) administrasi dan (d) pengadaan barang/jasa sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Peneliti juga termotivasi untuk menambahkan variabel perubahan kantor bayar sebagai variabel moderating, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas terdapat perubahan kantor bayar mulai tahun anggaran 2017. hal tersebut dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan tersebut terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh dalam pengelolaan DAK Fisik TA. 2017.

Dengan uraian di atas maka dengan memohon pertolongan Allah, semoga Allah memberi kemudahan dan keberkahan, Peneliti tertarik melakukan analisa penyerapan anggaran dengan judul **"Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh"**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, kami memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Rendahnya penyerapan anggaran DAK Fisik yang merupakan bagian dana perimbangan dalam rangka menyokong otonomi daerah, pendukung pemerataan

- kemakmuran dan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat di Provinsi Aceh sampai dengan bulan Agustus 2017 sehingga harus dikawal penyerapannya;
2. Penyerapan anggaran khususnya DAK Fisik yang gagal serap akan mengakibatkan kerugian bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh;
 3. Penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017 pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh yang rendah pada awal dan tengah tahun dan kemudian akan membengkak pada akhir tahun anggaran akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah pusat dan daerah, perencanaan kas pemerintah serta berdampak pula pada kualitas kegiatan tersebut.

C. Batasan Masalah

Berkaitan dengan fenomena tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dibatasi hanya pada penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017, yaitu pasca perpindahan kantor bayar, dimana sebelumnya dibayarkan di KPPN Jakarta II di Jakarta, dan mulai Tahun Anggaran 2017 dibayarkan melalui 7 (tujuh) KPPN yang berada di Provinsi Aceh.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada pendahuluan dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah variabel perencanaan, sumber daya manusia, administrasi, pengadaan barang/jasa secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh?

2. Apakah variabel perubahan kantor bayar dapat memoderasi hubungan variabel perencanaan, sumber daya manusia, administrasi, pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh perencanaan, sumber daya manusia, administrasi, pengadaan barang/jasa secara simultan dan parsial terhadap penyerapan anggaran DAK Fisik Tahun Anggaran 2017.
2. Untuk menganalisa perubahan kantor bayar sebagai pemoderasi hubungan antara variabel perencanaan, sumber daya manusia, administrasi, pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran DAK Fisik Tahun Anggaran 2017.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap ilmu administrasi negara yang telah Peneliti pelajari, sebagaimana menurut para ahli administrasi publik, pengelolaan keuangan negara merupakan lingkup bagian dari ilmu administrasi publik dan Dana Alokasi Khusus Fisik adalah bagian dari keuangan negara dan alat desentralisasi keuangan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia khususnya untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh:

- a) Sebagai bahan informasi baik bagi pimpinan maupun bagi pegawai Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh dalam rangka penyaluran DAK Fisik dan;
 - b) Sebagai bahan pertimbangan dan input bagi pimpinan untuk mengambil keputusan dan mengambil arah kebijakan organisasi dalam penyaluran DAK Fisik bagi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh.
2. Secara akademis bagi Ilmu Pengetahuan yaitu sebagai:
- a) Sumbangan pustaka ilmiah khususnya bagi bidang administrasi publik khususnya keuangan negara dan otonomi daerah;
 - b) Bahan referensi dalam penulisan ilmiah dalam bidang administrasi publik dan keuangan negara dan otonomi daerah;
 - c) Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya dalam penelitian Dana Alokasi Khusus Fisik pada Provinsi Aceh maupun daerah lain di Indonesia.
3. Bagi Peneliti:
- a) Sebagai bahan latihan untuk berfikir kritis dan menghubungkannya dengan teori yang telah dipelajari;
 - b) Sebagai cermin untuk mengukur kelemahan diri untuk terus belajar;
 - c) Semoga menjadi salah satu dari tiga amalan yang tidak terputus setelah Peneliti meninggal dunia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

A.1. Teori Keagenan

Teori keagenan atau yang lebih dikenal dengan *agency theory* sebagaimana yang didefinisikan oleh Jensen dan Meckling (1976: 5):

“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Teori ini adalah tentang hubungan keagenan yang merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang pemberi amanah (*principal*) memerintah orang lain selaku penerima amanah (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi pemberi amanah (*principal*). Didalam lingkungan pemerintah, peraturan perundang-undangan merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik, karena didalamnya dinyatakan secara jelas dan tegas semua kewajiban dan hak untuk semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan.

Hubungan dan masalah keagenan dalam penganggaran antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian tak terpisahkan dalam penelitian keuangan (termasuk akuntansi) publik, politik penganggaran, dan ekonomika publik (Halim & Abdullah, 2006: 60). Termasuk juga dalam hal ini hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Fadzil & Nyoto (2011: 52). *“In government organizations, especially between the national*

government and the local government, there is a principal agent relationship, where the national government is a principal and local government as an agent”.

Menurut Moe dan Strom (dalam Latifah, 2010: 86), hubungan keagenan dalam penganggaran publik adalah antara (1) pemilih dengan legislatur, (2) legislatur dengan pemerintah, (3) menteri keuangan dengan pengguna anggaran, (4) perdana menteri dengan birokrat, dan (5) pejabat dengan pemberi pelayanan.

Menurut Eisenhard (dalam Sabeni, 2005: 6), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) asumsi yaitu:

(a) Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi bahwa sifat manusia lebih mementingkan diri sendiri (*self interest*) dan memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko. (*risk aversion*).

(b) Asumsi tentang keorganisasian, dan

Adanya konflik antar anggota organisasi dan efisiensi sebagai kriteria produktivitas

(c) asumsi tentang informasi.

Adanya informasi yang tidak seimbang (*asymmetric information*) disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent*. Agen memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan *principal* mengenai kinerja, motivasi dan tujuan yang memungkinkan terjadinya *moral hazard* dalam penyusunan anggaran.

Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Fisik yang kemudian ditransfer ke pemerintah daerah, pemerintah pusat sebagai *principal* berkepentingan agar pemerintah daerah melaksanakan tugas yang telah ditetapkan

dan pemerintah daerah selaku penerima manfaat Dana Alokasi Khusus Fisik berkewajiban menunjukkan kinerja terbaik didalam membangun sarana dan prasarana fisik yang telah direncanakan untuk mencapai standar pelayanan minimum yang belum tercapai.

A.2. Desentralisasi Fiskal

A.2.1. Pengertian Desentralisasi Fiskal

Mardiasmo (2002a: 14) menyatakan bahwa “Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam menghadapi era global adalah dengan mengembangkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal”, Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional (Kementerian Keuangan, 2012), dari pernyataan ini dapat ditangkap bahwa desentralisasi fiskal adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian otoritas fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal/daerah (Nugrahanto & Muhyiddin, 2008: 15), dan desentralisasi fiskal menjadi alternatif jawaban dari tuntutan otonomi daerah (Mardiasmo, 2002: 1). Diharapkan dengan adanya otoritas fiskal tersebut meningkat pula pelayanan kepada masyarakat dan dapat memberi stimulus pada pertumbuhan ekonomi. Setidaknya terdapat empat alasan menurut Oates (dalam Bappenas, 2013: 60) untuk dilaksanakannya kebijakan desentralisasi, yaitu efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, akuntabilitas, dan mobilisasi sumber dana. Desentralisasi fiskal sendiri juga sudah berlangsung sejak tahun 2001 dengan pengalihan dana ke daerah dalam jumlah besar (DJPK, 2012: 13). Praktik yang diterapkan di Indonesia adalah kepada daerah diberikan atau diserahkan terlebih dahulu urusan pemerintah

tertentu, baru kemudian diserahkan pula sumber-sumber keuangan untuk membiayai penyelenggaraan urusan yang telah diserahkan (Ikhsan, 2014: 11.26).

Desentralisasi fiskal adalah salah satu dari empat desentralisasi yang terjadi di Indonesia, desentralisasi yang lain adalah desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi ekonomi. Keberhasilan desentralisasi fiskal bergantung pada pemaduan empat pilar desentralisasi fiskal secara efektif, yakni: alokasi fungsi ke beberapa tingkat pemerintah, alokasi tanggung jawab pendapatan, desain sistem transfer antar pemerintah, dan kebijakan sistem pinjaman subnasional yang tepat (DJPk, 2012: 182).

A.2.2. Transfer Pemerintah dalam Desentralisasi Fiskal

Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara yang tercantum dalam APBN dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal (DJPBn, 2017: 1). Ada sejumlah teori mengenai mengapa transfer dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah harus dilakukan, Transfer ke daerah memiliki tujuan sebagai berikut: (1) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antardarah; (2) mendukung prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik; (4) meningkatkan penerimaan daerah; (5) memperluas pembangunan (Kuncoro, 2014: 53).

Petersen dan Strachota (dalam Prasajo, Ridwan, Kurniawan & Karyana, 2015: 5.23) menyatakan hal ini dilakukan agar (1) agar pemerintah yang mendapatkan transfer dapat menyediakan pelayanan tertentu yang tidak dapat dia laksanakan sendiri kalau tidak mendapat bantuan dana; (2) mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal (*equalization*); (3) sebagai kompensasi terhadap penyediaan jasa yang telah dilakukan oleh penerima dana transfer yang seharusnya

dikerjakan oleh pemerintah yang memberikan dana; (4) dalam rangka mengurangi dampak eksternalitas; (5) dalam rangka menstimulasi merit goods tertentu yang diproduksi oleh swasta; (6) dalam rangka redistribusi pendapatan dan (7) untuk tujuan politis tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Cara untuk meningkatkan kapasitas daerah dan menutup kesenjangan fiskal adalah melalui pembenahan manajemen penerimaan daerah (Mardiasmo (2002: 166)).

Berkaitan dengan tujuan politis tertentu sebagaimana yang telah disebutkan Petersen dan Strachota (dalam Prasajo, Ridwan, Kurniawan & Karyana, 2015: 5,24) diatas, Pratikno (dalam Kuncoro, 2014: 46) menyebutkan untuk praktek yang terjadi di Indonesia ada 2 misi politik utama; pertama untuk memuaskan semua daerah dengan memberikan ruang partisipasi politik yang tinggi ditingkat daerah yang kedua untuk memuaskan daerah yang kaya sumber daya alam yang “memberontak” dengan memberikan akses yang lebih besar untuk menikmati sumber daya alam yang ada didaerah masing-masing.

Dalam lingkup Indonesia, transfer fiskal sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Sumber Daya Alam (DJPK, 2012:128). Desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah (DJPK, 2012:128). Dan Desentralisasi fiskal di Indonesia lebih menitikberatkan pengeluaran dari pada pendapatan (Nugrahanto & Muhyiddin, 2008: 17).

A.3. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Pemerintah

A.3.a Pengertian dan Fungsi Anggaran

A.3.a.1) Pengertian Anggaran Pemerintah

Menurut Hariadi, Restianto & Bawono (2010: 7) anggaran adalah pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu tertentu, beserta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Sedangkan menurut Darise (2008) dalam Syahputra (2016:13) menyatakan bahwa Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Sementara Freeman & Shoulders (dalam Latifah, 2010: 88) menyatakan bahwa anggaran yang ditetapkan dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif, hal ini berkaitan dengan teori keagenan yang telah disebutkan diatas, bahwa legislatur sebagai principal dan eksekutif sebagai agen yang akan memaksimalkan harapan principal.

Anggaran pemerintah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dana DAK Fisik yang menjadi objek penelitian ini berasal dari APBN dan ditransfer ke APBD Pemerintah Daerah Penerima Manfaat DAK Fisik. Harjowiryo (2017) mengutip perkataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2017 yang menyatakan bahwa Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi juga mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik.

A.3.a.2) Fungsi Anggaran Pemerintah

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada nomor 6 (enam), disebutkan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Proses penyusunan anggaran pemerintah memiliki sifat yang berbeda dengan penyusunan anggaran bisnis. Menurut Lee & Jbonson (dalam Latifah, 2010: 88) menyebutkan perbedaan tersebut mencakup (1) Ketersediaan sumber daya, (2) Motif laba (3) Barang Publik, (4) eksternalitas, (5) penentuan harga pelayanan publik dan (6) intervensi pemerintah terhadap perekonomian melalui anggaran, kepemilikan atas organisasi, dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatan keputusan.

Mardiasmo (2002: 122-124) menyebutkan fungsi anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*planning tool*)
2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*control tool*)
3. Anggaran sebagai kebijakan fiskal (*fiscal tool*)
4. Anggaran sebagai alat politik (*political tool*)
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*)
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*)
7. Anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*)

A.3.a.3) Prinsip Anggaran Pemerintah

Dalam Hariadi, Restianto & Bawono (2010: 8) disebutkan bahwa prinsip anggaran pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Otorisasi oleh legislatif

Anggaran harus mendapat otorisasi oleh DPR sebelum digunakan oleh pemerintah. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.

2. Komprehensif

Anggaran memuat 2 (dua) hal, yaitu penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

3. Keutuhan anggaran

Seluruh penerimaan dan pengeluaran harus terhimpun dalam dana umum.

4. *Nondiscretionary appropriation*

Anggaran harus digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

5. Periodik

Anggaran disusun dalam jangka waktu tertentu, di Indonesia APBN dan APBD berlaku periode 1 tahun, dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

6. Akurat

Penyusunan anggaran dan pengeluaran disusun secara akurat sehingga tidak terjadi menaksir terlalu rendah penerimaan dan menaksir terlalu tinggi pengeluaran.

7. Jelas

Anggaran harus disusun secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pengguna dan masyarakat.

8. Transparan

Anggaran dapat mudah diketahui oleh masyarakat.

A.3.b Penyerapan Anggaran dan Pertumbuhan Ekonomi

A.3.b.1) Konsep Penyerapan Anggaran

Menurut Mardiasomo (2009) dalam Nuri (2017:17) menyatakan bahwa penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakannya. Penyerapan anggaran ini terjadi pada siklus APBN/APBD yaitu pada periode pelaksanaan anggaran, pada siklus ini akan terlihat dengan jelas, berapa pagu, realisasi anggaran dan sisa pagu serta persentase realisasi penyerapan anggaran yang akan dibandingkan rencana penyerapan anggaran tiap periodenya.

Pagu Anggaran DAK Fisik termuat didalam APBN dan selanjutnya akan diserahkan pada pemerintah daerah penerima DAK Fisik dan besaran pagu

anggaran tersebut akan dicantumkan dalam APBD pemerintah daerah sebagai pendapatan transfer dan pemerintah daerah menyiapkan dana 10% dari total DAK Fisik sebagai dana pendamping pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam teori ilmu makro ekonomi, pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan salah satu faktor penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) bersama dengan konsumsi masyarakat, investasi swasta dan ekspor netto (ekspor-impor). Hal ini tergambar dalam persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + NX$$

- Y = Pendapatan Nasional
- C = Konsumsi Masyarakat
- I = Investasi Swasta
- G = Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*)
- NX = Ekspor – Impor

Berdasarkan persamaan diatas memberi gambaran pengaruh G (Pengeluaran Pemerintah) terhadap Y (Pendapatan Nasional). Berdasarkan teori ekonomi pembangunan, seharusnya peran belanja pemerintah bersifat *countercyclical* sehingga pelaksanaan kegiatan dan kucuran belanja dapat menggerakkan ekonomi sejak awal tahun, mempertahankan daya beli dan kesejahteraan masyarakat (DJPBn, 2015a: 23).

Dalam banyak penelitian terdahulu menyebutkan pengeluaran Pemerintah Pusat di suatu daerah akan berdampak pada PDRB di daerah tersebut. Salah satunya hasil penelitian Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (2015) yang menyatakan terjadi pertambahan PDRB sebesar 23,267079424 Rupiah setiap terjadi belanja pemerintah pusat sebesar 1 (satu) Rupiah di Kepulauan

Riau. Berdasarkan temuan ini kita berharap setiap rupiah pengeluaran dana DAK Fisik pada Provinsi Aceh akan berdampak pula terhadap PDRB di Provinsi Aceh.

A.3.b.2) Pertumbuhan Ekonomi

Penyerapan dana APBN terutama pada bagian belanja pembangunan yang optimal merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Rifai, et al. (2016: 1) menyatakan bahwa “Permasalahan mengenai realisasi daya serap anggaran yang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dialami oleh banyak instansi atau lembaga pemerintahan tidak hanya di tingkat pusat namun juga di daerah-daerah di Indonesia”. Dalam beberapa tahun terakhir ini, belanja Kementerian/Lembaga telah menghasilkan pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang rendah di semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran berjalan (Kuswoyo, 2011). Kegagalan target penyerapan anggaran memang berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang artinya terjadi *idle money*. (BPKP, 2011; 5). Presiden Joko Widodo sebelum memulai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden berharap semakin meningkatnya serapan anggaran akan memicu laju pertumbuhan ekonomi (Kompas Bisnis, 2015). Terkait Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah kabupaten/kota, membuat Presiden Joko Widodo geram dan Presiden telah menyiapkan sanksi bagi kepala daerah yang masih minim serapan belanja APBD-nya. (Detik News, 2017)

Berdasarkan temuan penelitian Malau (2005) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” dengan menggunakan metode OLS untuk periode pengamatan 1984-2003

menemukan bahwa pengeluaran rutin berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia.

Penyerapan yang optimal akan akan memacu pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), memperluas lapangan kerja (*pro job*), mengurangi kemiskinan (*pro poor*) serta mendukung pembangunan daerah (DJBn, 2017). Dalam penelitian Sutriyono (2006) dengan judul "Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan menggunakan pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression" untuk periode tahun 1970-2003 menyatakan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara total pengeluaran pemerintah dengan produk domestik bruto. Pengeluaran rutin tidak signifikan mempengaruhi produk domestik bruto karena lebih bersifat konsumtif dan tidak produktif serta sebagian besar bersifat kontraktif seperti belanja untuk pembayaran bunga utang. Sementara pengeluaran pembangunan memiliki hubungan kausalitas positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto. Cepat atau lambatnya realisasi belanja DAK Fisik tentu akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan program pemerintah, penyerapan anggaran yang optimal ini akan memacu percepatan tercapainya standar pelayanan minimum kepada masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi daerah penerima DAK Fisik.

Penyerapan anggaran yang tidak optimal menjadikan peran belanja pemerintah yang seharusnya bersifat *countercyclical* menjadi tidak berjalan karena belanja yang menumpuk pada akhir tahun, dimana seharusnya belanja pemerintah tersebut bersifat sejalan dengan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dari satu triwulan ke triwulan berikutnya (DJPBn, 2015b: 14)

A.4. Dana Alokasi Khusus Fisik

A.4.a. Kedudukan DAK Fisik dalam Struktur Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Pendapatan transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan Asli daerah terdiri atas komponen (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pendapatan transfer meliputi 2 komponen, komponen pertama yaitu Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas (1) dana perimbangan (2) dana otonomi khusus (3) dana keistimewaan dan (4) dana Desa. Komponen kedua yaitu transfer antar-Daerah terdiri atas (1) pendapatan bagi hasil dan (2) bantuan keuangan. Dalam tabel disajikan sebagai berikut sehingga kita bisa mengetahui secara detail kedudukan Dana Alokasi Khusus Fisik yang Penulis telaah dalam struktur dana perimbangan menurut undang-undang tersebut.

Tabel 2.1
Pendapatan Daerah

PENDAPATAN DAERAH		
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
A. Pajak Daerah B. Retribusi Daerah	A. Transfer Pemerintah Pusat 1. Dana Perimbangan a. DBH b. DAU c. DAK 1) DAK Fisik	

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2) DAK Non Fisik 2. Dana Otonomi Khusus 3. Dana Keistimewaan 4. Dana Desa B. Transfer antar Daerah 1. Pendapatan Bagi Hasil 2. Bantuan Keuangan	
--	---	--

A.4.b. Fungsi Kedudukan DAK Fisik

Pengertian Dana Alokasi Khusus diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dari 2 (dua) definisi diatas, dapat dibuat kesimpulan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah:

1. Bersumber dari dana APBN
2. Ditujukan pada untuk daerah tertentu, tidak semua daerah
3. Membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah
4. Adanya kesesuaian dengan prioritas nasional

Secara umum, DAK menyerupai Dana Inpres (Instruksi Presiden) yang dikembangkan di masa Pemerintahan Orde Baru yang diimplementasikan terakhir pada tahun 1998 (TADF, 2013). Dalam model dana transfer seperti ini, Prasojo, Ridwan, Kurniawan & Karyana (2015: 5.25) menyatakannya sebagai *specific grant* atau dana alokasi khusus, karena terdapat larangan yang ketat terhadap penggunaan dana, larangan ini dimaksudkan agar dana harus dibelanjakan untuk tujuan spesifik yang telah ditentukan. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana Pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran Pemerintah Daerah Penerima Manfaat DAK Fisik.

A.4.c. Kriteria Pengalokasian DAK

Pemerintah telah menetapkan kriteria pengalokasian DAK ke masing-masing daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, kriteria tersebut yaitu:

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto yang ditetapkan setiap tahun.
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria ini dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan

mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri terkait.

3. Kriteria Teknis, yang disusun indikator-indikator kegiatan khusus yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

A.4.d. Jenis-jenis DAK Fisik

DAK Fisik merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1) DAK Fisik Reguler

DAK Fisik Reguler adalah DAK yang diarahkan untuk mendanai bidang yang ditetapkan setiap tahun sesuai kebutuhan daerah dan prioritas nasional. Pada tahun 2017 Terdapat 7 (tujuh) bidang dalam kategori DAK Reguler, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Permukiman, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Sentra Industri Kecil dan Menengah, dan Pariwisata.

2) DAK Fisik Infrastruktur Publik Daerah/Penugasan

DAK Infrastruktur Publik Daerah/Penugasan adalah DAK yang diarahkan untuk mendanai bidang infrastruktur dan sarana/prasarana tertentu yang pada umumnya terkait dengan penyediaan konektivitas nasional, penyediaan sumber air baku dan sumber energi, dan penyediaan sumber daya manusia terampil guna mendukung pengembangan industri, perdagangan, dan pariwisata dan kegiatan

ekonomis strategis lainnya yang menjadi prioritas nasional. Kategori ini terdiri dari 8 (delapan) bidang, yaitu Pendidikan SMK, Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama), Air Minum, Sanitasi, Jalan, Pasar, Irigasi, dan Energi Skala Kecil dan Menengah.

3) DAK Fisik Afirmasi

DAK Afirmasi adalah DAK yang diarahkan untuk mendanai percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana pada wilayah daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Terdapat 3 (tiga) bidang dalam kategori ini, yaitu Perumahan dan Permukiman, Transportasi, dan Kesehatan.

Klasifikasi DAK Fisik tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.2
Klasifikasi DAK Fisik

DAK Fisik Reguler	DAK Fisik Penugasan	DAK Fisik Afirmasi
1. Pendidikan,	1. Pendidikan SMK	1. Perumahan dan
2. Kesehatan,	2. Kesehatan (RS	Permukiman,
3. Perumahan dan	Rujukan dan	2. Transportasi, dan
Permukiman,	Pratama)	3. Kesehatan
4. Pertanian,	3. Air Minum	
5. Kelautan dan	4. Sanitasi	
Perikanan,	5. Pasar	
6. Sentra Industri Kecil	6. Irigasi	
dan Menengah,	7. Energi Skala Kecil	
7. dan Pariwisata	dan Menengah	

A.4.f. Sasaran DAK Fisik

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki karakteristik berbeda dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), penggunaan DAK ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Pasal 1 angka 23 UU Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah pusat menyalurkan alokasi DAK untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, terlebih terkait DAK Fisik, dana tersebut digunakan membiayai kebutuhan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan dasar kepada masyarakat yang belum mencapai standar. Dana Alokasi Khusus (DAK) difokuskan pada investasi modal fisik dibeberapa pemda terpilih dan untuk sektor yang penting secara nasional (DJPK, 2012). Pemberian DAK juga merupakan salah satu kebijakan afirmasi pemerintah pusat dalam membantu daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi untuk pembangunan manusia, pembungunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan dalam menggapai pembangunan di bidang infrastruktur dasar (Kemenkes, 2017). Tidak dapat dipungkiri bahwa bagi daerah tertentu, terutama daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah dan sebagian besar DAUnya terpakai untuk gaji pegawai dan belanja rutin lainnya, DAK masih tetap menjadi salah satu tumpuan harapan sumber pembiayaan pembangunan ke depan (Bappenas, 2011:57). DAK di Indonesia juga mempunyai fungsi untuk menjembatani pencapaian standar pelayanan minimum secara nasional, yang berarti bahwa DAK selayaknya dilakosikan kepada daerah tertentu yang belum bisa mencapai kualitas standar nasional pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan (DJPK, 2012:24). Lebih lanjut secara ringkas Kuncoro (2014:71) menyebutkan bahwa kebutuhan khusus dalam DAK meliputi:

Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses memadai ke daerah lain; daerah transmigrasi, daerah pesisir/kepulauan, daerah yang terkena dampak kerusakan lingkungan.

A.5. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran

A.5.a. Perencanaan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Proses perencanaan anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua belas bulan sebelum tahun anggaran dimulai, proses perencanaan anggaran sudah mulai berjalan (BPKP, 2012: 9). Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013: 127) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Namun sayangnya, saat ini kualitas perencanaan anggaran daerah yang relatif lemah (Mardiasmo, 2002: 117).

Perencanaan adalah bagian terpenting dari siklus penyusunan anggaran, hal inilah yang menentukan arah dalam pelaksanaan anggaran, penentu tercapai tidaknya sebuah sasaran dengan baik. Meskipun perencanaan yang telah disusun sebaik mungkin belum tentu menghasilkan realisasi sasaran yang baik, karena adanya faktor teknis lainnya dilapangan, namun perencanaan yang tidak sempurna dapat dipastikan akan menghasilkan realisasi yang buruk.

A.5.b. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat berjalan dengan baik apabila didukung 3 (tiga) faktor, sebagaimana menurut Sidik (dalam Prasajo, Ridwan, Kumiawan & Karyana, 2015: 5.24) disebutkan sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat yang mampu melakukan pengawasan dan *enforcement*;
2. SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran pemerintah pusat;
3. Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

faktor utama dan penting yang menentukan baik atau tidak jalannya roda pemerintahan ini adalah sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari bagaimana manusia sebagai tenaga kerja menggunakan potensi fisik dan psikis yang ia miliki secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi (lembaga). Fungsi pemerintah sebagai sumber daya manusia dapat diwujudkan melalui kegiatan pemerintah sebagai pengelola keuangan daerah dalam penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah pusat maupun daerah mau tidak mau harus melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46a Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pemerintah dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, *focus group discussion*, *workshop*, internalisasi serta sosialisasi berbagai peraturan dan teknologi informasi tentang pengelolaan DAK Fisik kepada para KPA, PPK, dan pejabat/staf pelaksana DAK Fisik. Pendidikan, pelatihan, *workshop* serta sosialisasi peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diharapkan berdampak pada baiknya pelaksanaan program kegiatan pemerintah yang pada akhirnya memberi dampak yang lebih cepat bagi proses penyerapan anggaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan Rifai, et al (2016) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa berdasarkan teori semakin baik kualitas sumber daya manusia sebagai penerima amanah (*agent*) dalam menjalankan program dan kegiatan dari pemberi amanah (*principal*) maka penyerapan anggaran yang akan dicapai semakin baik.

A.5.c. Administrasi

Siagian (dalam Sundarso, et al, 2016: 1.5) mendefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari uraian ini dapat diuraikan beberapa hal yang terkandung dalam administrasi yaitu (1) adanya 2 (dua) manusia atau lebih, (2) adanya tujuan yang hendak dicapai, (3) adanya tugas yang harus dilakukan, (4) adanya peralatan, perlengkapan dan dokumen dalam pelaksanaan tugas tersebut. Para ahli menyatakan bahwa ciri administrasi adalah birokrasi sedangkan sarjana administrasi menyatakan bahwa ciri khusus administrasi adalah organisasi dan manajemen. Dalam penelitian ini administrasi yang dimaksud adalah administrasi negara, sebagaimana definisi

Siagian (dalam Sundarso, dkk, 2016; 1.11) yang menyatakan bahwa administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan aparatur pemerintah dari suatu negara untuk mencapai tujuan negara.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (2015) menyatakan bahwa:

“Ketakutan pemerintah daerah dalam administrasi dan teknis penggunaan anggaran, menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Selama ini Pemda ketakutan untuk menyerap anggaran karena soal administrasi, soal teknis yang belum tentu ada niat jahat mengambil uang, tapi bisa dipidana”

Herriyanto (2012) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta menyatakan bahwa faktor administrasi memberikan kontribusi keterlambatan penyerapan anggaran sebesar 8,84%, variabel yang dimaksudkan dalam kategori administrasi adalah, (1) salah dalam penentuan akun, (2) masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek, (3) keterbatasan pejabat pengadaan barang/jasa yang bersertifikat Kuswoyo (2011) menyatakan bahwa permasalahan penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek salah satu faktor administrasi yang menghambat penyerapan anggaran. Sedangkan Siswanto dan Rahayu (2010), Miliasih (2012) dan Kuswoyo (2011) keterbatasan pejabat/pelaksana pengadaan barang/jasa yang bersertifikat merupakan bagian dari faktor administrasi. Miliasih (2012) menyatakan kebijakan teknis juga merupakan faktor administrasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

A.5.d. Pengadaan Barang/Jasa

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/SKPD/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pengadaan pada Kegiatan DAK Fisik 2017 dapat digolongkan pada 2 jenis yaitu (1) pengadaan barang/jasa melalui Penyedia Barang/Jasa, (2) pengadaan melalui swakelola. Dalam Pasal 7 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa organisasi pengadaan barang/jasa terdiri atas:

1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
2. Pejabat pembuat komitmen;
3. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan;
5. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.

Pengadaan melalui penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui pemilihan penyedia barang, proses pemilihan ini dapat dilakukan dengan:

1. Pelelangan Umum;
2. Pelelangan Terbatas;
3. Pelelangan Sederhana;
4. Penunjukan Langsung;

5. Pengadaan Langsung; atau

6. Kontes.

Swakelola menurut Peraturan Presiden diatas adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Jenis pekerjaan dapat diadakan melalui swakelola adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;
3. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
5. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
6. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
7. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;

8. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
9. Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri
10. Penelitian dan pengembangan dalam negeri;
11. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri;

Jika kita mencoba menelaah Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, akan terlihat banyaknya tahapan dalam menentukan penyedia barang dan jasa, sebagai contoh akan disajikan metode penunjukan dengan pelelangan umum. Pelelangan umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. Dalam metode pelelangan umum satu sampul, tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman;
2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
3. Pemberian penjelasan;
4. Pemasukan Dokumen Penawaran;
5. Pembukaan Dokumen Penawaran;
6. Evaluasi penawaran;
7. Evaluasi kualifikasi;
8. Pembuktian kualifikasi;
9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
10. Penetapan pemenang;

11. Pengumuman pemenang;
12. Sanggahan; dan
13. Sanggahan Banding (apabila diperlukan).

Banyaknya tahapan yang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa membutuhkan waktu yang panjang sampai dengan tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut. Kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja, khususnya untuk belanja Dana Alokasi Khusus Fisik. Jika seluruh tahapan ini tidak dilaksanakan secara sesuai rencana, penyerapan anggaran pasti mengalami keterlambatan yang berakibat pada terhambatnya pembangunan di daerah penerima manfaat DAK Fisik 2017.

A.5.e Perubahan Kantor Bayar

Perubahan kantor bayar sebagai variabel moderating baru diajukan pada penelitian ini, belum ditemukan pada penelitian sebelumnya, sejauh pencarian Peneliti pada daftar pustaka, diduga dapat memberikan kontribusi positif dalam penyerapan anggaran DAK Fisik, terlebih dari penjelasan sebelumnya, bahwa perubahan kantor bayar ini melibatkan teknologi ini yang digunakan sebagai alat penghubung antara pemerintah daerah penerima manfaat DAK Fisik 2017 dengan KPPN di daerah, pada Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dijelaskan bahwa Aplikasi SAKTI, SPAN, MonSAKTI dan OMSPAN telah dapat dengan lancar mendukung seluruh proses penyaluran dan pelaksanaan monitoring penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, walau pada penelitian ini kita hanya menjadikan OMSPAN sebagai teknologi terapan yang menjadi objek penelitian, karena aplikasi SAKTI, SPAN, MonSAKTI

dipergunakan oleh KPPN untuk memproses data DAK FISIK dan yang dipergunakan oleh pemerintah daerah c.q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari pemerintah daerah penerima manfaat DAK Fisik hanya pada aplikasi OMSPAN, sedangkan SKPD pengelola DAK Fisik tidak terlibat dalam menjalankan aplikasi ini. Tujuan dilakukannya perubahan kantor bayar DAK Fisik mulai TA. 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah melalui 171 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia;
- b. Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan;
- c. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

B. Penelitian Terdahulu dan Keaslian Penelitian

B.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan Peneliti jadikan rujukan dalam melakukan penelitian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Herryanto (2012) dalam penelitiannya dengan menggunakan analisis faktor eksploratori (*Eksploratory Factor Analysis-EFA*) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah Jakarta Tahun Anggaran 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perencanaan mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran sebesar 42,91%, faktor administrasi

8,84%, faktor SDM 7,80%, faktor dokumen pengadaan 6,4% dan faktor ganti uang persediaan sebesar 5,41%.

2. Priatno & Khusaini (2013) melakukan penelitian tentang penyerapan anggaran dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar. Penelitian ini menggunakan analisis faktor dan regresi logistic, dan *tehnik accidental sampling* yaitu mengambil sebanyak 81 satuan kerja. Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa faktor administrasi dan SDM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran sedangkan faktor perencanaan dan faktor pengadaan barang dan jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja.
3. Nugroho (2013) Melakukan penelitian dengan menggunakan analisis faktor pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Malang, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPPN Malang yang berkaitan dengan proses pencairan dana APBN (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penanda Tangan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Operator SPM), sebanyak 100 sampel, penumpukan pencairan dana pada akhir tahun disebabkan 6 Faktor dengan bobot masing-masing faktor, faktor perencanaan mempengaruhi penumpukan sebesar 29,939%, faktor peraturan 10,705%, faktor SDM 10,705%, faktor teknis 7,289%, Faktor kendala koordinasi 6,489% dan faktor pengadaan barang/jasa 5,430%
4. Wijanarko (2014) melakukan penelitian pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2013, menggunakan analisis regresi multinomial, Hasil

penelitian menunjukkan bahwa faktor revisi, sumber dana dan jenis satker secara signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran, sedangkan faktor blokir dan faktor lokasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013.

5. Putri dan Fachruzzaman (2014) melakukan penelitian pada satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu, hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran, dokumen pengadaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran dan uang persediaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dokumen perencanaan tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran dan pencatatan administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.
6. Pratama (2015) melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja satuan kerja Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tahun Anggaran 2013 diukur dengan metode kuantitatif dan skala *likert*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perencanaan, administrasi, SDM dan ganti uang persediaan secara signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran, sedangkan dokumen pengadaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran TNI AD Tahun 2013.
7. Arthana (2015) melakukan penelitian tentang kinerja penyerapan anggaran dengan judul Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Pegawai Pada Kinerja Penyerapan Anggaran (Studi Pada Satuan Kerja Di Lingkup Pembayaran Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Denpasar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kompetensi pegawai berpengaruh positif pada kinerja penyerapan anggaran sementara faktor kejelasan sasaran dan komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja penyerapan anggaran.

8. Sutrisno (2015) melakukan penelitian dengan judul Analisis Atas Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010 sampai dengan 2013, hasil penelitian menyebutkan bahwa penyebab rendahnya penyerapan ini adalah keterlambatan terbitnya juknis dari Kementerian Pendidikan dan sering terjadinya revisi atas juknis di tahun berjalan. Sedangkan untuk faktor-faktor lain seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, metode pengadaan barang/jasa secara swakelola, dan faktor sumberdaya manusia bukanlah penyebab rendahnya penyerapan DAK tersebut.
9. Rifai, et al (2016) melakukan penelitian tentang keterlambatan daya serap anggaran (studi empiris pada SKPD Nusa Tenggara Barat). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan, regulasi, koordinasi, pelaksanaan, desentralisasi dan sumber daya manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu aparatur yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dan aparatur yang terlibat dalam proses penatausahaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perencanaan, regulasi, pelaksanaan,

desentralisasi, koordinasi dan sumber daya manusia tidak berpengaruh pada keterlambatan daya serap anggaran SKPD Nusa Tenggara Barat.

10. Setyawan (2016) melakukan penelitian pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Bojonegoro TA. 2015, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, ditemukan faktor penyebab keterlambatan penyerapan anggaran belanja yang paling dominan adalah perencanaan anggaran, faktor pengadaan barang/jasa dan faktor sumber daya manusia.
11. Simanjuntak (2016) Melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, surat permintaan pembayaran langsung dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada SKPD di Pemerintah Kota Medan. Penelitian ini dimulai sejak bulan Desember 2015 sampai dengan Juni 2016, dengan populasi 180 responden yang terdiri dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausaha keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat pengadaan, dan bendahara pengeluaran pada 30 SKPD. menggunakan kuesioner, dan penarikan sampel dengan metode sensus yakni seluruh populasi penelitian ini dijadikan sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, surat permintaan pembayaran langsung, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja.
12. Syahputra (2016), dari hasil penelitian di Sumatera Utara untuk 33 kabupaten/kota. Metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi data

sekunder yaitu laporan keuangan tahun anggaran 2011-2014. Metode pengambilan sampel teknik sampling jenuh, pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dan variabel moderating menggunakan uji residual menunjukkan bahwa secara simultan waktu penetapan anggaran, sisa anggaran tahun sebelumnya dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Secara parsial, waktu penetapan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran sedangkan sisa anggaran tahun sebelumnya dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hasil uji moderating menunjukkan bahwa perubahan anggaran tidak dapat memoderasi hubungan antara waktu penetapan anggaran, sisa anggaran tahun sebelumnya dan pendapatan asli daerah terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara

13. Nuri (2017) melakukan penelitian asosiatif yang bersifat kausal. Penentuan sampel dengan metode sensus, sample jenuh, dengan data primer dari data kuesioner yakni dari 122 responden yang terdiri dari PPK dan bendahara pengeluaran SKPD Pemerintah Kota Medan. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dan uji residual. Hasil penelitian membuktikan bahwa perencanaan, sumber daya manusia, dokumen pengadaan, ganti uang persediaan dan perubahan anggaran secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja. Secara parsial variabel perencanaan, sumber daya manusia, dokumen pengadaan dan perubahan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran sedangkan ganti uang persediaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Komitmen organisasi bukan merupakan variabel moderating

yang dapat memperkuat hubungan antara perencanaan, sumber daya manusia, dokumen pengadaan, ganti uang persediaan dan perubahan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja SKPD Pemerintah Kota Medan.

Tabel 2.3
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel/Faktor	Hasil Penelitian
1.	Herryanto (2012)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Jakarta	Variabel Independen: 1. Faktor Perencanaan 2. Administrasi 3. SDM 4. Dokumen Pengadaan 5. Ganti Uang Persediaan Variabel Dependen: Keterlambatan Penyerapan Anggaran	Faktor Perencanaan mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran sebesar 42,91%, Faktor Administrasi 8,84%, Faktor SDM 7,80%, Faktor Dokumen Pengadaan 6,47% dan Faktor Ganti Uang Persediaan memberikan pengaruh 5,41%
2.	Priatno & Khusaini (2013)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar	Variabel Independen : 1. Administrasi 2. SDM 3. Perencanaan 4. Pengadaan barang/jasa Variabel Dependen : Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian menjelaskan bahwa Faktor Administrasi dan SDM memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran sedangkan perencanaan dan pengadaan barang/jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.
3.	Nugroho (2013)	Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN Di Akhir Tahun (Studi Kasus Di	Variabel Independen: 1. Perencanaan	Faktor Perencanaan mempengaruhi penumpukan sebesar 29,939%, Faktor

		KPPN Malang)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan 3. SDM 4. Teknis 5. Kendala Koordinasi 6. Pengadaan Barang/Jasa <p>Variabel dependen: penumpukan penyerapan anggaran.</p>	Peraturan 10,705%, Faktor SDM 10,705%, Faktor Teknis 7,289%, Faktor Kendala Koordinasi 6,489% dan Faktor Pengadaan Barang/Jasa 5,430%
4.	Wijanarko (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi 2. Sumber Dana 3. Jenis Satker 4. Blokir 5. Lokasi <p>Variabel dependen: Penyerapan Anggaran</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel revisi, sumber dana dan jenis satker secara signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran, sedangkan blokir dan lokasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013.
5.	Putri dan Fachruzzaman (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu	<p>Variabel Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi SDM 2. Dokumen Pengadaan 3. Uang Persediaan 4. Dokumen Perencanaan 5. Pencatatan Administrasi 	kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran, dokumen pengadaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran dan uang persediaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dokumen perencanaan tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran dan pencatatan administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran

6.	Pratama (2015)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat	Variabel Independen: 1. Perencanaan 2. Administrasi 3. SDM 4. Ganti Uang Persediaan 5. Dokumen Pengadaan Variabel dependen: Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perencanaan, administrasi, SDM dan anti uang persediaan secara signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran, sedangkan dokumen pengadaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran TNI AD Tahun 2013.
7.	Arthana (2015)	Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Pegawai Pada Kinerja Penyerapan Anggaran (Studi Pada Satuan Kerja Di Lingkup Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar)	Variabel independen: 1. Kompetensi Pegawai Variabel Moderating : 1. Kejelasan Sasaran 2. Komitmen Organisasi Variabel dependen : Kinerja Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap kinerja penyerapan anggaran sedangkan kejelasan sasaran dan komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh hubungan kompetensi pegawai terhadap penyerapan anggaran di lingkup pembayaran kantor pelayanan perbendaharaan negara Denpasar.
8.	Sutrisno (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013	Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif	Penyebab rendahnya penyerapan akibat terlambatnya juknis dan revisi juknis ditahun berjalan, Faktor Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Metode Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola dan SDM tidak menjadi penyebab rendahnya penyerapan.
9.	Rifai, et al (2016)	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan daya serap anggaran (studi empiris pada SKPD NTB)	Variabel Independen: 1. Perencanaan 2. Regulasi 3. Koordinasi 4. Pelaksanaan 5. Desentralisasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, regulasi, koordinasi, pelaksanaan, desentralisasi dan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterlambatan daya serap anggaran

			6. Sumber Daya Manusia Variabel dependen: keterlambatan daya serap anggaran	
10.	Setyawan (2016)	Analisa Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro Tahun Anggaran 2015	Variabel Independen: 1. Perencanaan 2. Pengadaan Barang/Jasa 3. SDM Variabel dependen: keterlambatan daya serap anggaran	Hasil penelitian dengan metode kualitatif menunjukkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi penumpukan belanja adalah faktor perencanaan, kemudian pengadaan barang/jasa dan SDM
11.	Simanjuntak (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD di Pemerintah Kota Medan	Variabel Independen: 1. SDM 2. Pengadaan Barang/Jasa 3. SPP Ls 4. Sistem Pengendalian Intern Variabel dependen: keterlambatan penyerapan anggaran	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial dan simultan faktor SDM, pengadaan barang/jasa, surat permintaan pembayaran langsung (SPP Ls) dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada SKPD Kota Medan
12.	Syahputra (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran dengan Perubahan Anggaran sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Variabel Independen: 1. Penetapan Anggaran 2. Silpa 3. PAD Variabel dependen: keterlambatan penyerapan anggaran Variabel Moderating: Perubahan Anggaran	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial dan simultan penetapan anggaran, SiLPA dan PAD berpengaruh signifikan, sedangkan perubahan anggaran tidak dapat memoderasi penyerapan anggaran di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
13.	Nuri (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan	Variabel Independen: 1. Perencanaan 2. SDM	Secara parsial faktor perencanaan, SDM, dokumen pengadaan, ganti uang persediaan, perubahan anggaran berpengaruh signifikan

		dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating	3. Dokumen Pengadaan 4. Ganti Uang Persediaan 5. Perubahan Anggaran Variabel dependen: Penyerapan Anggaran Variabel Moderating: Komitmen Organisasi	terhadap penyerapan anggaran dan komitmen organisasi bukan faktor yang dapat memoderasinya
--	--	--	---	--

B.2. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan kelanjutan dan pengembangan dari penelitian Herriyanto (2012) dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahun Pengamatan

Tahun pengamatan yang dilakukan pada penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2011 sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2017.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian terdahulu lokasi penelitian adalah pada satuan kerja kementerian/lembaga pada wilayah DKI Jakarta, sedangkan pada penelitian ini, lokasi penelitian adalah pemerintah daerah di Provinsi Aceh penerima manfaat Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017, yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) pemerintah daerah, yang terdiri tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian terdahulu yaitu seluruh belanja kementerian/lembaga di wilayah Jakarta Tahun Anggaran 2011, sedangkan penelitian ini pada penyerapan belanja transfer DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 pada pemerintah daerah se Provinsi Aceh yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Pemerintah Daerah penerima DAK Fisik.

4. Variabel independen

Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan variabel perencanaan, administrasi, sumber daya manusia, dokumen pengadaan dan ganti uang persediaan. Pada penelitian ini variabel independen adalah perencanaan, sumber daya manusia, administrasi, dan pengadaan barang/jasa. Peneliti mengurangi variabel dokumen pengadaan dan ganti uang persediaan, dikarenakan didalam DAK Fisik tidak ada *revolving* dalam pencairan dana, dana disalurkan dalam bentuk langsung dan dokumen pengadaan akan dimasukkan dalam variabel administrasi.

5. Variabel Moderating Penelitian

Pada penelitian ini dimunculkan perubahan kantor bayar sebagai variabel moderating, karena perubahan kantor bayar diduga memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran DAK Fisik, jika selama ini penyaluran DAK Fisik hanya melalui satu pintu yaitu KPPN Jakarta II, diharapkan tujuan dari pendaerahan pembayara DAK Fisik lebih mempercepat penyerapan anggaran dan kendala dilapangan dapat diketahui lebih dini. Perbedaan kedua penelitian ini dapat digambarkan secara detail pada tabel 1.2. berikut:

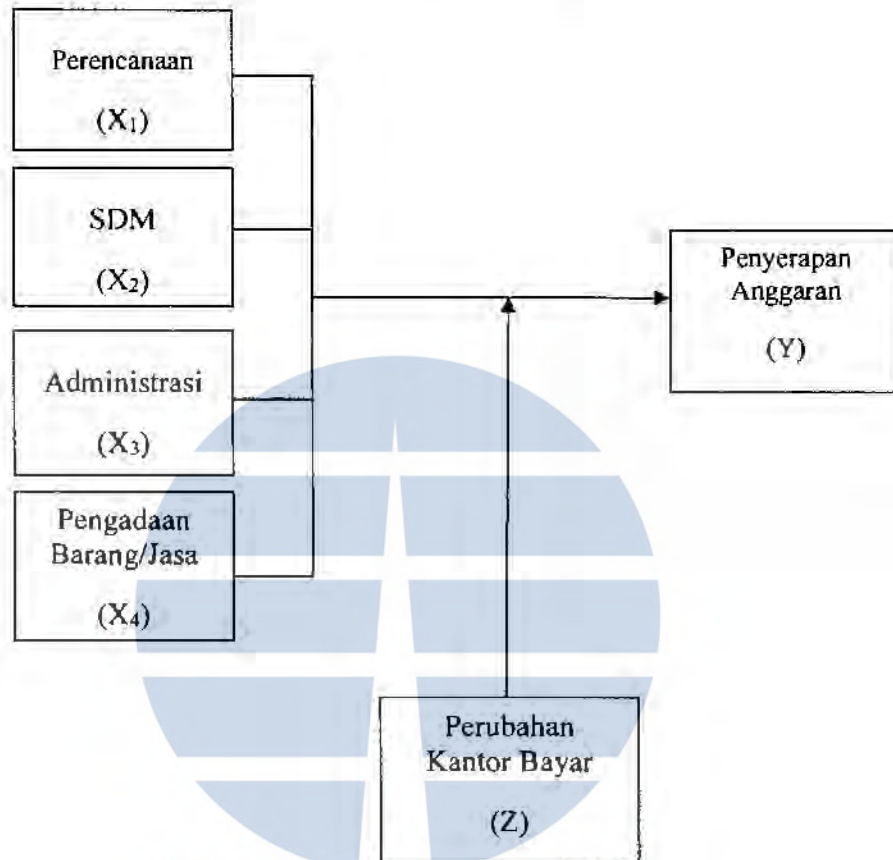
Tabel 2.4
Keaslian Penelitian

Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
Tahun Pengamatan	2011	2017
Lokasi Penelitian	Satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah Provinsi Jakarta	Pemerintah Daerah Seluruh Provinsi Aceh
Objek Penelitian	Seluruh Belanja Kementerian/Lembaga	Dana DAK Fisik
Variabel Independen	1. Perencanaan 2. Administrasi 3. SDM 4. Dokumen Pengadaan 5. Ganti Uang Persediaan	1. Perencanaan (X1) 2. SDM (X2) 3. Administrasi (X3) 4. Pengadaan Barang/Jasa (X4)
Variabel Dependen	Penyerapan Anggaran	Penyerapan Anggaran
Variabel Moderating	Tidak Ada	Perubahan Kantor Bayar

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan landasan teori, maka kerangka konseptual dalam penelitian dapat digambarkan sebagaimana ilustrasi pada Gambar 3.1 dibawah ini.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dalam hal ini yang dimaksudkan adalah penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017 pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh ada 4 (empat) faktor yaitu faktor perencanaan, sumber daya manusia, administrasi, pengadaan barang dan jasa.

Dalam kerangka teori keagenan menjelaskan bahwa pemberi amanah memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pemegang amanah untuk

mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya termasuk dalam hal ini pemegang amanah harus melaporkan kepada pemberi amanah mengenai perencanaan atas kegiatan yang telah mereka laksanakan serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait, seperti perencanaan, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa dan administrasi dengan tingkat penyerapan anggaran yang dicapai apakah telah sesuai dengan program atau kegiatan yang direncanakan sebelumnya.

C.1. Pengaruh perencanaan terhadap penyerapan anggaran

Pada tahap pertama dalam siklus anggaran, yaitu *planning and preparation* (Mardiasmo, 2002: 111). Perencanaan merupakan siklus awal terpenting dalam penyusunan anggaran. Perencanaan yang didukung oleh lingkungan kerja yang sehat, pekerjaan yang mengacu pada rumusan perencanaan yang baik, kelak membuahkan hasil yang optimal (Tuasikal, 2013; 78). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, dari pernyataan ini dapat difahami bahwa perencanaan adalah bagian terpenting dalam mengawal pengelolaan keuangan

daerah termasuk dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya bahasan kita tentang dana DAK Fisik.

Nuri (2016: 20) menyebutkan kaitan antara teori keagenan dan perencanaan dalam kaitannya dengan penyerapan anggaran bahwa;

“Kerangka teori keagenan menjelaskan bahwa seorang *principal* (pemberi amanah) memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya termasuk dalam hal ini *agent* harus melaporkan kepada *principal* mengenai perencanaan atas program dan kegiatan yang telah mereka buat serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan tingkat penyerapan anggaran yang dicapai apakah telah sesuai dengan program atau kegiatan yang direncanakan.”

Herryanto (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor perencanaan merupakan faktor yang memberikan berpengaruh terbesar dalam penyerapan anggaran.

C.2. Pengaruh SDM terhadap penyerapan anggaran

Hasil penelitian Tuasikal (2013; 78) menyatakan bahwa proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah di kabupaten Maluku Tengah masih lemah, hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pengetahuan dan pemahaman aparatur perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dalam memaknai indikator perencanaan dan penganggaran, serta ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan teknis yang ditempati. Hal ini berkaitan dengan kualitas SDM pengelola keuangan daerah sebagaimana uraian diatas, hal senada juga merupakan hasil temuan penelitian Setyawan (2016), Nuri (2017). Pada penelitian Herryanto (2012) pada satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah Jakarta menyimpulkan bahwa faktor sumber daya memberikan kontribusi signifikan yang mempengaruhi penyerapan anggaran sebesar 7,80%. Kesimpulan

ini didukung oleh pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2014) pada satuan kerja di KPPN Malang, faktor SDM mempengaruhi penyerapan anggaran dengan nilai signifikansi sebesar 10,705%.

C.3. Pengaruh administrasi terhadap penyerapan anggaran

Faktor administrasi adalah bagian dari faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini sesuai dengan penelitian Herryanto (2012) dan Pratama (2015) yang menyatakan hal tersebut, sedangkan pada penelitian Priatno & Khusaini (2013) menyatakan faktor administrasi memberikan faktor yang tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran, maka faktor administrasi Peneliti masukkan kedalam variabel bebas dalam hipotesa penelitian ini sebagai faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran DAK Fisik Tahun Anggaran 2017.

C.4. Pengaruh pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran

Hasil penelitian Herryanto (2012) dan Nuri (2017) dengan variabel dokumen pengadaan, Priatno dan Khusaini (2013), Setyawan (2016) dengan variabel pengadaan barang/jasa menyatakan hal sama bahwa faktor dokumen pengadaan dan faktor pengadaan barang/jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Faktor Pengadaan Barang/Jasa adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, hal ini dibuktikan juga oleh Nugroho (2013) yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menunjukkan tingkat signifikansi 5,430% terhadap penyerapan anggaran. Hal senada juga didasarkan pada hasil penelitian Simanjuntak (2016) menyebutkan bahwa secara parsial dan simultan faktor pengadaan barang/jasa berpengaruh positif signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada SKPD Kota Medan.

C.5. Pengaruh perubahan kantor bayar terhadap penyerapan anggaran

Faktor perubahan kantor bayar adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, hal ini dibuktikan dengan perubahan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan, dengan melakukan perubahan terhadap kantor bayar yang selama ini terpusat di KPPN Jakarta II di Jakarta, yang kemudian tugas ini dilimpahkan ke KPPN daerah, dalam hal ini di Provinsi Aceh, terdapat 1 (tujuh) KPPN yang berada di Provinsi Aceh yang bertugas menyalurkan Dana Alokasi Khusus Fisik tersebut, yaitu: (1) KPPN Banda Aceh (2) KPPN Lhokseumawe (3) KPPN Meulaboh (4) KPPN Langsa (5) KPPN Takengon (6) KPPN Kutacane dan (7) KPPN Tapaktuan. Adapun tujuan perubahan ini adalah menurut Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah:

- a. Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah melalui 171 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia;
- b. Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan;
- c. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

D. Hipotesa Penelitian

Faktor Perencanaan adalah langkah awal dalam pelaksanaan segala kegiatan, terlebih dalam penyerapan anggaran termasuk yang berkaitan dengan DAK Fisik TA. 2017. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herryanto (2012) yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran pada satuan kerja kementerian

dan lembaga di Provinsi Jakarta dengan nilai signifikansi 42,19%. Demikian juga yang ditemukan dalam penelitian Nurgoho (2013) dalam studi kasus di KPPN Malang.

Faktor Sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan negara merupakan faktor utama dan pelaksana dari kegiatan pengelolaan keuangan negara, dalam hal ini penyerapan DAK Fisik TA. 2017. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama (2015), Simanjuntak (2016), Pratama (2015) dan Nuri (2017) menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Faktor administrasi adalah bagian dari faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini sesuai dengan penelitian Herryanto (2012) dan Priatno & Khusaini (2013) yang menyatakan bahwa faktor administrasi memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Faktor Pengadaan Barang/Jasa adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Nugroho (2013), hasil penelitian menunjukkan tingkat signifikansi 5,430% dari faktor pengadaan barang/jasa. Hal senada juga didasarkan pada hasil penelitian Simanjuntak (2016) menyebutkan bahwa secara parsial dan simultan faktor pengadaan barang/jasa berpengaruh positif signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada SKPD Kota Medan.

Faktor perubahan kantor bayar adalah salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, hal ini dibuktikan dengan perubahan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan, dengan melakukan perubahan terhadap kantor bayar mulai Tahun Anggaran 2017.

Hipotesis merupakan penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang dirumuskan peneliti untuk diuji secara empiris (Erlina, 2011: 30). Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, hipotesis penelitian ini adalah:

1. Faktor Perencanaan, sumber daya manusia, administrasi, pengadaan barang dan jasa secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh;
2. Faktor perubahan kantor bayar dapat memoderasi hubungan perencanaan, sumber daya manusia, administrasi, pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh.

E. Operasionalisasi Variabel

Definisi operasionalisasi dari masing-masing variabel merupakan definisi yang dijadikan dasar untuk menentukan besaran nilai dari masing-masing variabel baik variabel dependen yaitu penyerapan anggaran (Y) dan variabel independen yaitu Perencanaan (X_1), Sumber Daya Manusia (X_2), Administrasi (X_3), Pengadaan Barang/Jasa (X_4), serta variabel moderating yaitu Perubahan Kantor Bayar (Z).

Definisi operasional dalam variabel penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

E.1. Variabel Dependen

E.1.a. Penyerapan Anggaran

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penyerapan Anggaran (Y). Faktor penyerapan anggaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kinerja

penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017 pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh dalam merealisasikan pencairan dana DAK Fisik TA. 2017. Dalam penelitian ini indikator untuk mengukur penyerapan anggaran adalah (1) persentase jumlah realisasi anggaran DAK Fisik TA. 2017, yaitu realisasi anggaran dibagi pagu anggaran dan (2) waktu penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval, dengan metode pembobotan menggunakan skala *likert*. Pernyataan sikap responden terhadap sebuah pernyataan diberikan skor pengukuran: 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

E.2. Variabel Independen

E.2.a Perencanaan

Dalam penelitian ini, Perencanaan didefinisikan sesuai definisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Indikator pengukuran perencanaan menggunakan indikator penelitian Nuri (2017) dengan melakukan penyesuaian terhadap objek penelitian yaitu: (1) kesesuaian antara rencana dengan kebutuhan (2) penyusunan pagu anggaran, dan (3) evaluasi anggaran kegiatan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval, dengan metode pembobotan menggunakan skala sikap *likert*. Pernyataan sikap responden terhadap sebuah pernyataan diberikan skor pengukuran; 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

E.2.b Sumber Daya Manusia

Faktor Sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini kompetensi pejabat pengelola kegiatan DAK Fisik 2017. Indikator pengukuran sumber daya manusia menggunakan indikator penelitian Nuri (2017) yang terdiri dari: (1) kompetensi (2) rangkap tugas/jabatan (3) motivasi dan (4) mutasi pejabat pengelola kegiatan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval, dengan metode pembobotan menggunakan skala sikap *likert*. Pernyataan sikap responden terhadap sebuah pernyataan diberikan skor pengukuran; 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

E.2.c Administrasi

Faktor Administrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai mana penelitian Herriyanto (2012) yang telah melakukan analisis faktor administrasi dengan mengajukan 6 pertanyaan pembentuk faktor administrasi, dan Peneliti dalam hal ini melakukan modifikasi atas pertanyaan penelitian Herriyanto (2012) dengan menyesuaikannya pada objek penelitian ini, sehingga indikator yang digunakan adalah (1) surat keputusan, (2) aturan, dan (3) dokumen anggaran. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval, dengan metode pembobotan menggunakan skala sikap *likert*. Pernyataan sikap responden terhadap sebuah pernyataan diberikan skor pengukuran; 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

E.2.d Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/jasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk memperoleh kegiatan untuk memperoleh infrastruktur fisik, prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan pengadaan DAK Fisik 2017 yang prosesnya dimulai dari perencanaan kegiatan sampai selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh infrastruktur fisik, sebagaimana tujuan pemberian DAK Fisik 2017 sebagaimana definisi Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Indikator variabel ini terdiri dari (1) rencana pengadaan, (2) dokumen pengadaan dan (3) pelaksanaan pengadaan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval, dengan metode pembobotan menggunakan skala sikap *likert*. Pernyataan sikap responden terhadap sebuah pernyataan diberikan skor pengukuran; 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

E.3. Variabel Moderating

E.3.a Perubahan Kantor Bayar

Perubahan Kantor Bayar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan KPPN pembayar DAK Fisik, dimana pada awal tahun anggaran 2017 telah terjadi pendaerahan kantor bayar, semua terpusat di Ibu Kota Negara Jakarta menjadi di 171 KPPN daerah di Indonesia, indikator yang digunakan adalah (1) Mendekatkan pelayanan, (2) efisiensi koordinasi dan konsultasi, (3) efektivitas monitoring dan evaluasi.

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval, dengan metode pembobotan menggunakan skala sikap *likert*. Pernyataan sikap responden terhadap sebuah pernyataan diberikan skor pengukuran; 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

Tabel 2.5
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Penyerapan Anggaran Belanja (Y)	Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyerap DAK Fisik TA. 2017	1. Persentase Penyerapan DAK Fisik TA. 2017 2. Waktu Penyerapan Anggaran	Interval
Perencanaan (X ₁)	Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.	1. Kesesuaian antara perencanaan dengan kebutuhan 2. Penyusunan pagu anggaran 3. Evaluasi anggaran dan kegiatan	Interval
SDM (X ₂)	Kompetensi Pengelola DAK Fisik TA. 2017	1. Kompetensi 2. Rangkap Tugas/Jabatan 3. Motivasi 4. Mutasi Pejabat/Pengelola Kegiatan	Interval
Administrasi (X ₃)	Segala Jenis kegiatan atau dokumen pendukung pelaksanaan DAK Fisik TA. 2017	1. Surat Keputusan 2. Aturan 3. Dokumen Anggaran	Interval

Pengadaan Barang/Jasa (X ₄)	Kegiatan untuk memperoleh infrastruktur fisik, prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan.	1. Rencana Pengadaan 2. Dokumen Pengadaan 3. Pelaksanaan Pengadaan	Interval
Perubahan Kantor Bayar (Z)	Perubahan Kantor Pembayar DAK Fisik	1. Mendekatkan Pelayanan 2. Efisiensi Koordinasi dan Konsultasi 3. Efektivitas Monitoring dan evaluasi	Interval

Sumber: Hasil olahan Peneliti, 2018



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian dari peneliti sebelumnya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian korelatif, yaitu penelitian yang melihat hubungan antara satu atau beberapa ubahan dengan satu atau beberapa ubahan lain (Yusuf, 2014: 65). Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menekankan pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan analisis statistik (Erlina, 2011: 12). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran DAK Fisik pada pemerintah daerah penerima manfaat DAK Fisik pada Provinsi Aceh dengan variabel perubahan kantor bayar sebagai variabel pemoderasi. Pendekatan kuantitatif pada penelitian, hal itu disebabkan karena data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif atau jenis data lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah menggunakan metode statistik terapan. Untuk selanjutnya data hasil penelitian tersebut diuji sesuai tidaknya dengan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, sebagaimana pula sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

B. Populasi dan Sampel

B. 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek serta objek dengan kualitas dan kareteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan dan populasi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau objek (Hamdi & Ismaryati, 2014; 4.13). Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai pemerintah daerah di 23 (dua puluh tiga) kabupaten dan kota serta 1 (satu) pemerintah daerah provinsi di Provinsi Aceh yang bertugas dalam penyerapan anggaran tersebut antara lain Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing SKPD, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM), bendahara, pejabat pengadaan dan petugas monitoring dan evaluasi.

B. 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari karakteristik populasi (Hamdi & Ismaryati, 2014: 4.14). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, yakni dengan menjadikan seluruh populasi sebagai sampel, seluruh PNS pengelola DAK Fisik 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh akan dikirim *e-mail*, dan sambungan telpon untuk mengisi kuisisioner *online* melalui *google form* dan diharapkan tingkat partisipasinya. Gay & Dhiel dalam Kuncoro (2013: 126) menyatakan untuk studi korelasional dibutuhkan minimal 30 sampel untuk menguji ada tidaknya hubungan, dan Peneliti juga menggunakan *Quota Sampling* dengan mengharapkan 80 responden dari para pengelola DAK Fisik TA. 2017 di Provinsi Aceh yang mengisi kuisisioner tersebut.

C. Lokasi Dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian yaitu pada 23 (dua puluh tiga) kabupaten dan kota serta 1 (satu) pemerintah provinsi di Provinsi Aceh, waktu penelitian dilakukan pada tanggal 2 s.d. 15 Juni 2018.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti dengan tujuan menghasilkan data yang akurat, oleh karena itu setiap instrumen penelitian harus memiliki skala (Hamdi & Ismaryati, 2014: 4.20). Secara spesifik semua fenomena yang diamati disebut variabel. Variabel penelitian agar dapat diukur dan dijabarkan dalam dimensi. Kemudian dimensi dijabarkan dalam indikator-indikator, selanjutnya indikator-indikator dideskripsikan dalam rangka menyusun butir pernyataan (Hamdi & Ismayarti, 2014: 4.21)

D.1. Bentuk Instrumen

Pengumpulan data dalam untuk variabel independen yaitu yaitu Perencanaan (X_1), Sumber Daya Manusia (X_2), Administrasi (X_3) dan Pengadaan Barang/Jasa (X_4), dan Perubahan Kantor Bayar (Z) sebagai variabel moderating dengan menggunakan kuesioner (angket) model skala *likert*, data yang semula berbentuk data ordinal kemudian diubah menjadi data interval.

Berdasarkan pertanyaan instrumen yang diberikan pada responden, untuk itu kategori untuk masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut :

Skor 5 : kategori sangat setuju

Skor 4 : kategori setuju

Skor 3 : kategori netral

Skor 2 : kategori tidak setuju

Skor 1 : kategori sangat tidak setuju

Adapun skala pengukuran dalam penelitian ini adalah skala interval, hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf (2014: 253) yang menyatakan bahwa “Skala interval berarti peneliti telah melakukan pengukuran terhadap variabel yang akan diteliti

dimana skala yang diukur memiliki jarak yang bersifat konstan dan skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak”.

D.2. Penyusunan Kisi-Kisi Instrumen.

Supaya penyusunan instrumen lebih sistematis serta mudah untuk dikontrol, dikoreksi dan mudah ditelusuri maka dibuat matriks untuk variabel, dimensi dan indikator. Variabel penelitian agar dapat diukur maka dijabarkan dalam dimensi, kemudian dimensi dijabarkan dalam indikator-indikator, selanjutnya indikator-indikator dideskripsikan dalam rangka menyusun butir pernyataan.

Tabel 3.1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Butir Pertanyaan
Penyerapan Anggaran Belanja (Y)	Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyerap DAK Fisik TA. 2017	1. Persentase Penyerapan DAK Fisik TA. 2017	1 s.d. 2
		2. Waktu Penyerapan Anggaran	3 s.d. 4
Perencanaan (X ₁)	Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia,	1. Kesesuaian antara perencanaan dengan kebutuhan	5 s.d. 6
		2. Penyusunan pagu anggaran	7 s.d. 9
		3. Evaluasi anggaran dan kegiatan	10 s.d. 11
SDM (X ₂)	Kompetensi Pengelola DAK Fisik TA. 2017	1. Kompetensi	12 s.d. 14
		2. Rangkap Jabatan	15
		3. Motivasi	16 s.d. 18
		4. Mutasi Pejabat/ Pengelola Kegiatan	19

Administrasi (X ₃)	Segala Jenis kegiatan atau dokumen pendukung pelaksanaan DAK Fisik TA. 2017	1. Surat Keputusan 2. Aturan 3. Dokumen Anggaran	20 s.d. 22 23 s.d. 24 25 s.d. 27
Pengadaan Barang/Jasa (X ₄)	Kegiatan untuk memperoleh infrastruktur fisik, prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan.	1. Persiapan Pengadaan 2. Dokumen Pengadaan 3. Pelaksanaan Pengadaan	28 s.d. 30 31 s.d. 33 34 s.d. 37
Perubahan Kantor Bayar (Z)	Perubahan Kantor Pembayar DAK Fisik	1. Mendekatkan Pelayanan 2. Efisiensi Koordinasi dan Konsultasi 3. Efektivitas Monitoring dan evaluasi	38 s.d. 39 40 s.d. 41 42

Sumber: Hasil olahan Peneliti, 2018

E. Metode dan Prosedur Pengumpulan Data

E1. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data primer pada penelitian ini dengan menggunakan instrumen kuesioner yang diisi oleh (1) Kuasa Pengguna Anggaran, (2) Pejabat Pembuat Komitmen, (3) Pejabat Penandatanganan SPM (4) Bendahara Pengeluaran (5) Pejabat Pengadaan dan (6) Tim Monitoring dan Evaluasi. Kuesioner penyerapan anggaran belanja, perencanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa diadaptasi dari kuesioner hasil penelitian Herriyanto (2012), Nuri (2017), Pratama (2015), Kaban (2016), Anfujatin (2016) dan Kuswoyo (2011) dengan melakukan penyesuaian terhadap objek yang diteliti.

E2. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan rencana penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Penyebaran angket/kuesioner secara *online*, menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden (para pegawai pemerintah daerah) yang bertugas dalam penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017 secara langsung. Hal ini dilakukan karena jarak antara peneliti dengan responden berjauhan, dalam penelitian ini menggunakan *google form* yang dapat diakses pada <https://goo.gl/forms/two4wx8ebnlsbXAn1>. Pemilihan alat bantu ini karena diharapkan akan memudahkan penelitian, selain itu mudah digunakan (*user friendly*) dan gratis (*free*). Gambaran *google form* dan isi kuisisioner penelitian dimaksud terlampir.
2. Peneliti juga mencoba menggunakan kuisisioner manual, dalam hal Peneliti mampu berjumpa langsung dengan responden, sembari menggali persepsi responden tentang penyaluran DAK Fisik TA. 2017 TA. 2017.
3. Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan studi kepustakaan yaitu dengan membaca beberapa acuan pustaka mengenai peraturan penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017, perencanaan, pengadaan barang/jasa terkait pelaksanaan DAK Fisik TA. 2017, sumber daya manusia, serta dokumen-dokumen yang terkait serta relevan dengan permasalahan penelitian yang diangkat.
4. Wawancara mendalam dengan pihak terkait terutama PNS ahli.
5. Pencarian dokumen terkait.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan alat analisis sebagai berikut:

F.1. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS *for windows versi 20.00* dengan dibantu pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara karena Peneliti tidak memiliki *software* asli. Diharapkan diperoleh hasil pengukuran yang lebih akurat terhadap respon yang diberikan para responden, sehingga hasil tabulasi data yang berbentuk angka dari hasil survey tersebut dapat dianalisa menggunakan metode statistik.

Paradigma kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Erlina, 2011: 12).

Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas (*independent variable*). Variabel bebas dinamakan pula dengan variabel yang diduga sebagai sebab (*presumed course variabel*) dari variabel dependen (Erlina, 2012: 37). Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari Perencanaan (X_1), Sumber Daya Manusia (X_2), Administrasi (X_3) dan Pengadaan Barang/Jasa (X_4). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji Perencanaan (X_1), Sumber Daya Manusia (X_2), Administrasi (X_3) dan Pengadaan Barang/Jasa (X_4) terhadap variabel terikat (*dependent variabel*). Yusuf (2014: 109) menyatakan bahwa "Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain tetapi tidak dapat mempengaruhi variabel yang lain". Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017 (Y).

Untuk mengukur skala sikap, pendapat, karakter atau status sosial, biasanya digunakan skala interval. Adapun skala interval yang digunakan adalah skala *likert*. Ketiga variabel tersebut diukur dengan skala *likert*, yang menyatakan persepsi responden atas pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. Ketiga variabel tersebut diukur dalam skala interval yaitu skala dimana jarak antara data dengan data lain sama, tidak mempunyai nilai nol mutlak.

Prinsip pokok skala *likert* adalah untuk mengukur sikap pendapat atau persepsi responden terhadap pertanyaan atau pernyataan dan jawabannya memiliki gradasi yang sangat positif atau sebaliknya (Hamdi & Ismaryati, 2014; 4.20).

F.2. Uji Kualitas Data

Sebelum dilaksanakan pengujian hipotesis dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur item-item pernyataan yang berkaitan dengan data, pendapat dan sikap pada variabel bebas Perencanaan (X_1), Sumber Daya Manusia (X_2), Administrasi (X_3) dan Pengadaan Barang/Jasa (X_4) dan variabel terikat Penyerapan Anggaran DAK Fisik TA. 2017 (Y) dengan uji validitas dan reliabilitas.

F.2.a. Uji Validitas

Yusuf (2014: 234) menyatakan bahwa "Validitas suatu instrument yaitu seberapa jauh instrument tersebut benar-benar mengukur apa (objek) yang hendak diukur". Suatu instrumen dinyatakan valid didalam penelitian apabila instrumen tersebut mampu mengukur objek variabel yang diajukan dalam hipotesis. Analisa pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan mempersiapkan tabulasi dari jawaban responden yang berasal dari kuesioner.

Validitas keseluruhan soal berkualitas erat dengan validitas butir soal, apabila ada butir soal kurang sempurna dapat kembali disempurnakan, diganti sehingga

memiliki validitas yang baik, dalam hal ini rumus yang digunakan adalah *product moment correlation*. Dalam uji ini, skor tiap butir soal untuk tiap responden dikorelasikan dengan skor tiap total responden yang bersangkutan, dan hasilnya (r hitung) dibandingkan dengan dengan nilai r pada tabel *product moment correlation* (r tabel). Apabila r hitung lebih besar dari r tabel, maka pernyataan kuisioner dinyatakan valid. Peneliti menggunakan bantuan program IBM *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) for windows versi 20.00.

F.2.b Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Ghazali (2016: 47) menyatakan bahwa “Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu”. Sebagai tafsiran umum jika nilai reliabilitas $> 0,6$ maka dapat dikatakan bahwa instrument yang kita gunakan sudah reliabel (Kuncoro, 2013: 183)

F.3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik sering digunakan untuk melihat suatu penelitian dimana munculnya masalah dalam analisis regresi dengan mencocokkan model prediksi ke dalam sebuah model yang telah dimasukan kedalam serangkaian data. Pengujian asumsi klasik termasuk didalamnya yaitu pengujian normalitas, multikolinieraitas dan heterokedastisitas.

F.3.a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Erlina, 2011: 100).

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati data normal. Uji normalitas dilakukan dengan analisis grafik dengan melihat grafik histogram. Jika grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, artinya titik puncak kurva berada di titik nol (0) pada sumbu X maka model regresi memenuhi syarat normalitas, begitu juga sebaliknya. Selain itu, pengujian normalitas juga dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik, yaitu menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* dimana jika signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku sehingga distribusi datanya normal (Ghozali, 2016: 157), uraian nilai signifikansi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Nilai Signifikan atau probabilitas $< 0,05$, maka distribusi data adalah tidak normal.
- b. Nilai Signifikan atau probabilitas $> 0,05$, maka distribusi data adalah normal.

F.3.b. Uji Multikolinearitas

Erlina (2011: 102) menyatakan bahwa uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, karena akan menghasilkan variabel yang tidak ortogonal (Ghozali, 2016: 103), itulah syarat yang harus dipenuhi dalam model regresi, yaitu adalah tidak adanya multikolinearitas. Erlina, (2011: 102) menyatakan konsekuensi bila terjadi multikolinearitas adalah:

- a. Koefisien regresi tidak dapat ditaksir;
- b. Varian dan nilai standart *error* setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga;
- c. Nilai t akan turun;

d. Hasil estimasi akan menjadi sangat peka terhadap perubahan spesifikasi.

Pengujian ada tidaknya multikolonieritas dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak terjadinya multikolonieritas adalah (1) nilai *tolerance* harus $\geq 0,10$ dan (2) nilai VIF ≤ 10 .

F.3.c. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2016: 134) menyatakan bahwa “Fungsi uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Ada berbagai cara untuk menguji adanya heteroskedastisitas, seperti uji grafik plot, uji park, uji glejser, uji *white*, *Rank Colleration*, dan uji *lagrang multiplier* (LM). Dalam penelitian ini hanya menggunakan uji grafik plot.

Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dalam penggunaan grafik plot sebagai alat uji heteroskedastisitas digunakan dasar analisis sebagai berikut: (1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), hal ini menandakan telah terjadi heteroskedastisitas. (2) Jika terdapat pola yang tidak jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dalam hal ini dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

F.4. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda merupakan perluasan dari regresi linier sederhana dengan dua atau lebih variabel bebas yang digunakan sebagai predictor dan satu

variabel tergantung yang diprediksi (Sarwono dan Budiono, 2012: 189). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Duwi, 2011). Pengujian ini digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh secara parsial dan simultan variabel independen, yaitu: Perencanaan (X_1), Sumber Daya Manusia (X_2), Administrasi (X_3) dan Pengadaan Barang/Jasa (X_4) terhadap variabel dependen yaitu penyerapan anggaran DAK Fisik 2017 (Y). Rumus yang dipergunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Penyerapan Anggaran Belanja

X_1 = Perencanaan

X_2 = Sumber Daya Manusia

X_3 = Administrasi

X_4 = Pengadaan Barang/Jasa

α = Bilangan Konstanta (harga Y , bila $X=0$)

β = Koefisien Regresi Variabel Independen

ε = *Error* yang ditolerir (5%)

Persamaan hipotesis model statistik dari hasil uji tersebut adalah:

a. $H_0: \beta = 0$

b. $H_1: \beta \neq 0$

hasil dari hasil uji regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan secara kalimat sebagai berikut:

1. H_0 : X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 secara parsial dan simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap Y
2. H_1 : X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Y

Analisis regresi berganda ini diolah dengan menggunakan program IBM SPSS for windows versi 20.00.

F.5. Pengujian Hipotesis Penelitian

Uji Hipotesis merupakan uji perbedaan antara nilai sampel dengan populasi atau nilai data yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis) yang diajukan peneliti (Erlina, 2011: 108). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (*adjusted R²*), uji t (uji parsial), uji f (uji simultan) dan uji moderating (uji residual). Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perencanaan (X_1), Sumber Daya Manusia (X_2), Administrasi (X_3) dan Pengadaan Barang/Jasa (X_4) terhadap penyerapan DAK Fisik TA. 2017 dengan perubahan kantor bayar sebagai variabel moderasi yang diolah dengan program komputer IBM *Statistical Package For Social Science (SPSS) for windows* versi 20.00.

F.5.a Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji *Adjusted R²* atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X . Bila nilai koefisien determinasi sama

dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain, bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model sehingga, sehingga *adjusted* dianggap sebagai model regresi terbaik (Ghozali, 2016: 95).

F.5.b. Uji F (Uji Simultan)

Ghozali (2016: 171) menyatakan bahwa “Uji F (F test) adalah pengujian pengaruh simultan yang digunakan untuk mengetahui variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen”. Bentuk pengujian hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis, secara simultan Perencanaan (X_1), Sumber Daya Manusia (X_2), Administrasi (X_3) dan Pengadaan Barang/Jasa (X_4) terhadap penyerapan DAK Fisik TA. 2017.
2. Menentukan tingkat signifikansi, hipotesis ini diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%.

3. Menentukan kriteria pengujian hipotesis:

- a. Jika F signifikan $< 0,05$ artinya secara simultan Perencanaan (X_1), Sumber Daya Manusia (X_2), Administrasi (X_3) dan Pengadaan Barang/Jasa (X_4) berpengaruh terhadap penyerapan DAK Fisik TA. 2017.
- b. Jika F signifikan $> 0,05$ artinya secara Perencanaan (X_1), Sumber Daya Manusia (X_2), Administrasi (X_3) dan Pengadaan Barang/Jasa (X_4) tidak berpengaruh terhadap penyerapan DAK Fisik TA. 2017.

F.5.c. Uji t (Uji Parsial)

Uji parsial atau disebut juga Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Kuncoro (2013: 244) menyatakan bahwa "Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (variabel independen) secara individual dalam menerangkan variabel terikat (variabel dependen)". Bentuk pengujian hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis, secara parsial Perencanaan (X_1), Sumber Daya Manusia (X_2), Administrasi (X_3) dan Pengadaan Barang/Jasa (X_4) terhadap penyerapan DAK Fisik.
2. Menentukan tingkat signifikansi, hipotesis ini diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5 %.
3. Menentukan kriteria pengujian hipotesis :
 - a. Jika t signifikan $< 0,05$ artinya secara parsial Perencanaan (X_1), Sumber Daya Manusia (X_2), Administrasi (X_3) dan Pengadaan Barang/Jasa (X_4) berpengaruh terhadap penyerapan DAK Fisik TA. 2017.
 - b. Jika t signifikan $> 0,05$ artinya secara parsial Perencanaan (X_1), Sumber

Daya Manusia (X_2), Administrasi (X_3) dan Pengadaan Barang/Jasa (X_4) tidak berpengaruh terhadap penyerapan DAK Fisik TA. 2017.

F.6. Uji Moderating (Uji Residual)

Pengujian variabel moderating dengan uji residual digunakan untuk mengatasi kecenderungan terjadinya multikolinieritas yang tinggi antar variabel independen (Ghozali, 2017: 237). Hal tersebut bisa terjadi jika kita menggunakan uji interaksi maupun uji nilai selisih pada pengujian variabel moderating. Uji residual menguji pengaruh penyimpangan dari suatu model regresi dengan melihat *Lack of Fit* (ketidakcocokan) yang ditunjukkan oleh nilai residual. Uji residual ini adalah untuk mencari jawaban atas hipotesis kedua yang diajukan pada Bab I.

Terdapat 2 (dua) kriteria uji residual dapat variabel yang kita uji tersebut sebagai variabel moderating yaitu (1) *P-Value* (Sig) < 0,05 dan (2) nilai koefisien parameternya harus negatif. Tetapi apabila *P-Value* (Sig) > 0,05 dan nilai koefisien parameternya positif maka variabel tersebut dinyatakan bukanlah variabel moderating.

Persamaan regresi untuk uji residual adalah sebagai berikut:

$$Z = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$|\varepsilon| = \alpha + \beta Y$$

Dimana:

- Y : Penyerapan Anggaran
- Z : Perubahan Kantor Bayar
- X₁ : Perencanaan
- X₂ : Sumber Daya Manusia (SDM)
- X₃ : Administrasi
- X₄ : Pengadaan Barang/Jasa
- ε : Nilai Residual
- α : Konstanta
- β : Koefisien

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Objek Penelitian

Responden pada penelitian ini adalah para pengelola Dana Alokasi Fisik TA. 2017 pada 24 (dua puluh empat) Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh. Kuesioner disebarakan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui cetakan dan *online*, penyebaran dilakukan setelah mendapat surat pengantar dari UPBJJ UT Medan. Pada penyebaran kuisisioner *online* maupun cetakan disebarakan melalui melalui surat pada seluruh pengelola DAK Fisik TA. 2017. Penyebaran tersebut dilakukan Peneliti dan dengan bantuan dari staf 7 (tujuh) KPPN yang ada di Provinsi Aceh dengan sebelumnya meminta izin kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dan mendapat tanggapan positif dengan surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Nomor S-902/WPB.01/2018 tanggal 24 April 2018 hal Permohonan Bantuan Penelitian Pegawai a.n. Ferhad Akbar, dan surat berisi *link* kuisisioner *online* dan terlampir kuisisioner versi cetakan, kemudian diteruskan oleh kepala KPPN setempat kepada para Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di masing-masing wilayah pembayarannya kemudian Kepala Badan Pengelola Keuangan dimasing-masing pemerintah daerah mengirimkannya kepada Kepala Dinas Pengelola DAK Fisik TA. 2017.

Sebelum melakukan penyebaran kuisisioner kepada responden sesungguhnya pada ASN pengelola DAK Fisik TA. 2017, peneliti telah terlebih dahulu melakukan *piloting test* kuisisioner terhadap rekan sejawat yang memiliki karekteristik hampir mendekati kesamaan dengan pengelola DAK Fisik, hal ini perlu dilakukan untuk

mendapatkan masukan dan pandangan terhadap kuisioner yang akan disebar, hasil piloting test dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peserta piloting test responden sebanyak 30 orang;
2. Dilakukan sebelum menyebarkan kuisioner sesungguhnya;
3. Dari hasil piloting test tersebut Peneliti mengurangi butir pernyataan kuisioner yang sebelumnya berjumlah 67 (enam puluh tujuh) butir pernyataan menjadi 42 (empat puluh dua) butir pernyataan dan satu pertanyaan terbuka;

Berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan diperoleh karakteristik responden yang terdiri dari: (1) Jenis Kelamin, (2) Usia, (3) Pendidikan, (4) Latar belakang pendidikan (5) Masa Kerja PNS (6) Jabatan Pada Pelaksanaan DAK Fisik TA. 2017 (7) Pengalaman pada Kegiatan DAK Fisik (8) Intensitas Kursus/Diklat/Bimtek di Bidang Akuntansi atau Pengelolaan Keuangan Daerah ataupun Penyusunan Laporan Keuangan yang pernah diikuti Responden, dan (9) KPPN Tempat Pencairan DAK Fisik TA. 2017, hal tersebut tersaji pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Penelitian (n = 120)

No	Demografi Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	1. Laki-Laki	99	82,50
	2. Perempuan	21	17,50
2	Usia		
	1. ≤30 Tahun	6	5
	2. 31 – 40 Tahun	54	45
	3. 41 - 50	51	42,50
	4. > 50 tahun	9	7,50
3	Pendidikan		
	1. SMA/Sederajat	4	3,33
	2. Diploma I/II	1	0,83
	3. Diploma III	15	12,50

	4. S1/DIV	62	51,67
	5. S2/S3	38	31,67
4	Latar Belakang Bidang Pendidikan		
	1. Ekonomi/Keuangan	28	23,33
	2. Teknik/IT	29	24,17
	3. Kesehatan	26	21,67
	4. Hukum	4	3,33
	5. Pendidikan	3	2,50
	6. Sosial/Pemerintahan	13	10,83
	7. Lainnya	17	14,17
5	Masa Kerja PNS		
	1. 1 s.d. 10 Tahun	37	30,83
	2. 11 s.d. 20 Tahun	64	53,33
	3. ≥ 20 Tahun	19	15,83
6	Jabatan Pada Pelaksanaan DAK Fisik TA. 2017		
	1. KPA	12	10
	2. PPSM	3	2,50
	3. PPK	18	15
	4. Bendahara	8	6,67
	5. Pejabat Pengadaan	11	9,17
	6. Tim Monev/Pelaporan/lainnya	68	56,67
7	Pengalaman pada Kegiatan DAK Fisik		
	1. ≤ 1 Tahun	17	14,17
	2. 1 s.d. 3 Tahun	53	44,17
	3. 4 – 5 Tahun	23	19,17
	4. ≥ 5 Tahun	27	22,50
8	Intensitas Kursus/Diklat/Bimtek di Bidang Pengelolaan Keuangan DAK Fisik/PBJ dan Penyusunan Laporan Keuangan yang pernah diikuti Responden		
	1. Tidak Pernah	40	33,33
	2. 1-2 kali (Pernah)	50	41,67
	3. 3-5 kali (Jarang)	18	15
	4. 6-10 kali (Sering)	8	6,67
	5. ≥ 10 kali (Sangat Sering)	4	3,33
9	KPPN Tempat Pencairan DAK Fisik TA. 2017		
	1. KPPN Banda Aceh	35	29,17
	2. KPPN Kutacane	35	29,17
	3. KPPN Takengon	2	1,67
	4. KPPN Meulaboh	12	10
	5. KPPN Lhokseumawe	17	14,17
	6. KPPN Langsa	11	9,17
	7. KPPN Tapaktuan	8	6,67

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

Dari Tabel 4.1 diatas, gambaran umum responden sebagian besar adalah pria yaitu sebanyak 99 orang atau 82,50% sedangkan responden wanita sebanyak 21 orang atau 17,50%, jenis kelamin pria mendominasi responden pada penelitian ini. Usia responden terbanyak adalah yang berumur antara 41-50 tahun sebanyak 51 orang atau 42,50%, kemudian untuk usia 31-40 tahun sebanyak 54 orang atau sebesar 45%, jika dijumlahkan usia 31-50 tahun adalah sebanyak 105 orang, dan latar belakang pendidikan responden umumnya Sarjana (S1/DIV) sebanyak 62 orang (51,67%). Latar belakang pendidikan terbesar responden adalah Tehnik sebanyak 29 orang (24,17%) diikuti Ekonomi/keuangan sebanyak 28 orang (23,33) kemudian Kesehatan sebanyak 26 orang (21,67). Masa kerja sebagai PNS responden terbesar adalah pada pada kerja 11 s.d. 20 tahun sebanyak 64 orang (53,33%). Pengalaman pada Kegiatan DAK Fisik terbanyak adalah 1 s.d. 3 tahun sebanyak 53 orang (44,17) dan Sebagian besar responden pernah mengikuti Kursus/Diklat/Bimtek di Bidang Pengelolaan Keuangan DAK Fisik/PBJ dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan intensitas kegiatan 1-2 kali (pernah) yaitu sebanyak 50 orang (41,67%) dan terdapat sebanyak 40 orang (33,33%) yang tidak pernah mengikuti diklat yang berkaitan dengan DAK Fisik TA. 2017.

A.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kumpulan data dari variabel yang telah dikumpulkan, sehingga data-data yang dianalisis memiliki distribusi normal. Data yang diperoleh dari hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, minimum dan maksimum dari setiap variabel yang diteliti, baik itu variabel dependen, variabel independen

maupun variabel moderating (Z). Pada Tabel 4.2 berikut terlihat statistik deskriptif variabel-variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Penyerapan Anggaran	120	8	20	15,37	2,557
Perencanaan	120	20	35	29,12	3,157
Sumber Daya Manusia	120	21	40	31,13	4,299
Adminstrasi	120	14	40	31,18	4,783
Pengadaan Barang/Jasa	120	24	50	39,45	5,014
Perubahan Kantor Bayar	120	11	25	21,10	3,174
Valid N (listwise)	120				

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

Jumlah data penelitian (N) adalah 120 observasi. Masing-masing variabel memiliki nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standar deviasi yang bervariasi, Peneliti menjadikan 5 skala dalam analisa *statistic deskriptif* ini untuk mengukur persepsi responden, yaitu, dari yang terkecil yaitu Buruk Sekali, Buruk, Cukup, Baik dan Baik Sekali. Rumus yang dipakai adalah dengan membagi 5 (lima) jarak antara nilai minimal dan maksimal, kemudian hasil pembagian tersebut ditambahkan ke angka terkecil sehingga mencapai angka terbesar, pembagian tersebut dikelompokkan menjadi 5 level kelompok, sehingga diperoleh hasil untuk diinterpretasikan dengan nilai hasil *mean*, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran belanja (Y) memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 20, selisih antara minimal dan maksimal adalah 12. Nilai rata-rata (*mean*) penyerapan anggaran adalah 15,37 artinya persepsi responden terhadap penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017 sudah baik, karena

terletak dilevel ketiga dengan nilai antara 15,21 sampai dengan 17,60. Nilai standar deviasi penyerapan anggaran adalah 2,557 yang berarti bahwa penyimpangan atas penyerapan anggaran sangat kecil karena dibawah nilai rata-rata.

2. Perencanaan (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 35, selisih antara minimal dan maksimal adalah 15. Nilai rata-rata (*mean*) perencanaan sebesar 29,12 artinya persepsi responden terhadap perencanaan DAK Fisik TA. 2017 di Provinsi Aceh adalah baik karena terletak dilevel ketiga dengan nilai antara 29,01 sampai dengan 32. Nilai standar deviasi perencanaan masih dibawah nilai rata-rata yaitu 3,157 yang berarti bahwa penyimpangan atas perencanaan sangat kecil.
3. Sumber daya manusia (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 21 dan nilai maksimum sebesar 40, selisih antara minimal dan maksimal adalah 19. Nilai rata-rata (*mean*) sumber daya manusia sebesar 31,13 artinya persepsi responden terhadap sumber daya manusia pengelola DAK Fisik pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh adalah cukup karena terletak dilevel kedua dengan nilai antara 28,61 sampai dengan 32,40. Nilai standar deviasi perencanaan adalah 4,299 yang berarti bahwa penyimpangan atas sumber daya manusia sangat kecil jika dibandingkan nilai *mean* (31,13).
4. Adminstrasi (X_3) memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 40 selisih antara minimal dan maksimal adalah 26. Nilai rata-rata (*mean*) adminstrasi sebesar 31,18 artinya persepsi responden terhadap adminstrasi DAK Fisik TA. 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh adalah baik, karena terletak dilevel ketiga dengan nilai antara 29,61 sampai

dengan 34,80. Nilai standar deviasi administrasi adalah 4,783 yang berarti bahwa penyimpangan atas administrasi sangat kecil.

5. Pengadaan Barang/Jasa (X_4) memiliki nilai minimum sebesar 24 dan nilai maksimum sebesar 50, selisih antara minimal dan maksimal adalah 26. Nilai rata-rata (*mean*) Pengadaan Barang/Jasa sebesar 39,45 artinya persepsi responden terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa DAK Fisik TA. 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh adalah cukup, karena terletak di level kedua dengan nilai antara 39,61 sampai dengan 44,80. Nilai standar deviasi pengadaan barang/jasa adalah 5,014 yang berarti bahwa penyimpangan atas Pengadaan Barang/Jasa sangat kecil.
6. Perubahan Kantor Bayar (Z) memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 25 selisih antara minimal dan maksimal adalah 14. Nilai rata-rata (*mean*) Perubahan Kantor Bayar sebesar 21,10 artinya persepsi responden terhadap Perubahan Kantor Bayar DAK Fisik TA. 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh adalah baik, karena terletak di level ketiga dengan nilai antara 19,41 sampai dengan 22,20. Nilai standar deviasi Perubahan Kantor Bayar adalah 3,174 yang berarti bahwa penyimpangan atas sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-rata (*mean*) yang memiliki nilai 21,10. Agar lebih jelas, interpretasi hasil statistik deskriptif di atas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2.1
Interprestasi Statistik Deskriptif

Var	Min	Max	selisih	Jarak Tiap Level	Level Kategori				
					Buruk Sekali	Baik	Cukup	Baik	Baik Sekali
Penyerapan Anggaran	8	20	12	2,4	8,0 - 10,40	10,41 - 12,80	12,81 - 15,20	15,21 - 17,60	17,61 - 20,00
Perencanaan	20	35	15	3	20,0 - 23,00	23,01 - 26,00	26,01 - 29,00	29,01 - 32,00	32,01 - 35,00
SDM	21	40	19	3,8	21,0 - 24,80	24,81 - 28,60	28,61 - 32,40	32,41 - 36,20	36,21 - 40,00
ADM	14	40	26	5,2	14,0 - 19,20	19,21 - 24,40	24,41 - 29,60	29,61 - 34,80	34,81 - 40,00
BPJ	24	50	26	5,2	24,0 - 29,20	29,21 - 34,40	34,41 - 39,60	39,61 - 44,80	44,81 - 50,00
PKB	11	25	14	2,8	11,0 - 13,80	13,81 - 16,60	16,61 - 19,40	19,41 - 22,20	22,21 - 25,00

B. Hasil Penelitian

B.1. Hasil Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data yang digunakan dalam penelitian DAK Fisik TA. 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh ini meliputi (1) uji validitas dan (2) uji reliabilitas.

B.1.a. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dengan bantuan *software* IBM SPSS versi 20, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* dengan batas angka kritis (α) adalah 0,05 (5%). Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel:

1. Jika r hitung $>$ r tabel (*degree of freedom*) maka instrument dianggap valid.

2. Jika r hitung $<$ r tabel (*degree of freedom*) maka instrumen dianggap tidak valid (drof), sehingga instrument tidak dapat digunakan dalam penelitian.
3. Menurut Ghozali (2013:53) r tabel atau *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini (n) adalah jumlah sampel maka df untuk penelitian ini adalah $120-2=118$, jika lihat r table pada $df = 118$ dengan uji 2 sisi menunjukkan nilai r Tabel adalah 0,179.

Berdasarkan pengujian validitas instrument dengan bantuan *software* IBM

SPSS versi 20, dapat diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas

Instrumen Penelitian	Nomor pada Kuisisioner	Butir Instrumen	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Penyerapan Anggaran (Y)	1	1	0,630	0,179	Valid
	2	2	0,672	0,179	Valid
	3	3	0,691	0,179	Valid
	4	4	0,712	0,179	Valid
Perencanaan (X ₁)	5	1	0,612	0,179	Valid
	6	2	0,774	0,179	Valid
	7	3	0,712	0,179	Valid
	8	4	0,681	0,179	Valid
	9	5	0,736	0,179	Valid
	10	6	0,804	0,179	Valid
	11	7	0,606	0,179	Valid
Sumber Daya Manusia (X ₂)	12	1	0,603	0,179	Valid
	13	2	0,556	0,179	Valid
	14	3	0,681	0,179	Valid
	15	4	0,630	0,179	Valid
	16	5	0,589	0,179	Valid
	17	6	0,683	0,179	Valid
	18	7	0,550	0,179	Valid
	19	8	0,620	0,179	Valid
Administrasi (X ₃)	20	1	0,808	0,179	Valid
	21	2	0,653	0,179	Valid
	22	3	0,768	0,179	Valid
	23	4	0,596	0,179	Valid
	24	5	0,623	0,179	Valid
	25	6	0,732	0,179	Valid
	26	7	0,614	0,179	Valid
	27	8	0,677	0,179	Valid

Pengadaan Barang/ Jasa (X ₄)	28	1	0,651	0,179	Valid
	29	2	0,733	0,179	Valid
	30	3	0,445	0,179	Valid
	31	4	0,591	0,179	Valid
	32	5	0,752	0,179	Valid
	33	6	0,568	0,179	Valid
	34	7	0,535	0,179	Valid
	35	8	0,690	0,179	Valid
	36	9	0,659	0,179	Valid
	37	10	0,705	0,179	Valid
Perubahan Kantor Bayar (Z)	38	1	0,945	0,179	Valid
	39	2	0,963	0,179	Valid
	40	3	0,954	0,179	Valid
	41	4	0,928	0,179	Valid
	42	5	0,917	0,179	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 4.3 diatas untuk variabel penyerapan anggaran (Y) menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel sehingga dinyatakan valid. Variabel perencanaan (X₁), sumber daya manusia (X₂), administrasi (X₃), Pengadaan Barang/Jasa (X₄), dan variabel moderating Perubahan Kantor Bayar (Z) juga telah menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel, dihitung pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 0,179 untuk nilai *degree of freedom* 118 (120-2). sehingga semua butir pernyataan variabel dinyatakan valid.

B.1.b. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas adalah tehnik pengujian untuk mengukur konsistensi alat ukur yang digunakan untuk suatu objek yang diteliti. Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan *software* IBM SPSS versi 20. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* jika *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 sebagaimana pendapat Kuncoro (2013).

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Penyerapan Anggaran (Y)	0,602	0,60	Reliabel
Perencanaan (X ₁)	0,827	0,60	Reliabel
Sumber Daya Manusia (X ₂)	0,710	0,60	Reliabel
Administrasi (X ₃)	0,840	0,60	Reliabel
Pengadaan Barang/Jasa (X ₄)	0,831	0,60	Reliabel
Perubahan Kantor Bayar (Z)	0,968	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

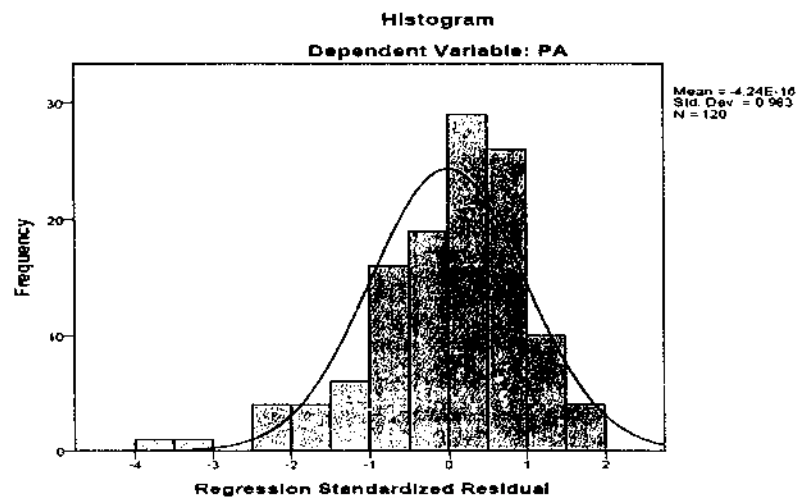
Dari Tabel 4.4 diatas terlihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan angka *Cronbach's Alpha* pada masing-masing kolom variabel independen, dependen dan moderating tersebut lebih besar dari 0,60 maka dapat dinyatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam kuisioner ini handal.

B.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 alat uji yaitu: (1) uji normalitas, (2) uji multikolinearitas dan (3) uji heteroskedastisitas.

B.2.a Hasil Uji Normalitas

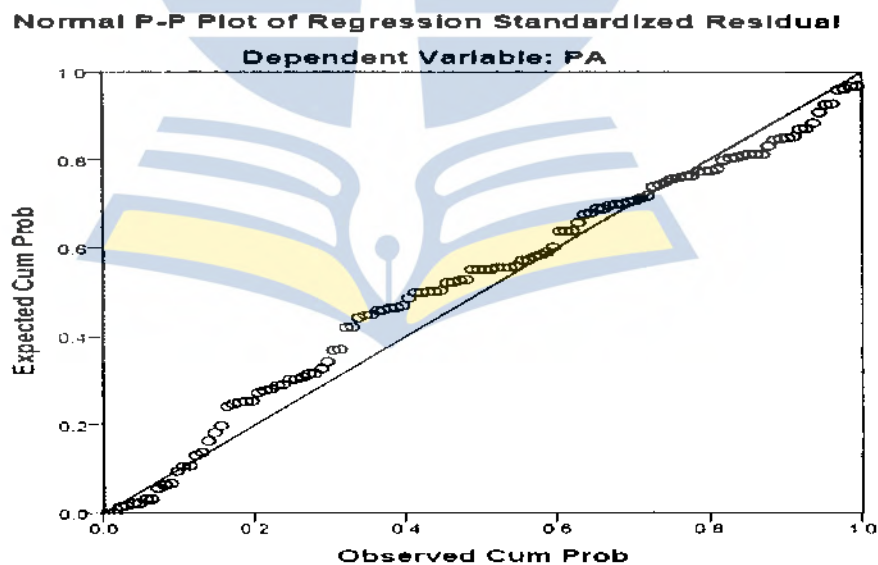
Uji normalitas dipergunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov* (K-S), untuk analisa grafik digunakan grafik histogram dan grafik normal P-Plot yang dihasilkan dari *software* IBM SPSS versi 20. Hasil analisis grafik terlihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 serta hasil uji K-S terlihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut :



Gambar 4.1 Histogram

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa histogram menunjukkan pola terdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari pola kurva yang tegak lurus dan tidak miring ke kiri ataupun ke kanan, sehingga dapat diambil kesimpulan grafik histogram menunjukkan pola terdistribusi secara normal.



Gambar 4.2 Normal P-P Plot

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa grafik normal P-P Plot tersebar sepanjang garis diagonal. Titik-titik menyebar disekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Kemudian untuk lebih meyakinkan hal tersebut, data tersebut kembali kita buktikan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, data tersaji dibawah ini berdasarkan perhitungan dari *software* IBM SPSS versi 20 .

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,00000
	Std. Deviation	2,28653071
	Absolute	0,108
Most Extreme Differences	Positive	0,058
	Negative	-0,108
Kolmogorov-Smirnov Z		1,183
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,122 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil dari analisis *Kolmogorov-Smirnov Z*, menunjukkan bahwa nilai signifikannya sebesar 0,122. Nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (*Asymp. Sig (2-tailed)* = 0,122 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.

B.2.b Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang linier antara variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas (independen) yang lainnya. Pengujian multikolinearitas dilakukan

dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Data dikatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila memiliki 2 kriteria yaitu: (1) nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan (2) nilai VIF ≤ 10 . Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Perencanaan	0,692	1,445
1 Sumber Daya Manusia	0,598	1,671
Adminstrasi	0,603	1,658
Pengadaan Barang/Jasa	0,626	1,597

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran
Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

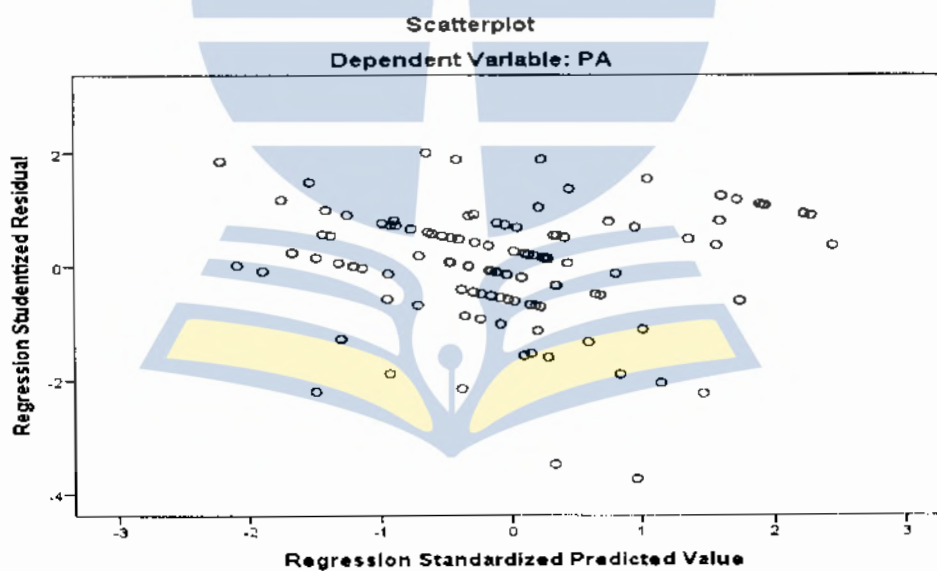
Berdasarkan Tabel 4.6 diatas hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki *Tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas, hal tersebut tersaji lebih jelas pada tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Nilai Tolerance dan VIF

Variabel Independen	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
Perencanaan	$0,692 \geq 0,10$	$1,445 \leq 10$	Non Multikolinearitas
Sumber Daya Manusia	$0,598 \geq 0,10$	$1,671 \leq 10$	Non Multikolinearitas
Adminstrasi	$0,603 \geq 0,10$	$1,658 \leq 10$	Non Multikolinearitas
Pengadaan Barang/Jasa	$0,626 \geq 0,10$	$1,597 \leq 10$	Non Multikolinearitas

B.2.c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah bagian dari pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas pada penelitian ini digunakan analisis grafik *scatterplot*. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas dan jika ada pola yang tidak jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini:



Gambar 4.3 Grafik *Scatterplot*

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.3 diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak teratur, tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini

mengindikasikan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi yang akan diuji nanti layak digunakan untuk menguji pengeluaran anggaran sebagai variabel dependen.

B.3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk memetakan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, dengan jumlah variabel independen lebih dari satu. Secara umum, analisis regresi biasanya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

<i>Model</i>	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,773	2,209		3,067	0,003
PRC	-0,059	0,081	-0,073	-0,725	0,470
SDM	0,168	0,064	0,283	2,627	0,010
ADM	0,105	0,057	0,196	1,826	0,071
PBJ	0,046	0,054	0,090	,850	0,397

a. Dependent Variable: PA

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

Persamaan hasil regresi linear berganda untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 6,773 - 0,059X_1 + 0,168X_2 + 0,105X_3 + 0,046X_4$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan hasil uji regresi linear berganda sebagai berikut:

1. Konstanta (α)

Nilai konstanta sebesar 6,773 berarti jika variabel independen yaitu variabel perencanaan (X_1), sumber daya manusia (X_2), adminstrasi (X_3) dan pengadaan barang/jasa (X_4) dianggap nol (0) maka nilai variabel penyerapan anggaran akan bertambah sebesar 6,773.

2. Perencanaan (X_1) terhadap penyerapan anggaran (Y)

Nilai koefisien perencanaan sebesar -0,059 menunjukkan bahwa variabel perencanaan bersifat negatif yang berarti bahwa semakin menurunnya perencanaan sebesar satu satuan maka akan menurunkan penyerapan anggaran sebesar 0,059 atau sebesar 5,9% dengan asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap. Hal ini bisa terjadi apabila mekanisme perencanaan kegiatan DAK Fisik tidak berjalan secara teratur sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak optimal.

3. Sumber daya manusia (X_2) terhadap penyerapan anggaran (Y)

Nilai koefisien sumber daya manusia sebesar 0,168 menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia bersifat positif yang berarti bahwa semakin meningkatnya kompetensi sumber daya manusia sebesar satu satuan maka akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 0,168 atau sebesar 16,8% dengan asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap.

4. Administrasi (X_3) terhadap penyerapan anggaran (Y)

Nilai koefisien adminstrasi sebesar 0,105 menunjukkan bahwa variabel adminstrasi bersifat positif yang berarti bahwa semakin meningkatnya kualitas

administrasi sebesar satu satuan maka akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 0,105 atau sebesar 10,5% dengan asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap.

5. Pengadaan Barang/Jasa (X_4) terhadap penyerapan anggaran (Y)

Nilai koefisien Pengadaan Barang/Jasa sebesar 0,046 menunjukkan bahwa variabel Pengadaan Barang/Jasa bersifat positif berarti bahwa dengan meningkatnya pertanggungjawaban melalui Pengadaan Barang/Jasa sebesar satu satuan maka nilai variabel penyerapan anggaran akan meningkat sebesar 0,046 atau sebesar 4,6% dengan asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap.

B.4. Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan (1) koefisien determinasi (*Adjusted R²*), (2) uji simultan (uji F), (3) uji parsial (uji t) dan (4) uji moderating (uji residual) pada variabel moderating Perubahan Kantor Bayar (Z).

B.4.a. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *Adjusted R²* yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,448 ^a	0,200	0,173	2,326

a. Predictors: (Constant), Perencanaan, SDM ,Adminstrasi
 Pengadaan Barang/Jasa

b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) mempunyai nilai sebesar 0,448 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan semua variabel dependen sebesar 44,8%. Artinya koefisien pengaruh variabel perencanaan, variabel sumber daya manusia, variabel adminstrasi dan variabel pengadaan barang/jasa mempunyai hubungan yang kuat terhadap penyerapan anggaran, karena diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 44,8%.

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) mempunyai nilai sebesar 0,173 Artinya sebesar 17,3% variabel-variabel dari penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh variabel perencanaan, sumber daya manusia, adminstrasi dan pengadaan barang/jasa. Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 82,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

B.4.b. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	155,967	4	38,992	7,207	,000 ^b
	Residual	622,158	115	5,410		
	Total	778,125	119			

a. Dependent Variable: Penyerapan anggaran

b. Predictors: (Constant), Perencanaan, SDM
Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa

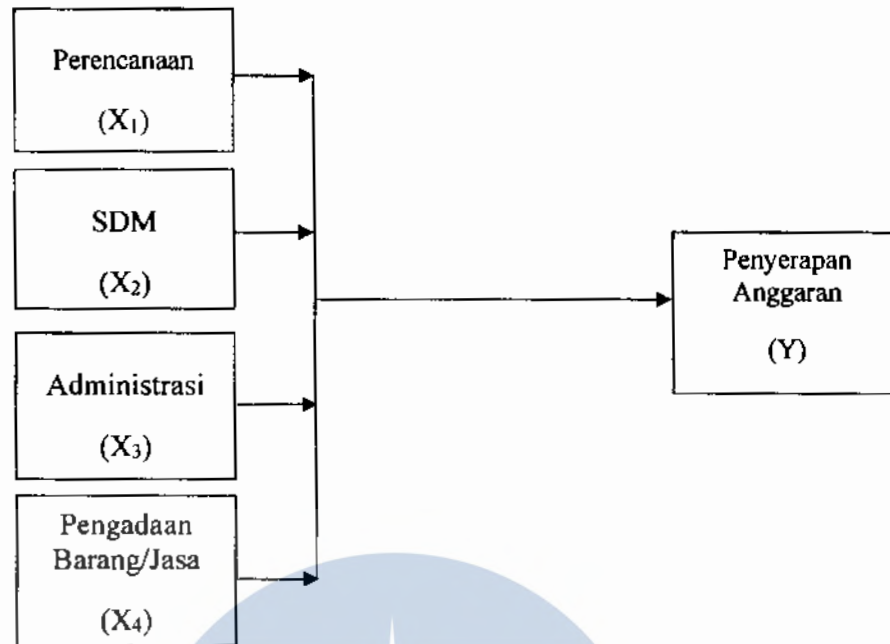
Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

Uji F ini memiliki persyaratan (1) nilai signifikansi $< \alpha = 0,05$ dan (2) F hitung harus lebih besar dari F tabel, agar bisa ditetapkan semua variabel independen simultan dan berpengaruh signifikan. Dalam penelitian ini nilai F tabel dengan nilai $df (n1) = 4$, $df (n2) = 115$, dan taraf signifikansi 0,05 maka didapatkan nilai F tabel sebesar 2,45.

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas dapat terlihat bahwa:

1. Nilai sigma adalah $0,000 < \alpha = 0,05$.
2. Nilai F hitung (7,207) > F tabel (2,45).

Hasil uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen (Perencanaan, Sumber Daya Manusia, Adminstrasi dan Pengadaan Barang/Jasa) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (penyerapan anggaran). Hasil uji F dapat ditampilkan sebagai berikut sebagai penjelasan dari kerangka konseptual yang telah disebutkan pada Bab II diatas:



Gambar 4.4 Hasil Uji F

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

dari gambar diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Penyerapan Anggaran, dan ini sebagai jawaban dari hipotesis pertama yang diajukan.

B.4.c. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.773	2.209		3,067	0,003
Perencanaan	-0,059	0,081	-0,073	-0,725	0,470
1 Sumber Daya Manusia	0,168	0,064	0,283	2,627	0,010
Administrasi	0,105	0,057	0,196	1,826	0,071
Pengadaan Barang/Jasa	0,046	0,054	0,090	0,850	0,397

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

Dalam pengambilan keputusan untuk uji t terdapat dua indikator yaitu: (1)

Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan (2) $\text{Sig} < \alpha = 0,05$, jika dua hal ini terpenuhi maka dapat diambil keputusan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk mencari nilai t table dalam pengujian hipotesis untuk uji t (uji parsial), digunakan *degree of freedom* (df) yang dicari dengan rumus $n - k$.

n = banyak observasi

k = banyaknya variabel (bebas dan terikat).

Dalam penelitian ini maka $df = 120 - 5 = 115$, maka jika kita melihat t table disebutkan bahwa nilai t untuk pengujian 2 arah adalah 1,980.

Tabel 4.12
Keterangan Hasil Uji t

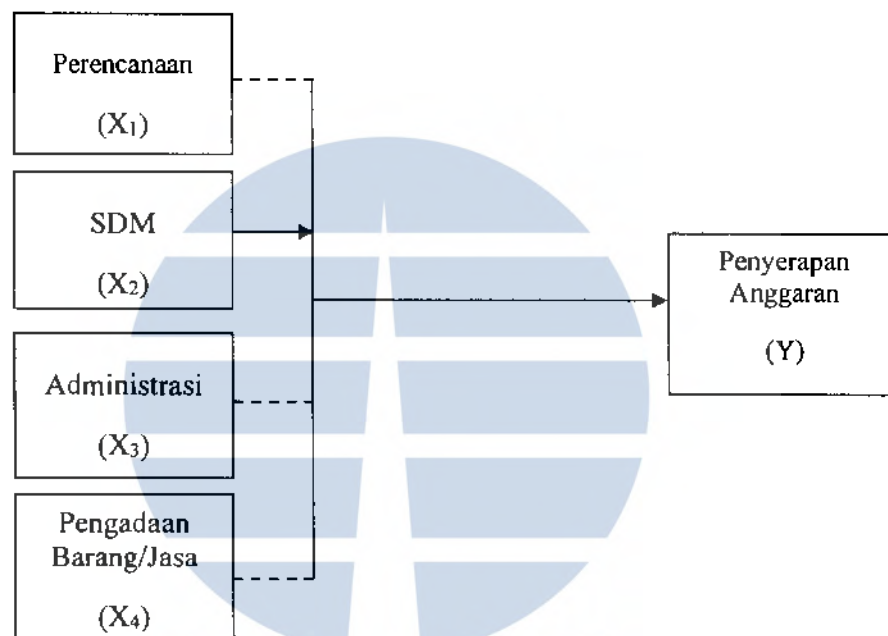
Variabel Independen	t hitung vs t tabel	Sig hitung vs $\alpha = 0,05$	Pengaruh
Perencanaan	$-0,725 < 1,980$	$0,470 > 0,05$	Negatif, Tidak signifikan
SDM	$2,627 > 1,980$	$0,010 < 0,05$	Positif, Signifikan
Adminstrasi	$1,826 < 1,980$	$0,071 > 0,05$	Positif, Tidak signifikan
PBJ	$0,850 < 1,980$	$0,397 > 0,05$	Positif, Tidak signifikan

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas dapat disimpulkan hasil signifikansi atau pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Nilai t hitung untuk perencanaan adalah $-0,725$ dengan tingkat signifikansi $0,470$ maka variabel perencanaan berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran dengan nilai t hitung ($0,725 < t$ tabel ($1,980$) dan nilai signifikan ($0,470$) $> 0,05$. Dapat diambil keputusan bahwa secara parsial variabel perencanaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
2. Nilai t hitung untuk sumber daya manusia adalah $2,627$ dengan tingkat signifikansi $0,010$ maka variabel sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran dengan nilai t hitung ($2,627$) $> t$ tabel ($1,980$) dan nilai signifikan ($0,010$) $< 0,05$. Dapat diambil keputusan bahwa secara parsial variabel Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran.
3. Nilai t hitung untuk administrasi adalah $1,826$ dengan tingkat signifikansi $0,071$ maka variabel administrasi tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran dengan nilai t hitung ($1,826$) $< t$ tabel ($1,980$) dan nilai signifikan ($0,071$) $> 0,05$. Dapat diambil keputusan bahwa secara parsial variabel Administrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
4. Nilai t hitung untuk variabel Pengadaan Barang/Jasa adalah ($0,850$) dengan tingkat signifikansi $0,397$ maka variabel Pengadaan Barang/Jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dengan nilai t hitung ($0,850$) $< t$ tabel ($1,980$) dan nilai signifikan ($0,397$) $> 0,05$. Dapat diambil keputusan

bahwa secara parsial variabel Pengadaan Barang/Jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

5. Dari empat (4) variabel independen yang diajukan pada hipotesis pertama pada Bab I, maka hanya variabel Sumber Daya Manusia yang berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penyerapan anggaran.
6. Hasil uji parsial atau uji t dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.5 Hasil Uji t

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

dari gambar diatas, hasil uji parsial hanya variabel sumber daya manusia yang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017 pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh.

B.4.d. Hasil Uji Moderating (Uji Residual)

Uji Residual dilakukan untuk melihat apakah variabel moderating dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen. Hasil uji residual Perubahan Kantor Bayar (Z) dapat dilihat pada Tabel 4.13 dan Tabel 4.14 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Uji Residual
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3,482	2,542		1,370	0,173
	PRC	0,281	0,093	0,280	3.007	0,003
	SDM	0,222	0,074	0,300	3.005	0,003
	ADM	0,034	0,066	0,052	0,518	0,605
	PBJ	0,037	0,062	0,059	0,601	0,549

a. Dependent Variable: Perubahan Kantor Bayar
Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

Tabel 4.14
Hasil Uji Residual
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.912	1.027		2.834	0,005
	PA	-0,067	0,066	-0,094	-1.023	0,308

a. Dependent Variable: AbsRes_1
Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji residual pada Tabel 4.13 dan Tabel 4.14 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Z = 3,482 + 0,281X_1 + 0,222X_2 + 0,034X_3 + 0,037X_4 + \varepsilon$$

$$|\varepsilon| = 2,912 - 0,094Y$$

Suatu variabel dikatakan memoderasi jika nilai paramaternya negatif dan signifikan. Berdasarkan Tabel 4.12 hasil uji residual menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,308 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,308 > \alpha = 0,05$) dan nilai koefisien

Tentang aturan mekanisme pencairan DAK Fisik TA. 2017 masih sulit dipahami dan dilaksanakan. Hal ini juga dikuatkan oleh Bapak Nopal yang menyatakan pada pertanyaan terbuka kuisioner yang menyatakan bahwa regulasi tentang pengelolaan DAK Fisik harus sudah disahkan H-1 (tahun sebelumnya) jangan di tahun berjalan dan Bapak Tarmizi, ST., MPH. menyatakan pada pertanyaan terbuka perlunya penyederhanaan petunjuk teknis dan aturan penyaluran DAK Fisik. Hal yang hampir serupa juga dinyatakan oleh Bapak Sofan Hidayat yang menyatakan bahwa agar regulasi yang digunakan tidak berubah-ubah setiap saat. Hal ini cukup disadari karena penerbitan aturan pada tahun berjalan mempengaruhi tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam memahami dan melaksanakan aturan tersebut, dan butuhnya sosialisasi dan internalisasi aturan tersebut, padahal kegiatan pelaksanaan sudah berjalan, sehingga menghambat proses pencairan DAK Fisik dan terkadang salah persepsi tentang aturan yang berlaku saat ini dan belum sederhananya aturan sehingga mempersulit penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017.

Adanya revisi DAK Fisik TA. 2017, hal ini terjadi karena tidak sesuai antara pagu DIPA DAK Fisik dengan kebutuhan, sebagaimana pernyataan Bapak M. Nurdin Zaini yang menyatakan agar usulan pagu DAK sama dengan jumlah pagu anggaran yang diterima. Demikian juga dengan adanya DAK Fisik tambahan TA. 2017 belum diterima sesuai jadwal dan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden merasa proses administrasi yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan DAK Fisik TA. 2017 belum berjalan baik.

C.4. Pengaruh Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh, dengan menggunakan uji t dan diperoleh hasil nilai t hitung sebesar (0,850) lebih kecil dari t tabel 1,980 dan tingkat signifikansi sebesar 0,397 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi sebesar positif (0,046) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengadaan Barang/Jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priatno & Khusaini (2013) dan Simanjuntak (2016) yang menghasilkan temuan bahwa faktor Pengadaan Barang/Jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh variabel Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017.

Berdasarkan tabulasi persepsi responden terhadap variabel Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan pelelangan pengadaan telah dilakukan sesuai jadwal sebagian responden menjawab tidak setuju, hal ini diperkuat oleh pernyataan beberapa responden antara lain Bapak Saipul Rizal, S.Pi, M.Si. yang menyatakan bahwa proses lelang yang terlambat kadang kala menghambat proses dalam pelaksanaan DAK Fisik, begitu juga pernyataan dari Bapak Samsul Bahri yang menyatakan agar proses lelang dipercepat. Tidak signifikannya variabel pengadaan barang/jasa diperkirakan karena mekanisme pembayaran kegiatan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh dan diseluruh Indonesia karena aturan memang mengatur

demikian, karena dominan melalui pembayaran langsung (LS) pertahapan dari KPPN daerah ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Pengelola DAK Fisik. Terdapat 4 tahapan dalam pembayaran DAK Fisik sebagaimana aturan yang berlaku sehingga wajar jika variabel Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Bapak Lutfieka, SE., M.Si. yang meminta agar tahapan penyaluran tidak perbidang, sehingga penyerapan dapat tepat waktu dan pernyataan Bapak Erwin Syahputra yang meminta agar pencairan dana dibuat 2 (dua) tahap saja.

C.5. Pengaruh Simultan terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel independen (Perencanaan, Sumber Daya Manusia, Adminstrasi, dan Pengadaan Barang/Jasa) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini dapat dilihat melalui Tabel 4.10 dengan nilai sigma 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < \alpha = 0,05$) dan nilai F hitung ($7,207 > F$ tabel (2,45)).

Variabel independen (Perencanaan, Sumber Daya Manusia, Adminstrasi, dan Pengadaan Barang/Jasa) di dalam penelitian ini wajar memiliki pengaruh secara simultan, dikarenakan variabel-variabel tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai penyerapan anggaran DAK Fisik yang optimal. Perencanaan anggaran yang akurat, kompetensi SDM yang baik, kelengkapan adminstrasi, proses Pengadaan Barang/Jasa yang teratur merupakan bagian yang dibutuhkan oleh pelaksana kegiatan DAK Fisik TA. 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh untuk meningkatkan penyerapan anggaran.

C.6. Pengaruh Perubahan Kantor Bayar sebagai Variabel Moderating

Hasil uji residual menunjukkan nilai koefisien negatif sebesar (-0,094) dan nilai signifikan 0,308 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,308 > \alpha = 0,05$). Artinya Perubahan Kantor Bayar merupakan bukanlah variabel pemoderasi hubungan antara variabel perencanaan, sumber daya manusia, administrasi dan pengadaan barang/jasa dengan penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017. Perubahan Kantor Bayar dianggap sebagai variabel moderating apabila nilai koefisien negatif dan nilai signifikan lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

Variabel moderating ini baru diajukan pada penelitian ini, sehingga belum dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Dari data diatas Perubahan Kantor Bayar bukan merupakan variabel moderating yang berpengaruh dalam menambah atau mengurangi pada penyerapan DAK Fisik TA. 2017, sehingga perpindahan pembayaran DAK Fisik ke KPPN daerah, khusus 7 (tujuh) KPPN yang ada di Provinsi Aceh belum dapat mempengaruhi tingkat penyerapan DAK Fisik TA. 2017, hal ini terjadi karena masih pada tahap uji coba tahun pertama perpindahan penyaluran, semoga pada tahun mendatang kehadiran pembayaran DAK Fisik melalui KPPN di daerah dapat menstimulus percepatan penyerapan anggaran DAK Fisik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang dilakukan pada Bab IV, maka Peneliti mengajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan berdasarkan hasil uji F, seluruh variabel independen, variabel Perencanaan, Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh.
2. Secara parsial hanya variabel Sumber Daya Manusia yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh, kesimpulan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Herryanto (2012), Nugroho (2013), Pratama (2015) serta Nuri (2017).
3. Variabel Administrasi dan Pengadaan Barang/Jasa secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh hal ini diperkuat oleh pernyataan beberapa responden antara lain Bapak Saipul Rizal, S.Pi, M.Si. yang menyatakan bahwa proses lelang yang terlambat kadang kala menghambat proses dalam pelaksanaan DAK Fisik.
4. Variabel Perencanaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017

pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh, hal ini dibuktikan dengan uji statistik dan diperkuat hasil wawancara dengan ahli keuangan negara Bapak Drs. Parluhutan Hutahaen, MA., yang menyatakan hal ini dapat terjadi karena tidak sinkronnya perencanaan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah khususnya pada Provinsi Aceh, kurangnya koordinasi dan terbatasnya informasi yang diperoleh Pemerintah Pusat tentang situasi Provinsi Aceh;

5. Variabel Perubahan Kantor Bayar tidak mampu memoderasi hubungan Perencanaan, Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pengadaan Barang/Jasa dengan penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh, karena berdasarkan hasil uji statistik memiliki nilai parameter positif dan tidak signifikan, sehingga perpindahan pembayaran DAK Fisik ke 7 (tujuh) KPPN yang ada di Provinsi Aceh belum dapat mempengaruhi tingkat penyerapan DAK Fisik TA. 2017, hal ini terbukti dengan penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017 untuk Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sampai dengan bulan Agustus 2017 baru mencapai 42,92%.
6. Pemerintah daerah di Provinsi Aceh berperan penting dalam meningkatkan standar minimum pelayanan (SPM) kepada masyarakat salah satunya dengan percepatan pembangunan di daerah. Dan pembangunan di daerah dapat terlaksana dengan baik apabila adanya penyerapan anggaran yang optimum.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan penelitian pada penelitian ini, antara lain :

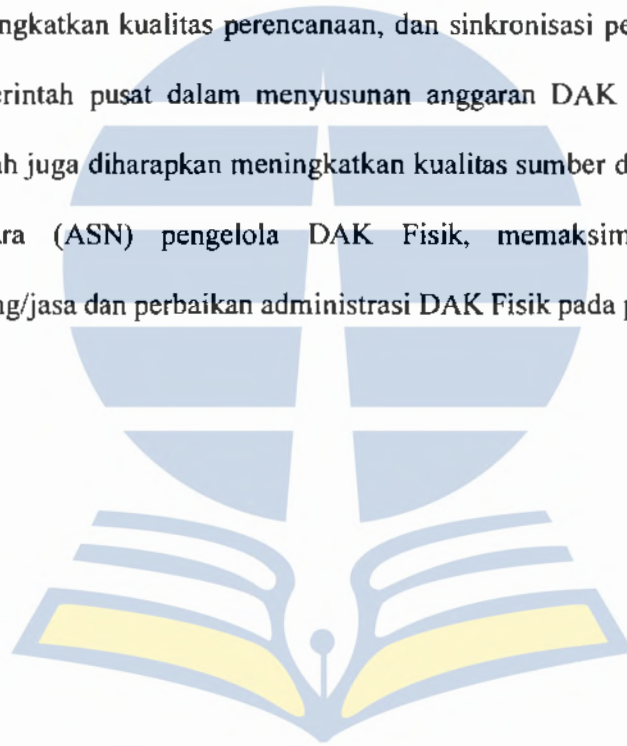
1. Penelitian ini hanya membahas variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja, yaitu Perencanaan, Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan nilai *adjusted R Square* yang dihasilkan dalam penelitian ini rendah sehingga ada variabel lain diluar model penelitian ini yang mampu mempengaruhi penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh.
2. Penelitian ini menggunakan metode survei berupa kuesioner baik cetakan maupun online, sehingga kemungkinan terdapat bias dari jawaban responden yang terjadi karena adanya perbedaan interpretasi atas maksud dan tujuan pertanyaan.
3. Pengambilan objek penelitian hanya dilakukan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh secara acak dengan jumlah sampel sebanyak 120 orang.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan ini, maka penyempurnaan penelitian ini disarankan untuk pada penelitian selanjutnya adalah:

1. Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang penyerapan anggaran disarankan dapat menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan penyerapan anggaran seperti variabel Teknologi Informasi, Kendala Koordinasi, Komitmen Organisasi, Regulasi Keuangan Pusat dan Daerah dan Motivasi.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan selain menerapkan metode campuran yaitu survei melalui penyebaran kuesioner/angket baik *online* maupun *hardcopy* dan juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel dan cakupan provinsi yang diteliti, untuk memperoleh hasil yang lebih representatif.
4. Kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh selaku pengelola DAK Fisik agar dapat memaksimalkan penyerapan anggaran DAK Fisik dengan meningkatkan kualitas perencanaan, dan sinkronisasi perencanaan dengan pemerintah pusat dalam menyusun anggaran DAK Fisik. Pemerintah daerah juga diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) pengelola DAK Fisik, memaksimalkan pengadaan barang/jasa dan perbaikan administrasi DAK Fisik pada pemerintah daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Anfujatin. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban*. Jurnal Administrasi Publik ISSN: 0216-6496 Juni 2016, Vol. 14, No. 1, hal 1 – 18.
- Arthana, I. M. (2015). *Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Pegawai pada Kinerja Penyerapan Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Lingkup Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara*. Tesis. Denpasar: Universitas Udayana.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2012). *Mencari Solusi bagi Serapan yang Terlambat*. Jakarta Timur: Warta Pengawasan.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2012). *Desentralisasi Fiskal di Indonesia Satu Dekade setelah Ledakan Besar*. Jakarta: DJPK.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2017). *Informasi APBN 2017 APBN Yang Kredibel Ditengah Ketidakpastian Global*. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2015a). *Pola Ideal Penyerapan Anggaran Berdasarkan Karakteristik Belanja Negara*. Tanjung Pinang: Kanwil DJPBn Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2015b). *Kajian Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Perekonomian Regional Provinsi Kepulauan Riau*. Tanjung Pinang: Kanwil DJPBn Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2017). *Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Semester I Tahun 2017*. Jakarta: Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Erlina. (2011). *Metodologi Penelitian*. Medan. USU Press.
- Fadzil, Hanim Faudziah & Nyoto, Harryanto. (2011). *Fiscal Decentralization After Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia*. World Review of Bussines Research (Vol. 1, No. 2; 51-70).
- Ghazali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghazali, Imam. (2017). *Ekonometrika Teori. Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariadi, P., Restianto, YE & Bawono, IR. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. (2006). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jurnal. Akuntansi Pemerintahan 2(1): 53-64.
- Herriyanto, H. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta*. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Hamdi, Muchlis & Ismayarti, Siti. (2014). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Ikhsan, M (2014). *Administrasi Keuangan Publik*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Jensen & Meckling (1976). *The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour , Agency Cost, and Ownership Structure*, Journal of Financial and Economics, 3:305-360.
- Kirnanda, A. (2016). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai Dengan Perubahan Anggaran Sebagai Variabel Moderating*. Tesis. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara.
- Kuswoyo, Iwan Dwi. (2011). *Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.
- Kementerian Keuangan. (2012). *Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kuncoro, Mudrajat. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Edisi 4. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajat. (2014). *Otonomi dan Pembangunan Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Edisi 3. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Latifah, Nurul P. (2010). *Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Jurnal fokus ekonomi Vol. 5 No.2 Desember 2010. Semarang : STIE Pelita Nusantara.

- Malau, M.C (2005). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002a). *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Makalah disampaikan dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Krisis Moneter Indonesia. Jakarta, 7 Mei 2002. Didownload pada tanggal 25 November 2017 di ejournal.narotama.ac.id/files/Jurnal%20Otonomi%20Daerah_Mardiasmo.pdf
- Mount Royal University (MRU). (n.d). *APA for Academic Writing (2017-2018)*. Canada. <http://www.mtroyal.ca/library/files/citation/apa.pdf> (diakses tanggal 26 Januari 2018).
- Nugrahanto, A.S & Muhdidin. (2008). *Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional di Indonesia*. Jurnal Perencanaan Pembangunan Nomor 01/Tahun XIV/2008.
- Nuri, Lailan. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*. Tesis. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara.
- Priatno, P. A & Khusaini, M. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar*. Artikel Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya.
- Prasojo, E., Ridwan, IR., Kurniawan, T., & Karyana, I. (2015). *Pemerintah Daerah. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka*.
- Rifai, Ahmad., Inapty, BA & Pancawati, Rr. Sri. (2016). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Pemprov NTB)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol 11, No. 1 Januari 2016.
- Arifin. (2005). *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Keagenan)*. Disampaikan Pada Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar.
- Sarwono & Budiono, (2012). *Statistik Terapan Aplikasi Untuk Riset Skripsi, Tesis dan Desertasi (Menggunakan SPSS, AMOS dan Excel)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Syahputra, Ari (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Dengan Perubahan Anggaran Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Tesis. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara.
- Sri Sulistyarini [et.al]. (2016). *Panduan Penulisan Proposal dan Tugas Akhir Program Magister*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Simanjuntak, Hertati SA. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD di Pemerintah Kota Medan*. Tesis. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara.
- Sundarso, dkk (2016). *Teori Administrasi*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Sutrisno, Nanang Agus. (2015). *Analisis Atas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Sutrisno, Edy. (2006). *Analisis hubungan pengeluaran pemerintah dan Produk Domestik Bruto(PDB) dengan menggunakan pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression (VAR)*. Tesis. Depok: Universitas Indonesia.
- Tuasikal, Askam (2013). *Fenomenologis Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol 11. Jurnal Akuntansi Universitas Jember.
- TADF, Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal. (2013). *Pengelolaan DAK: Kondisi dan Strategi Ke Depan*. Jakarta: DJPK.
- World Bank. (2012). *Identifikasi hambatan dalam pelaksanaan anggaran di sektor infrastruktur: studi penelusuran DIPA*. Washington, DC: World Bank.<http://documents.worldbank.org/curated/en/378351468285051070/Identifikasi-hambatan-dalam-pelaksanaan-anggaran-di-sektor-infrastruktur-studi-penelusuran-DIPA>.
- Whitepaper*. (2011). *Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK)*. Jakarta: Bappenas.
- Yusuf, A Muri. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Pranadamedia Group
- Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, Syukri. (2016). *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan*

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Magister Akuntansi. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

- _____. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).*
- _____. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 47. Sekretariat Negara. Jakarta.*
- _____. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 126. Sekretariat Negara. Jakarta.*
- _____. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*
- _____. (2015). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/Pb/2017 Tgl. 23 Agustus 2017 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-4/Pb/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dak Fisik Dan Dana Desa Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2017 tentang *Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik pada APBN-P TA 2017.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang *Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2016 tentang *Peta Kapasitas Fiskal Daerah.*
- Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang *Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.*
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan.*
- Slide paparan Kepala Subdirektorat Keuangan Daerah Bappenas (2016). *Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Dana Alokasi Khusus 2017.*

Slide paparan Direktur PA Ditjen Perbendaharaan (2017). *Penyaluran Dak Fisik Dan Dana Desa Melalui KPPN Tahun 2017*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003 Tentang Penyusunan Standard Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.

Genjot Pertumbuhan, Jokowi Minta Penyerapan Anggaran Dikebut. Diambil 15 Desember 2017, dari situs World Wide Web:

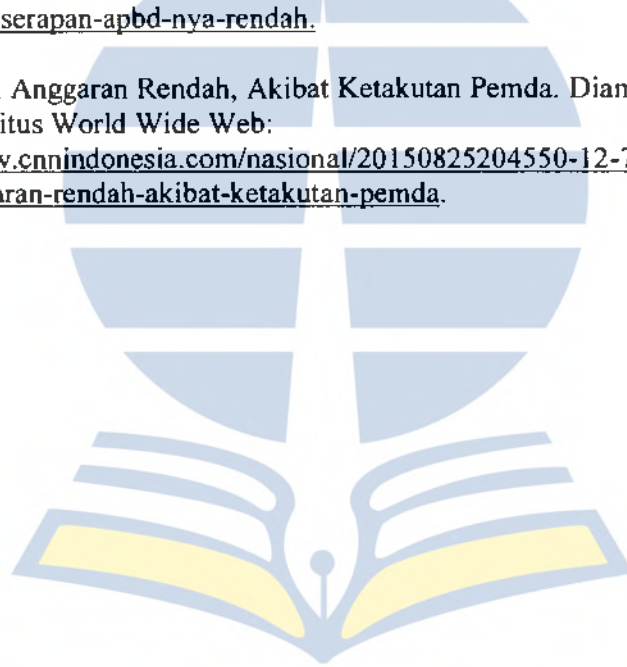
<https://bisnis.tempo.co/read/667640/genjot-pertumbuhan-jokowi-minta-penyerapan-anggaran-dikebut>

Jokowi Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Serapan APBD-nya Rendah. Diambil 15 Desember 2017, dari situs World Wide Web:

<https://news.detik.com/berita/d-3598051/jokowi-ancam-sanksi-kepala-daerah-yang-serapan-apbd-nya-rendah>.

Penyerapan Anggaran Rendah, Akibat Ketakutan Pemda. Diambil 4 Januari 2018, dari situs World Wide Web:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150825204550-12-74471/penyerapan-anggaran-rendah-akibat-ketakutan-pemda>.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ – UT) Medan
Jl. Bromo No. 29 Medan, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai Kode Pos 20228
Telepon : 061 – 7323795, 7326261, Faksimile : 061 – 7326260
Laman : ut-medan@ut.ac.id

Nomor : 2103 / UN31.23/KM/2018

Medan, 10 Mei 2018

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Hal : Izin Melakukan Penelitian dan Penyebaran Kuisisioner

Yth. : Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Aceh di Tempat

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik dibawah ini:

Nama : Ferhad Akbar

NIM : 500693552

Judul TAPM : “Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh”

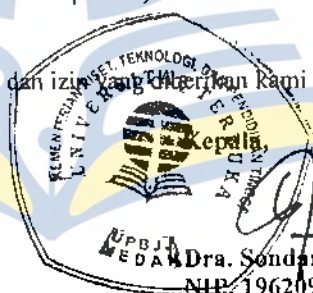
Email : ferhadakbar@gmail.com

Nomor HP : 0813 6611 5453

Sedang melaksanakan penelitian dalam rangka Tugas Akhir Program Magister (TAPM), dengan ini kami mohon agar yang bersangkutan diberi izin dan bantuan dalam menyebarkan kuisisioner pada dinas/badan/kantor pengelola DAK Fisik TA. 2017 lingkup Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang Bapak pimpin.

Penyebaran kuisisioner berbentuk cetakan (terlampir) atau kuisisioner online melalui link <https://goo.gl/forms/kVQICaCVQC09ORft1> kepada pengelola (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Pejabat Pengadaan, Tim Monev/Pelaporan dan Operator) DAK Fisik TA. 2017 per bidang/subbidang.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.



Dra. Sondang P. Pakpahan, M.A
NIP. 19620911 198803 2 003

Tembusan;

1. Gubernur Provinsi Aceh
2. Para Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se Provinsi Aceh



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA 'A' LANTAI II JALAN TOK CHIK OTIRO BANDA ACEH-23241
TELP. (0851) 31970 FAKS (0851) 31094 SITUS: www.djpb.kemkeu.go.id/karpi/aceh

Nomor : S-902/WPB.01/2018 24 April 2018
Sifat : Segera
Hal : Permohonan Bantuan Penelitian Pegawai
Tugas Belajar a.n. Ferhad Akbar

Yth. Para Kepala KPPN Lingkup Karwil DJPb Provinsi Aceh

Sehubungan dengan Surat Kepala UPBJJ-UT Medan Nomor 1541/JN31.23/KM/2018 tanggal 12 April 2018 hal Izin Melakukan Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa pegawai yang menjalani pendidikan di luar kedinasan sebagai berikut:

Nama / NIP : Ferhad Akbar / 198311072002121001
Pangkat (Gol.) : Penata Muda (III/a)
Unit Organisasi : KPPN Kutacane
Program Pendidikan : Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka
Judul Tugas Akhir : Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh.
Email : ferhadakbar@gmail.com
Nomor HP : 081368115453

Sedang memulai tugas akhir/tesisnya dengan target penelitian pada unit kerja Saudara.

Terkait dengan hal tersebut, dimohon bantuannya memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan data dan survey yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan, yang antara lain:

1. pengumpulan data terkait penyaluran DAK Fisik TA 2017 lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, serta
2. menyebarkan kuisisioner kepada Pemerintah Daerah Pengelola DAK Fisik TA 2017 di Provinsi Aceh melalui KPPN lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Untuk informasi dan koordinasi lanjutan terkait teknis pelaksanaan penelitian, pegawai dimaksud akan menghubungi lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

... Kepala Kanwil,

Zaid Burhan Ibrahim
NIP. 197203011997031001

Tembusan:
Pegawai yang bersangkutan

3. c. Umur Responden **Tandai satu oval saja.*

- ≤30 tahun
- 31 - 40 Tahun
- 41 - 50 Tahun
- ≥50 Tahun

4. d. Tingkat Pendidikan **Tandai satu oval saja.*

- SMU/Sederajat
- Diploma I/II
- Diploma III
- Diploma IV/S1
- S2/S3

5. e. Bidang Pendidikan Terakhir **Tandai satu oval saja.*

- Ekonomi/Keuangan
- Teknik dan IT
- Kesehatan
- Hukum
- Pendidikan
- Sosial/Pemerintahan
- lainnya

6. f. Masa Kerja PNS **Tandai satu oval saja.*

- 1 s.d. 10 Tahun
- 11 s.d. 20 Tahun
- Lebih dari 20 Tahun

7. g. Jabatan Pada Tim DAK Fisik TA. 2017 **Tandai satu oval saja.*

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM)
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bendahara DAK Fisik TA. 2017
- Pejabat Pengadaan
- Tim Monev/Pelaporan/Lainnya



8. h. Pengalaman pada kegiatan DAK Fisik *

Tandai satu oval saja.

- ≤ 1 Tahun
- 1 s.d. 3 Tahun
- 4 - 5 tahun
- ≥ 5 Tahun

9. i. Kursus/Diklat/Bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan DAK Fisik/Pengadaan Barang dan Jasa dan penyusunan laporan keuangan yang telah Bapak/Ibu ikuti : *

Tandai satu oval saja.

- Tidak Pernah
- 1 - 2 Kali (Pernah)
- 3 - 5 Kali (Jarang)
- 6 - 10 Kali (Sering)
- ≥10 Kali Kali (Sangat Sering)

10. j. Asal Instansi ***11. Jenis DAK Fisik ***

Tandai satu oval saja.

- Reguler
- Penugasan
- Afirmasi
- Tambahan



12. k. Pemerintah Daerah Tempat Bertugas **Tandai satu oval saja.*

- Kabupaten Aceh Selatan
- Kabupaten Aceh Tenggara
- Kabupaten Aceh Timur
- Kabupaten Aceh Tengah
- Kabupaten Aceh Barat
- Kabupaten Aceh Besar
- Kabupaten Pidie
- Kabupaten Aceh Utara
- Kabupaten Simeulue
- Kabupaten Aceh Singkil
- Kabupaten Bireuen
- Kabupaten Aceh Barat Daya
- Kabupaten Gayo Lues
- Kabupaten Aceh Jaya
- Kabupaten Nagan Raya
- Kabupaten Aceh Tamiang
- Kabupaten Bener Meriah
- Kabupaten Pidie Jaya
- Kota Banda Aceh
- Kota Sabang
- Kota Lhokseumawe
- Kota Langsa
- Kota Subulussalam
- Provinsi Aceh

13. l. KPPN tempat pencairan DAK Fisik TA. 2017 **Tandai satu oval saja.*

- KPPN Banda Aceh
- KPPN Kutacane
- KPPN Takengon
- KPPN Meulaboh
- KPPN Lhokseumawe
- KPPN Langsa
- KPPN Tapaktuan

Petunjuk Pengisian

Petunjuk pengisian

Jawablah PERNYATAAN di bawah ini dengan memilih angka yang menunjukkan tingkat persetujuan

masing-masing pertanyaan terhadap penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017 pada organisasi anda:

1= Sangat Tidak Setuju

2= Tidak Setuju

3= Netral

4= Setuju

5= Sangat Setuju

CATATAN: HARAP DIJAWAB SESUAI DENGAN KEADAAN SEBENARNYA. TIDAK ADA JAWABAN YANG BENAR ATAU SALAH

PENYERAPAN ANGGARAN (Y)

14. 1. Penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017 mencapai 100% dari Pagu Anggaran. *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

15. 2. Tingkat penyerapan anggaran DAK Fisik TA. selalu meningkat dari tahun ke tahun. *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

16. 3. Waktu penyerapan anggaran DAK Fisik TA. 2017 tiap tahapan TIDAK mendekati batas AKHIR pencairan dana. *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

17. 4. Penyerapan DAK Fisik TA. 2017 TIDAK menumpuk diakhir tahun anggaran. *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

PERENCANAAN (X1)

18. **5. Program kegiatan DAK Fisik TA. 2017 yang diusulkan sesuai dengan kegiatan yang disetujui oleh Pemerintah Pusat. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

19. **6. Perencanaan kegiatan DAK Fisik TA. 2017 telah sesuai untuk memenuhi kebutuhan standart pelayanan minimum pada masyarakat. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

20. **7. RAB telah sesuai dengan harga pasar ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

21. **8. Mudah untuk menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

22. **9. Masa penyusunan dan penelaahan anggaran DAK Fisik 2017 sudah sesuai kebutuhan ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

23. **10. Pelaksanaan program telah dilaksanakan dengan memperhitungkan kelayakan kegiatan. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

24. 11. Sebelum penyusunan anggaran DAK Fisik 2017, telah dilakukan evaluasi anggaran tahun sebelumnya. *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

SUMBER DAYA MANUSIA (X2)

25. 12. Aparatur pelaksana kegiatan DAK Fisik TA. 2017 adalah SDM yang berkompeten pada bidangnya. *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

26. 13. Pemerintah Daerah memiliki lebih dari 3 pejabat pengadaan barang/jasa bersertifikasi. *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

27. 14. Tersediannya Diklat/sosialisasi/pelatihan DAK Fisik TA. 2017 yang cukup sebagai bekal melaksanakan kegiatan dimaksud. *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

28. 15. Tidak ada rangkap tugas atau jabatan panitia pengadaan dengan jabatan lainnya dalam pengelolaan DAK Fisik TA. 2017. *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

29. 16. Tida ada kekhawatiran para pelaksana kegiatan DAK Fisik TA. 2017 akibat pemberitaan penangkapan dengan tuduhan korupsi. *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

30. **17. Adanya keseimbangan antara resiko pekerjaan dengan imbalan/honor yang diterima sebagai pelaksana kegiatan DAK Fisik 2017. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

31. **18. Dorongan dan bimbingan dari pimpinan sangat dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan ini. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

32. **19. Pejabat/Pegawai pengelola kegiatan DAK Fisik TA. 2017 tidak mengalami mutasi. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

ADMINISTRASI (X3)

33. **20. SK Tim Pelaksana DAK Fisik TA. 2017 diterbitkan tepat waktu. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

34. **21. SK penunjukan panitia lelang ditetapkan tepat waktu sehingga jadwal PBJ sesuai jadwal. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

35. **22. SK penunjukan panitia swakelola ditetapkan sesuai jadwal sehingga jadwal PBJ sesuai rencana. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

36. **23. Aturan mengenai mekanisme pencairan DAK Fisik TA. 2017 mudah dipahami dan dilaksanakan. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

37. **24. Aturan mengenai pengadaan barang/jasa DAK Fisik TA. 2017 mudah dipahami dan dilaksanakan. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

38. **25. DIPA DAK Fisik TA. 2017 diterima pada awal tahun anggaran. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

39. **26. DIPA DAK Fisik TA. 2017 TIDAK perlu direvisi karena adanya telah sesuai dengan kebutuhan. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

40. **27. DIPA tambahan DAK Fisik TA. 2017 diterima sesuai jadwal dan kebutuhan. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

PENGADAAN BARANG/JASA (X4)

41. **28. Pelaksanaan pelelangan pengadaan telah dilakukan sesuai jadwal. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

42. **29. Penetapan pemenang tender telah sesuai dengan jadwal. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

43. **30. Tersedianya Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada pemerintah daerah. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

44. **31. Berkas pengadaan kontrak dan lelang sudah lengkap saat pengajuan tagihan. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

45. **32. Dokumen kontrak ditandatangani tepat waktu. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

46. **33. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) telah ditandatangani sesuai jadwal. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

47. **34. Addendum kontrak TIDAK mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

48. **35. Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses lelang TIDAK mengganggu kegiatan DAK Fisik TA. 2017. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat tidak Setuju Sangat Setuju

49. **36. TIDAK ada sanggahan dari peserta lelang, sehingga pengadaan sesuai jadwal. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

50. **37. Penyedia barang/jasa mampu memenuhi kewajibannya sesuai kontrak baik waktu dan kualitas pekerjaan. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

PERUBAHAN KANTOR BAYAR (Z)

51. **38. Saya merasa bahwa pembayaran DAK Fisik TA. 2017 melalui KPPN daerah mendekati pelayanan kepada Pemerintah Daerah. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

52. **39. Saya merasa pelayanan pembayaran DAK Fisik TA. 2017 melalui KPPN daerah mempercepat penyerapan anggaran. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

53. **40. Pembayaran DAK Fisik TA. 2017 melalui KPPN daerah meningkatkan efisiensi dan memudahkan koordinasi dalam penyerapan anggaran. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

54. **41. Pembayaran DAK Fisik TA. 2017 melalui KPPN daerah memudahkan pemerintah daerah dalam berkonsultasi dalam penyerapan anggaran. ***

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

55. 42. Saya merasa bahwa pembayaran DAK Fisik TA. 2017 melalui KPPN daerah dapat meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi. *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju



Sangat Setuju


Pertanyaan Terbuka Untuk Responden

56. 43. Saran dan Masukan Saudara dalam rangka percepatan penyerapan DAK Fisik pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh dimasa mendatang

.....

.....

.....

Diberdayakan oleh
 Google Forms



TABULASI DATA

X3 (administrasi)									X4 (pengadaan barang jasa)									Z, perubahan Kantor Bayar							
ADM									PBJ									PKB							
20	21	22	23	24	25	26	27	Σ	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	Σ	38	39	40	41	42	
4	4	4	4	4	5	4	4	33	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	46	4	4	4	5	4	21
5	3	4	5	5	5	5	5	37	3	3	4	5	4	4	5	2	2	5	37	5	5	5	5	5	25
4	4	4	5	5	5	5	1	33	1	2	5	5	5	5	1	2	1	5	32	5	5	5	5	5	25
3	3	3	4	4	4	2	3	26	3	4	4	4	4	5	4	3	3	4	38	4	4	3	4	4	19
4	4	3	3	4	3	3	3	27	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38	5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	38	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	25
4	5	5	4	4	5	4	5	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3	3	3	3	3	15
5	4	4	2	2	5	5	5	32	2	2	5	2	1	5	3	1	1	2	24	4	4	4	4	4	20
4	4	4	3	3	4	4	4	30	4	2	4	3	3	3	4	2	3	3	31	4	4	4	4	4	20
4	4	4	3	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	25
3	4	4	4	4	3	3	3	28	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	37	4	4	4	5	4	21
3	4	4	2	3	4	2	4	26	3	4	5	4	4	4	4	1	4	3	36	5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	3	2	4	29	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41	2	2	2	3	2	11
2	3	3	5	3	5	5	2	28	1	1	5	5	5	5	5	3	3	3	36	5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	4	4	3	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	3	3	30	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	4	4	38	4	3	3	4	5	4	4	4	4	4	39	5	5	5	5	5	25
3	4	4	3	3	4	3	2	26	4	4	5	4	4	3	4	3	3	4	38	5	5	5	4	4	23
5	5	5	2	4	4	4	4	33	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	38	4	4	4	4	4	20
1	4	1	4	4	4	3	3	24	4	4	4	4	3	3	4	2	4	4	36	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	25
5	2	5	5	5	5	5	5	37	5	5	5	5	5	5	2	5	2	5	44	5	5	5	5	5	25
5	3	5	5	5	5	5	5	38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	25
5	5	5	4	4	5	5	5	38	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48	5	5	5	5	5	25
3	3	4	4	4	3	4	4	29	4	4	5	5	5	5	4	4	3	4	43	5	5	4	4	5	23
4	4	4	4	4	2	2	4	28	4	4	4	5	4	5	4	2	4	4	40	4	4	4	4	4	20
4	4	4	2	3	4	3	3	27	4	3	4	4	4	4	2	3	3	3	34	3	3	3	4	3	16
5	4	4	4	5	5	4	4	35	4	4	4	4	4	5	3	3	4	4	39	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	5	5	4	4	4	22
1	2	3	4	3	4	5	5	27	1	3	5	5	2	4	4	2	3	3	32	4	4	4	4	4	20
3	3	3	4	4	3	4	3	27	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	37	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	3	4	3	30	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	45	5	5	5	5	5	25
1	1	1	4	4	1	1	1	14	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	37	4	4	4	4	4	20
4	4	4	3	3	2	4	1	25	2	4	5	4	4	4	3	4	4	4	38	5	5	5	5	5	25
3	4	4	2	3	2	3	3	24	3	4	5	5	4	4	2	3	3	4	37	3	4	4	4	4	19
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	20
5	5	5	3	3	2	4	2	29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	4	3	3	4	26	4	3	4	4	4	4	3	2	3	3	34	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	42	5	5	4	5	5	24
4	4	4	4	4	4	2	3	29	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	37	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	3	3	3	3	28	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	38	3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	3	3	3	29	3	2	4	4	4	5	1	5	5	5	38	4	5	5	5	5	24
3	3	3	3	4	4	4	4	28	3	3	3	3	3	5	4	5	4	4	38	5	5	5	5	5	25
3	4	4	3	3	3	3	3	26	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	43	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	3	4	4	4	31	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	46	4	4	4	4	4	20

3	4	4	4	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	37	4	4	4	4	4	20
2	2	3	4	4	2	4	3	24	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	38	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	4	4	30	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	38	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	3	3	30	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	38	4	4	4	4	4	20
2	5	5	4	4	3	5	2	30	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42	4	4	4	4	4	20
3	4	4	2	2	2	2	3	22	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	44	4	3	3	3	3	16
5	5	5	4	4	4	4	4	35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	20
3	3	4	4	4	4	4	4	30	4	5	5	5	5	5	4	1	1	3	38	5	5	5	5	5	25
2	2	2	3	3	5	3	5	25	3	3	4	5	3	4	2	2	4	3	33	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	3	3	3	29	4	4	5	5	4	4	3	3	3	3	38	5	5	5	5	5	25
5	3	3	5	5	5	3	5	34	3	3	5	5	5	5	5	3	3	5	42	5	5	5	5	5	25
1	4	3	3	5	1	5	1	23	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48	5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	5	4	4	4	36	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	41	4	3	4	3	4	18
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	3	19
3	3	3	4	4	4	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	3	3	3	3	15
3	3	4	4	3	3	3	4	27	5	5	3	5	5	4	3	3	4	5	42	4	4	3	4	3	18
4	4	4	4	4	5	4	4	33	3	3	4	5	4	4	4	3	3	3	36	3	3	3	4	4	17
4	4	5	4	4	4	4	3	32	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	38	3	3	3	3	4	16
4	4	4	4	4	5	4	4	33	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	40	4	4	4	4	4	20
3	3	4	3	3	4	3	4	27	3	3	4	4	4	3	4	4	3	36	4	4	4	4	4	4	20
1	4	4	1	4	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	2	2	5	5	44	5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	4	2	2	5	43	5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	4	3	3	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3	3	3	3	4	16	
4	4	4	3	3	4	3	4	29	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	2	4	30	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	5	5	4	22	
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	20	
5	5	5	4	4	5	3	4	35	4	4	5	4	4	4	4	2	3	4	38	3	3	3	3	3	15
3	5	5	4	3	3	3	4	30	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	37	4	4	4	4	4	20
4	4	4	3	3	4	4	3	29	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	36	4	4	4	4	5	21
3	3	3	3	3	4	3	3	25	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	32	3	3	3	3	3	15
4	4	4	5	4	4	4	4	33	4	2	4	4	4	3	2	2	2	4	31	5	5	5	5	5	25
4	4	4	5	4	4	4	4	33	3	2	4	4	4	3	2	2	2	4	30	5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	4	4	4	37	4	4	4	5	5	5	4	5	5	46	4	4	4	4	4	20	
4	4	3	3	4	4	3	3	28	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	38	3	3	3	3	3	15
5	4	5	5	4	5	5	5	38	4	4	5	5	5	4	4	5	5	46	5	5	5	5	4	24	
4	4	4	4	4	4	4	3	31	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	37	4	4	4	4	4	20
3	3	3	4	4	4	4	3	28	3	4	4	5	4	4	3	4	4	39	4	4	4	4	4	4	20
4	5	5	4	4	4	3	4	33	4	4	5	5	5	5	4	2	2	4	40	4	4	4	4	4	20
3	3	3	4	3	3	3	3	25	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	32	4	3	3	4	4	18
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	2	2	4	36	4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	2	5	2	5	5	34	5	5	5	5	5	5	2	5	2	2	41	5	5	5	5	5	25
3	4	4	4	4	3	4	4	30	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	38	3	4	4	4	4	19
4	4	4	4	4	3	4	4	31	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	37	4	3	3	4	4	18
5	5	5	5	5	5	4	5	39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	4	4	3	31	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	36	3	4	3	4	4	18
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	25
4	4	4	3	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	2	3	4	37	4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49	5	5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39	4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	5	1	5	36	1	1	5	5	1	5	5	3	1	3	30	5	5	5	5	5	25

5	5	5	4	4	5	4	4	36	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	39	5	5	5	5	5	25
3	3	3	4	4	4	3	4	28	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	44	5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	5	5	5	40	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	46	5	5	5	5	4	24
4	4	4	4	4	5	4	2	31	4	4	5	5	4	4	4	2	4	4	40	4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	36	4	4	4	4	4	20
4	2	3	4	4	4	4	4	29	2	4	4	4	4	4	4	2	2	4	34	4	4	4	5	4	21
5	5	5	5	3	3	4	3	33	3	4	5	5	4	4	4	3	3	4	39	4	5	5	4	4	22
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3	4	3	3	4	17
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	20
4	4	4	3	3	4	3	4	29	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39	4	4	5	5	4	22
4	4	4	4	4	3	3	3	29	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	43	5	5	5	5	5	25
1	1	1	4	4	1	3	3	18	3	4	4	5	5	5	2	2	4	5	39	5	4	4	4	5	22
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4	34	5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	20



HASIL PENGOLAHAN DATA

1. Analisa Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOT_PA	120	8	20	15.37	2.557
TOT_PRC	120	20	35	29.12	3.157
TOT_SDM	120	21	40	31.13	4.299
TOT_ADM	120	14	40	31.18	4.783
TOT_PBJ	120	24	50	39.45	5.014
TOT_PKB	120	11	25	21.10	3.174
Valid N (listwise)	120				

2. Uji Validitas

a. Penyerapan Anggaran (Y)

Correlations

		PA1	PA2	PA3	PA4	TOT_PA
PA1	Pearson Correlation	1	.493**	.087	.158	.630**
	Sig. (2-tailed)		.000	.344	.085	.000
	N	120	120	120	120	120
PA2	Pearson Correlation	.493**	1	.218*	.200*	.672**
	Sig. (2-tailed)	.000		.017	.029	.000
	N	120	120	120	120	120
PA3	Pearson Correlation	.087	.218*	1	.511**	.691**
	Sig. (2-tailed)	.344	.017		.000	.000
	N	120	120	120	120	120
PA4	Pearson Correlation	.158	.200*	.511**	1	.712**
	Sig. (2-tailed)	.085	.029	.000		.000
	N	120	120	120	120	120
TOT_PA	Pearson Correlation	.630**	.672**	.691**	.712**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Perencanaan (X1)

		Correlations							
		PRC1	PRC2	PRC3	PRC4	PRC5	PRC6	PRC7	TOT_PRC
PRC1	Pearson Correlation	1	.412**	.262**	.277**	.297**	.416**	.442**	.612**
	Sig. (2-tailed)		.000	.004	.002	.001	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
PRC2	Pearson Correlation	.412**	1	.524**	.498**	.490**	.530**	.382**	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
PRC3	Pearson Correlation	.262**	.524**	1	.495**	.450**	.494**	.305**	.712**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000		.000	.000	.000	.001	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
PRC4	Pearson Correlation	.277**	.498**	.495**	1	.336**	.412**	.237**	.681**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000		.000	.000	.009	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
PRC5	Pearson Correlation	.297**	.490**	.450**	.336**	1	.652**	.295**	.736**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000		.000	.001	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
PRC6	Pearson Correlation	.416**	.530**	.494**	.412**	.652**	1	.454**	.804**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
PRC7	Pearson Correlation	.442**	.382**	.305**	.237**	.295**	.454**	1	.606**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.009	.001	.000		.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120
TOT_PRC	Pearson Correlation	.612**	.774**	.712**	.681**	.736**	.804**	.606**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	120	120	120	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Sumber Daya Manusia (X2)

		Correlations								
		SDM1	SDM2	SDM3	SDM4	SDM5	SDM6	SDM7	SDM8	TOT SDM
SDM1	Pearson Correlation	1	.330**	.369**	.166	.303**	.111	.330**	.402**	.601**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.070	.001	.227	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
SDM2	Pearson Correlation	.330**	1	.361**	.279**	.093	.251**	.279**	.145	.549**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.002	.314	.006	.002	.113	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
SDM3	Pearson Correlation	.369**	.361**	1	.332**	.291**	.353**	.255**	.147	.662**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.001	.000	.005	.109	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
SDM4	Pearson Correlation	.166	.279**	.332**	1	.225*	.223*	.212*	.257**	.588**
	Sig. (2-tailed)	.070	.002	.000		.013	.015	.020	.005	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
SDM5	Pearson Correlation	.303**	.093	.291**	.225*	1	.280**	.241**	.086	.546**
	Sig. (2-tailed)	.001	.314	.001	.013		.002	.008	.352	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
SDM6	Pearson Correlation	.111	.251**	.353**	.223*	.280**	1	.198*	.177	.616**
	Sig. (2-tailed)	.227	.006	.000	.015	.002		.030	.054	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
SDM7	Pearson Correlation	.330**	.279**	.255**	.212*	.241**	.198*	1	.311**	.551**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.005	.020	.008	.030		.001	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
SDM8	Pearson Correlation	.402**	.145	.147	.257**	.086	.177	.311**	1	.553**
	Sig. (2-tailed)	.000	.113	.109	.005	.352	.054	.001		.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
TOT_SDM	Pearson Correlation	.601**	.549**	.662**	.588**	.546**	.616**	.551**	.553**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

d. Administrasi (X3)

		Correlations								TOT_ADM
		ADM1	ADM2	ADM3	ADM4	ADM5	ADM6	ADM7	ADM8	
ADM1	Pearson Correlation	1	.604**	.730**	.366**	.377**	.512**	.305**	.470*	.808**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
ADM2	Pearson Correlation	.604**	1	.789**	.143	.255**	.306**	.261**	.235*	.653**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.120	.005	.001	.004	.010	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
ADM3	Pearson Correlation	.730**	.789**	1	.266**	.294**	.396**	.405**	.417*	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.003	.001	.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
ADM4	Pearson Correlation	.366**	.143	.266**	1	.610**	.405**	.312**	.272*	.596**
	Sig. (2-tailed)	.000	.120	.003		.000	.000	.001	.003	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
ADM5	Pearson Correlation	.377**	.255**	.294**	.610**	1	.345**	.375**	.341*	.623**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.001	.000		.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
ADM6	Pearson Correlation	.512**	.306**	.396**	.405**	.345**	1	.402**	.579*	.732**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
ADM7	Pearson Correlation	.305**	.261**	.405**	.312**	.375**	.402**	1	.330*	.614**
	Sig. (2-tailed)	.001	.004	.000	.001	.000	.000		.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
ADM8	Pearson Correlation	.470**	.235**	.417**	.272**	.341**	.579**	.330**	1	.677**
	Sig. (2-tailed)	.000	.010	.000	.003	.000	.000	.000		.000

	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
TOT_AD	Pearson	.808**	.653**	.786**	.596**	.623**	.732**	.614**	.677*	1
M	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

e. Pengadaan Barang/Jasa (X4)

		Correlations										
		PBJ1	PBJ2	PBJ3	PBJ4	PBJ5	PBJ6	PBJ7	PBJ8	PBJ9	PBJ10	TOT_PBJ
PBJ1	Pearson	1	.726**	.061	.143	.524**	.148	.151	.427**	.394**	.379**	.651**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)		.000	.507	.120	.000	.106	.099	.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
PBJ2	Pearson	.726**	1	.236**	.344**	.567**	.314**	.187*	.408**	.392**	.445**	.733**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.000		.009	.000	.000	.000	.041	.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
PBJ3	Pearson	.061	.236**	1	.558**	.339**	.510**	.199*	.139	.012	.201*	.445**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.507	.009		.000	.000	.000	.030	.130	.897	.028	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
PBJ4	Pearson	.143	.344**	.558**	1	.564**	.523**	.200*	.238**	.158	.441**	.591**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.120	.000	.000		.000	.000	.029	.009	.085	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
PBJ5	Pearson	.524**	.567**	.339**	.564**	1	.469**	.191*	.376**	.327**	.601**	.752**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.037	.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
PBJ6	Pearson	.148	.314**	.510**	.523**	.469**	1	.293**	.216*	.183*	.443**	.586**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.106	.000	.000	.000	.000		.001	.018	.045	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
PBJ7	Pearson	.151	.187*	.199*	.200*	.191*	.293**	1	.374**	.381**	.312**	.535**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.099	.041	.030	.029	.037	.001		.000	.000	.001	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

PBJ8	Pearson Correlation	.427**	.408**	.139	.238**	.376**	.216*	.374**	1	.528**	.324**	.690**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.130	.009	.000	.018	.000	.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
PBJ9	Pearson Correlation	.394**	.392**	.012	.158	.327**	.183*	.381**	.528**	1	.460**	.659**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.897	.085	.000	.045	.000	.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
PBJ10	Pearson Correlation	.379**	.445**	.201*	.441**	.601**	.443**	.312**	.324**	.460**	1	.705**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.028	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
TOT_PBJ	Pearson Correlation	.651**	.733**	.445**	.591**	.752**	.586**	.535**	.690**	.659**	.705**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

f. Perubahan Kantor Bayar (Z)

		Correlations					
		PKB1	PKB2	PKB3	PKB4	PKB5	TOT PKB
PKB1	Pearson Correlation	1	.902**	.872**	.833**	.841**	.945**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120
PKB2	Pearson Correlation	.902**	1	.916**	.862**	.851**	.963**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120
PKB3	Pearson Correlation	.872**	.916**	1	.873**	.824**	.954**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120
PKB4	Pearson Correlation	.833**	.862**	.873**	1	.808**	.928**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120
PKB5	Pearson Correlation	.841**	.851**	.824**	.808**	1	.917**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	120	120	120	120	120	120
TOT_PKB	Pearson Correlation	.945**	.963**	.954**	.928**	.917**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	120	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Uji Realibilitas

a. Penyerapan Anggaran (Y)

```
RELIABILITY
/VARIABLES=PA1 PA2 PA3 PA4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
```

Reliability

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	120	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	120	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.602	4

b. Perencanaan (X1)

```
RELIABILITY
/VARIABLES=PRC1 PRC2 PRC3 PRC4 PRC5 PRC6 PRC7
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
```

Reliability

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	120	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	120	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.627	7

c. Sumber Daya Manusia (X2)

RELIABILITY

```

/VARIABLES=SDM1 SDM2 SDM3 SDM4 SDM5 SDM6 SDM7 SDM8
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

[DataSet0]

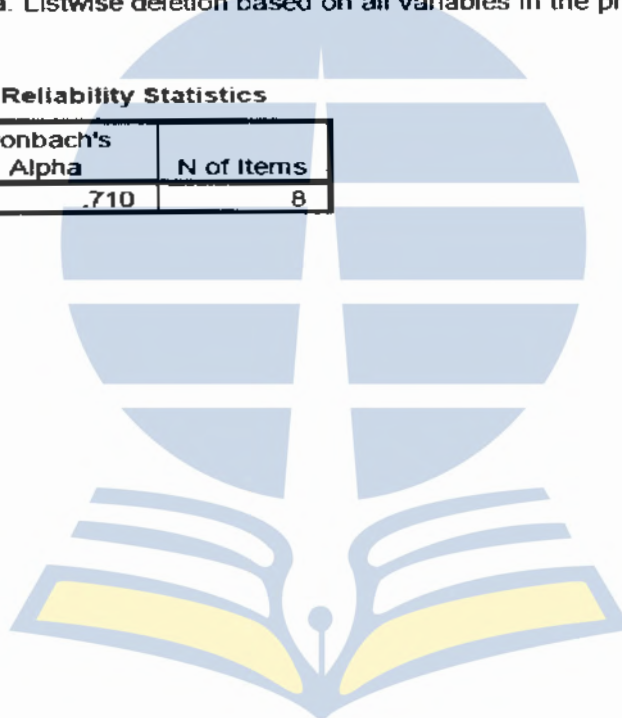
Scale: ALL VARIABLES**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	120	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	120	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.710	8



d. Administrasi (X3)

RELIABILITY

```

/VARIABLES=ADM1 ADM2 ADM3 ADM4 ADM5 ADM6 ADM7 ADM8
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	120	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	120	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.840	8

e. Pengadaan Barang/Jasa (X4)

RELIABILITY

```

/VARIABLES=PBJ1 PBJ2 PBJ3 PBJ4 PBJ5 PBJ6 PBJ7 PBJ8 PBJ9 PBJ10
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	120	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	120	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.831	10

f. Perubahan Kantor Bayar (Z)

RELIABILITY

```

/VARIABLES=PKB1 PKB2 PKB3 PKB4 PKB5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

[DataSet0] C:\Users\user\Documents\21052018\data21052018.sav

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

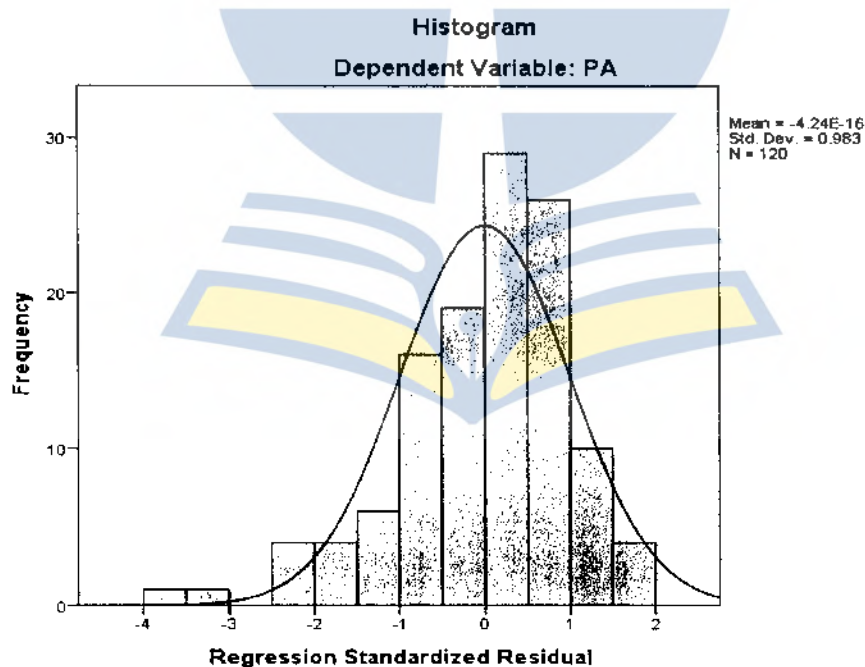
		N	%
Cases	Valid	120	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	120	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

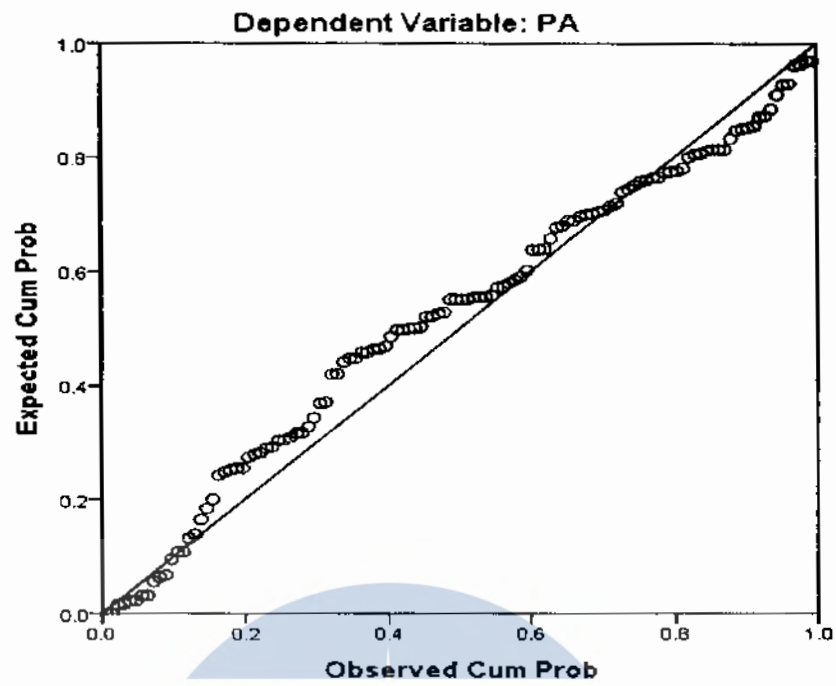
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.968	5

4. Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.28653071
	Absolute	.108
Most Extreme Differences	Positive	.058
	Negative	-.108
Kolmogorov-Smirnov Z		1.183
Asymp. Sig. (2-tailed)		.122

a. Test distribution is Normal.

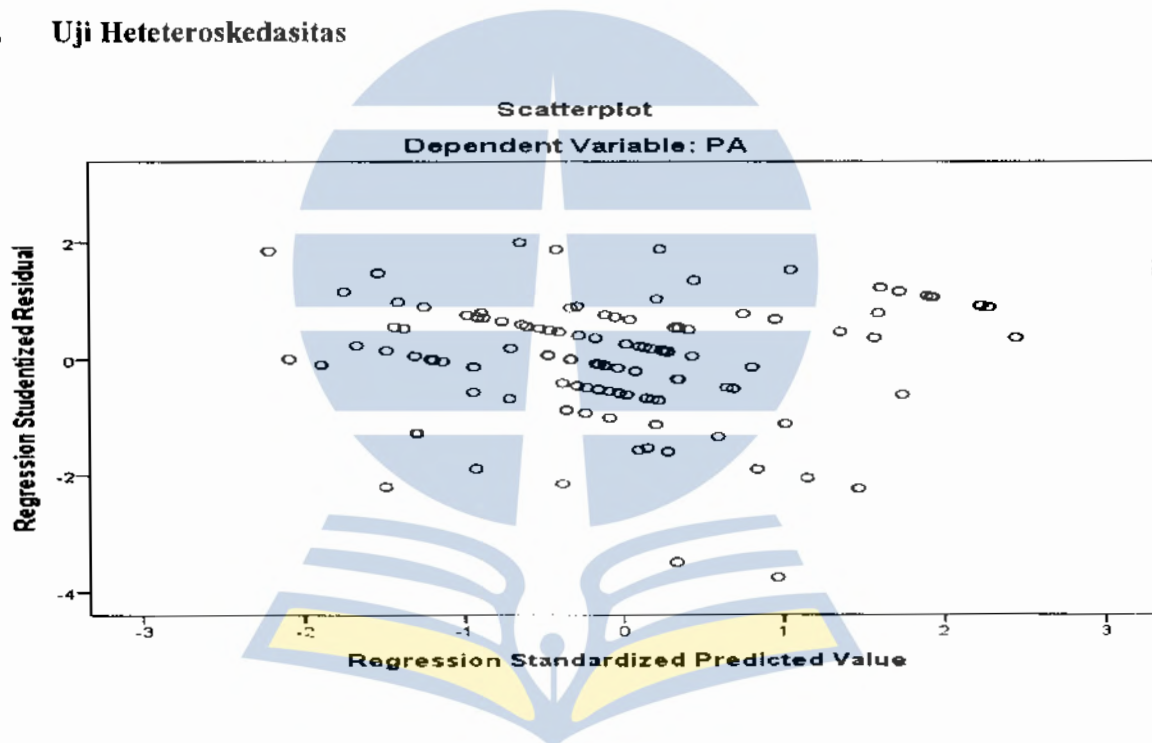
b. Calculated from data.

5. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	6.773	2.209		3.067	.003		
	TOT_PRC	-.059	.081	-.073	-.725	.470	.692	1.445
	TOT_SDM	.168	.064	.283	2.627	.010	.598	1.671
	TOT_ADM	.105	.057	.196	1.826	.071	.603	1.658
	TOT_PBJ	.046	.054	.090	.850	.397	.626	1.597

a. Dependent Variable: TOT_PA

6. Uji Heteroskedastisitas



7. Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.773	2.209		3.067	.003
1 TOT_PRC	-.059	.081	-.073	-.725	.470
TOT_SDM	.168	.064	.283	2.627	.010
TOT_ADM	.105	.057	.196	1.826	.071
TOT_PBJ	.046	.054	.090	.850	.397

a. Dependent Variable: TOT_PA

8. Uji Kofisien Diterminasi Adjusted R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.448 ^a	.200	.173	2.326

a. Predictors: (Constant), TOT_PBJ, TOT_PRC, TOT_ADM, TOT_SDM

9. Uji F/Uji Simultan

Model		Sun of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	155.967	4	38.992	7.207	.000 ^b
	Residual	622.158	115	5.410		
	Total	778.125	119			

a. Dependent Variable: TOT_PA

b. Predictors: (Constant), TOT_PBJ, TOT_PRC, TOT_ADM, TOT_SDM

10. Uji T/Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.773	2.209		3.067	.003
1 TOT_PRC	-.059	.081	-.073	-.725	.470
TOT_SDM	.168	.064	.283	2.627	.010
TOT_ADM	.105	.057	.196	1.826	.071
TOT_PBJ	.046	.054	.090	.850	.397

a. Dependent Variable: TOT_PA

11. Hasil Uji Residual

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.482	2.542		1.370	.173
1 PRC	.281	.093	.280	3.007	.003
SDM	.222	.074	.300	3.005	.003
ADM	.034	.066	.052	.518	.605
PBJ	-.037	.062	-.059	-.601	.549

a. Dependent Variable: PKB

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.912	1.027		2.834	.005
PA	-.067	.066	-.094	-1.023	.308

a. Dependent Variable: AbsRes_1

No	Nama Responden	44. Saran dan Masukan Saudara dalam rangka percepatan penyerapan DAK Fisik pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh dimasa mendatang
1	zakaria	Semoga lebih baik lagi
2	Deden sumoharjo. SP.MP	-
3	Nopal	Regulasi tentang Pengelolaan kalau bisa II min 1, jangan di tahun berjalan.
4	Ferri Yanto, SE, MM	-
5	Aris SE	-
6	Sri malinda	Pencairan untuk tahap tahap selanjutnya agar dipercepat maksimal 7 hari setelah dokumen realisasi anggaran diterima oleh KPPN.
7	Samsul Bahri	Proses Lelang di percepat
8	Abdi Ramadhansyah	Untuk DAK agar proses penyerapan anggara di lakukan di awal tahun untuk memudahkan proses pekerjaan Fisik
9	HAMZAH FANSYURI	-
10	Hernansyah	Aturan atas persyaratan penyaluran DAK Fisik serta kesiapan Aplikasi OMSPAN diharapkan hadir lebih cepat
11	Fajri	Jangka waktu pendaftaran kontrak diharapkan lebih panjang
12	Muamar	Sering dilakukan Sosialisasi serta Rapat antar KPPN dengan Pemda khususnya SKPD tidak hanya dengan BPKD
13	Yusmiati	-
14	ISHAK	Hendaknya KPPN Daerah meningkatkan evaluasi kembali atau monitoring kepada skpk yang mengelola DAK untuk efektivitas penyerapan Anggaran ditahun mendatang.
15	Jufriadi	1. Adanya diklat/bimbingan/teknis percepatan penyerapan DAK fisik. 2. Mempercepat proses lelang DAK Fisik untuk percepatan penyerapan Dana. 3. Untuk penandatanganan di laporan agar dapat dilakukan oleh sekda atau kapala BPKD selain Walikota dan wakil walikota 4. Bagi SKPD yg pengelolaan DAK fisik harus ada SDM yg memahami dan memadai. Juknis jangan terlalu membatasi penggunaan barang/jasa hanya pada tempat tertentu
16	Lisa asmira	-
17	Rizal Salihin	-
18	Anizar	-
19	S.maimun	Juknis dan juklak DAK di terbitkan sebelum pembahasan anggaran APBK
20	Asri, SE	Penyaluran DANA ke RKUD sesuai Jadwal/Tepat Waktu,!
21	Della Mutia	-
22	YUS EDARNI	-
23	Andri satria	-
24	Zulfikar	-
25	Syahrial	Perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait penyerapan dan penyaluran DAK fisik agar dapat mengevaluasi kekurangan dan permasalahan pelaksanaan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang
26	Iin yuliani	Apabila ada hal2 yang harus dilaporkan dalam rangka percepatan penyerapan DAK harap di infokan secepatnya...
27	M.Nurdin Zaini	Semoga ke depan pagu usulan DAK sesuai dengan pagu yg diterima
28	Lutfieka.SE.MSi	Tahapan penyaluran tidak perbidang. Sehingga peyerapan dpt tepat waktu
29	Edwyn Akhsa, ST, MT	Pengawasan Melekat
30	Siti Mayang	Juknis Dak Fisik keluar sebelum Pengesahan DPA Dinas sehingga tidak perlu lagi dilakukan Perubahan anggaran DPA
31	Amarullah, ST	Terbenturnya aturan teknis antara pembayaran yang dilakukan oleh pusat ke daerah Kab/Kota sebesar 25% dengan pembayaran yg dilakukan daerah ke KSM (penugasan - swakelola) sesuai kontrak sebesar 40%. Mohon pencerahan dan pertimbangan.
32	Muhammad Siswanto, ST, MT	-
33	Syamsul bahri	Dalam pelaksanaan diharapkan transfer dana DAK dari pusat ke daerah dipercepat.
34	Saiful Rizal,S.Pi,M.Si	Proses lelang yg terlambat kadang kala menghambat proses dalam pelaksanaan/progres DAK dilapangan
35	Tarnuzi, ST, MPH	Penyederhanaan juknis dan aturan penarikan/penyaluran dana dak
36	Armansyah, ST, MT	Pelaksanaan DAK Hendaknya menyesuaikan kondisi daerah berangkutan
37	Lindawati, ST, M Kes	Pengesahan Anggaran sebaiknya dilakukan paling telat awal bulan januari berjalan dan penunjukan tim pelaksanaan dari bulan januari berjalan

38	Devizar	Pelelangan DAK dapat dipercepat, kalau bisa kontrak sudah terikat paling lambat bulan Maret agar Laporan Triwulan ada realisasinya (tidak nihil). Dan khusus utk DAK agar ULP dapat melakukan proses pengadaan lebih cepat agar kontrak dapat langsung ditandatangani setelah pengesahan anggaran. Hal ini penting agar penyerapan anggaran dapat sesuai mengikuti rencana.
39	Baihaqi	-
40	HASMUDDIN, SKM	semoga percepatan waktu penyerapan DAK Fisik pada tahun 2017 tetap dipertahankan untuk tahun selanjutnya
41	Moestiem	Mekanisme tahapan transfer DAK ke daerah jangan dibagi per triwulan, tapi lebih fleksible mengingat kondisi daerah yang tidak selalu tepat waktu dalam penyusunan RAPBK.
42	Ruslan	-
43	Arbiansah, SKM, MKM	Pengesahan APBK tahun berjalan agar bisa dilaksanakan maksimal di bulan Januari.
44	Riswandi	Sisten pelaksanaan dak sudah bagus, perlu sosialisasi lebih banyak dalam penerapannya.
45	Fajar Mustika	-
46	Dasmaril Zain	Perlu perencanaan yang matang karena sering terabaikan dalam kesiapan dokumen
47	iman ardiansyah noor, sp	dana dak kalau bisa berdiri sendiri.
48	Iswadi, skm, mkm	-
49	Saiful, S. Sos	Sebaiknya pengesahan APBK dalam bulan desember
50	dr. suherdy, Sp.PD	-
51	Ajeng Wahyuni Pranata	Proses pembayaran lebih cepat
52	Zulfitrie	Pengesahan anggaran awal tahun dan penunjukan tim segera
53	Khairiah, SKM	Pembentukan team segera mungkin setelah pengesahan Anggaran.
54	taufik	-
55	Yusra	Birokrasi surat-menyurat untuk dipercepat prosesnya
56	Husaini	Penganprahan sebaiknya di Bendahara Pemda saja spt dana DAU.
57	Afrida Surya, ST	Saran: Mempercepat proses pembahasan anggran Masukan: Memperkecil kebijakan yang bertentangan dengan kegiatan yang sudah terencanakan.
58	Muhammad armiyadi	Pengesahan anggaran harus tepat waktu
59	Maryadi	Karena anggaran DAK menyatu dgn APBA maka pelaksanaannya akan mengikuti pengesahan APBA, oleh karena itu mohon ada kebijakan khusus yg kuat setingkat menteri atau presiden yg bertujuan agar kegiatan DAK dapat dilaksanakan langsung setelah pengesahan RKA DAK yg ditandatangani kementerian teknis, sehingga SKPA tidak perlu menunggu pengesahan APBA dalam melaksanakan sumber anggaran DAK.
60	Fadli Anwar	Dinas terkait mendorong Penyedia Jasa untuk melakukan penarikan ternyn pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan kesiapan dilapangan supaya serapan anggaran lebih cepat dan mempengaruhi dari pada realisasi keuangan.
61	Ir. M. Zuardi, SP	Pengesahan DIPA agar dapat dilakukan tepat waktu sehingga pelaksanaan pelelangan dapat dijadwalkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan penyerapan anggaran paket-paket DAK dapat terserap dengan baik. Dengan begitu semua paket-paket DAK dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.
62	Farhan	Pengesahan APBD hrs tepat waktu di bulan januari supaya pelaksanaan pengadaan tdk terlambat
63	MIKHSAN AHYAT, S.STP, MM	SUPAYA LEBIH BAIK LAGI DAN TERARAH
64	Habibudin S.pd	-
65	Nasruddin, SP	Memberikan workshop dan pelatihan terhadap tim pengelola dak agar pelaksanaannya tepat waktu/ tepat sasaran akuntable bisa dipertanggung jawahkan.
66	MIKHSAN AHYAT, S.STP, M.AP	SUDAH CUKUP, UNTUK TAHUN KEDEPAN AGAR LEBIH DI TINGKATKAN, TERIMA KASIH
67	LISA ASMIRA, S.AP	-
68	ZUL FAHMI, ST.	-
69	ALI MURTADA, SP	-
70	HAMED	-
71	AYU LESTARI	-
72	M IRWAN HADI	-

73	YAN FEBRIYAN	Mudah-mudahan ke depan pencairan DAK Fisik dan Non fisik masing-masing SKPK langsung ke KPPN tidak lagi ke BPKD
74	SELAMAT RIADIM S.KOM.MM	-
75	ARUN S.PD	-
76	Erwin Syahputra	Tahapan pencairan dana dibuat 2 tahap
77	Faisal M	Penyaluran tahapan jika dapat dilakukan per semester
78	KALI, SE	-
79	Wahyuni	Finalisasi data kontrak di validkan pa tahap penyaluran akhir..
80	HAMZAH FANSURY	-
81	RUDI SANTOSO	Ada pelatihan bagi operator dalam mempercepat penyerapan DAK FISIK secara berkala
82	sugeng prayitno	-
83	SULAM SUSILO	-
84	YUSNITA SIREGAR	khususnya pada bidang pariwisata kegiatan dana dak fisik di ubah menjadi tambahan jangsan hanya reguler, jadwal pencairan dana dak fisik agar di sesuaikan jadwal yang telah ditentukan agar pelerjaan tidak terbengkalai harus sesuai g jadwal
85	ALIANTA	KHUSUNYA PADA BIDANG PARAWISATA DAN PEMUDA KEGIATAN DANA DAK FISIK DIUBAH MENJADI TAMBAHAN JANGAN KE REGULER, JADWAL, PENCAIRAN DANA DAK FISIK AGAR DIPERCEPAT PADA BULAN MARET
86	dr. SARIFIN USMAN KOMBIH	Setidaknya disetiap Daerah sudah ada KPPN.
87	Mawardi	-
88	Zulhafiqi	Pengesahan APBA tepat waktu
89	Drs. Muhammad Hasan, M.Kes	-
90	SUKRI MANTO	Doharapkan kepada KPPN untuk lebih sering melaksanakan kegiatan ke instansi PEMDA
91	DARMAWATI	Harap dana dak fisiknya cepat dilimpahkan ke Daerah agar rencana kegiatan tidak tertambat penyelesaiannya
92	M Rizki Abdul Aziz	-
93	Muchlis	Sosialisasi ke desa agar segera menyelesaikan APBDes
94	ARI SETIAWAN	-
95	In Yuliani	pengeluaran dana alokasi DAK FISIK DAN NON FISIK BISA TEPAT WAKTU DAN DISALURKAN DI AWAL TAHUN ANGGARAN
96	T. IMRAN. SKM	Perlunya penguatan sumber daya manusia dalam proses pelaporan realisasi baik itu fisik maupun non fisik serta diberikan pelatihan lebih lanjut untuk generasi selanjutnya
97	elia rita Mutia	Sering di sosialisasi kan dan di beri pelatihan atau bimtek jadi siapa pun pejabatnya tahu menjalankan fungsi ,dan tahu tahap pencairan tepat waktu
98	Drs. Abdullah, Ak. CA.	Di tahun anggaran 2019 diharapkan persyaratan transfer dana DAK lebih ringan dan peraturannya diterbitkan lebih awal dan tidak berubah secara siknipikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2019.
99	Iskandar, S.Sos., MM	-
100	Nazaruddin sh	Harapan kami adalah DAK utk tahun tahun ke depan dikirim tepat waktu sehingga kami tidak terburu buru dlm melakukan kegiatan
101	Chairil Anwar	Dana DAK perlu dibuat PPK tersendiri tdk bergabung dg anggaran APBD
102	Yoes Ebiet	-
103	Darwis	-
104	Boby Arsenal	-
105	Noviansyarif	-
106	Andri	-
107	syafri amin	MEMPERMUDAH BIROKRASI PENYALURAN DAK FISIK TAHUN TAHUN BERIKUTNYA
108	ISKANDAR BURMA	Rencana kegiatan di apliasi OM SPAN telah diinput ke OM SPAN pada saat tahap pembabasan/persetujuan dengan menteri terkait
109	Muhammad junaidi ar	Untuk tahun yang akan datang perlu juga mempertimbangkan kesediaan diklat yang melibatkan kepala daerah terkait dengan juknis dan sanksi tentang DAK fisik.
110	Sofan Hidayat	Agar regulasi yang digunakan tidak berubah ubah setiap saat dan disediakan beberapa orang petugas di KPPN yang menangani DAK Fisik dan Dana Desa.
111	Niala Siswanto	AGAR KEDEPAN KOORDINASI ANTARA DINAS/SKPD MASING-MASING LEBIH SINERGI LAGI

112	ALFIAN, ST	-
113	FERI KELANA	-
114	FIRMANSYAH	-
115	Three Eka Indra Bakti	-
116	Tohir	-
117	M. Syaifuddin Ambia	Juknis Bidang Pendidikan diusahakan terbit lebih awal.
118	Muhammad	DIPA harus selesai pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran bisa mengikuti jadwal yang telah direncanakan.
119	Musiburrahunan	Agar dikembalikan sistem pelaporan dana alokasi khusus seperti tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012, lebih simpel dan tidak rumit, terima kasih
120	Popi Halida	-

